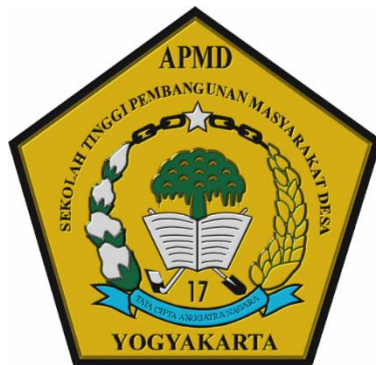


**MODEL REFLEKSI BANTUAN SOSIAL PKH DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN
(Studi Kasus Di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

WIDAYAT

23610028

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN JUDUL

**MODEL REFLEKSI BANTUAN SOSIAL PKH DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN**

**(Studi Kasus Di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Disusun Oleh:

WIDAYAT

23610028

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”**

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
TESIS
MODEL REFLEKSI BANTUAN SOSIAL PKH DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN
(Studi Kasus Di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh Kabupaten
Kulon Progo)

Disusun Oleh:


WIDAYAT
23610028

Disahkan oleh tim penguji
Pada tanggal 10 Februari 2025
Susunan Tim Penguji

Nama

1. Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M
Ketua/Pembimbing
2. Dr. Supardal, M.Si
Penguji I
3. Dr. Sri Widayanti
Penguji II

Tanda Tangan



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WIDAYAT
NIM : 23610028
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “Model Refleksi Bantuan Sosial Pkh Dalam Pengentasan Kemiskinan” (Studi Kasus Di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 3 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



WIDAYAT

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala petunjuk dan karunia-Nya sehingga peneliti telah mampu menyelesaikan tesis ini. Tulisan ilmiah ini, saya persembahkan kepada:

1. Allah Tuhan Yang Maha Pandai yang selalu memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan ini, tidak ada daya dan upaya selain dari Allah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Saudara Saya, kakak Barinem, kakak Suminah serta adik saya Bejo Setyawan yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan untuk setiap keberhasilan.
3. Keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 31 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Almamater dan segenap Civitas Akademika STPMD “APMD” di Yogyakarta yang telah menjadi ladang ilmu, untuk menambah kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berbuat.
5. Jajaran Aparat Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Seluruh Masyarakat Kalurahan Pagerharjo, dan semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Teman saya Mas Trihidayat yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan atas terselesaikanya tesis ini.

MOTTO

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan” (Imam Syafi’i)

“Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa” (Al-Ghazali)

“Tanamkan kebaikan niscaya akan memanennya disaat yang tepat”

“Jalan yang terjal akan menghantarmu ke masa depan yang cerah dan penuh rasa percaya diri”

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya kepada kita, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis tepat waktu, dengan judul “Model Refleksi Bantuan Sosial Pkh Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo)”.

Tujuan dari penyusunan tesis ini guna memenuhi sebagian syarat menjadi Sarjana Strata 2 pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta. Dalam pengerjaan tesis ini, peneliti melibatkan banyak pihak yang membantu dalam semua hal terkait dengan studi yang peneliti jalani. Peneliti menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan. Petunjuk, dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Supardal. M.Si selaku Penguji I
4. Ibu Dr. Sri Widayanti selaku Penguji II
5. Lurah beserta seluruh aparat Kalurahan Pagerharjo yang telah mendukung sepenuhnya terkait dengan perizinan, administrasi, dan pengambilan data.

6. Pendamping PKH dan Penerima PKH di wilayah Kalurahan Pagerharjo yang telah bersedia dan meluangkan waktu dalam proses wawancara guna menemukan dan mendapatkan data penelitian.
7. Tokoh-tokoh masyarakat Kalurahan Pagerharjo yang telah memberikan informasi penting terkait dinamika program bantuan sosial PKH di Kalurahan Pagerharjo.
8. Semua pihak yang telah membantu tersusunya tesis ini.

INTISARI

Pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali menghasilkan konsekuensi sosial yang beragam, salah satunya adalah ketidakseimbangan pendapatan yang berujung pada kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang membuatnya rentan terhadap masalah sosial lainnya. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengatasi kemiskinan, hasilnya masih belum optimal, terutama di tingkat kabupaten. Di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di Kalurahan Pagerharjo, meskipun program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan, masih terdapat masalah seperti penerima yang tidak tepat sasaran dan kecemburuan sosial. Data menunjukkan bahwa meskipun garis kemiskinan meningkat, jumlah penduduk miskin secara nasional mengalami penurunan. Namun, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih mencatatkan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, yaitu 11,04%. Pada tahun 2024 kabupaten Kulon Progo menjadi kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di antara 5 kabupaten lainnya yaitu sebesar 15,64%. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial di daerah tersebut, terutama di Kalurahan Pagerharjo, untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat benar-benar mengentaskan kemiskinan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan, Kamituwa, Dukuh, Pendamping PKH, Penerima PKH, serta tokoh masyarakat yang ada di Kalurahan Pagerharjo. Disamping data primer peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai penunjang analisis yang diperoleh melalui penelusuran dokumen regulasi, profil kalurahan, dan data pendukung lainnya. Guna menguji keabsahan data kebenaran data peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi hasil.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan PKH di Kalurahan Pagerharjo telah mampu membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, dalam kontes mengentaskan kemiskinan belum mencakup secara keseluruhan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketidaktepatan sasaran penerima

PKH, yang dikarenakan data yang kurang valid, sehingga menyebabkan ketidaktepatan seperti keluarga yang seharusnya lebih mendapatkan namun tidak terdata. Selain itu budaya “*njagake bansos*” yang berkembang di beberapa individu membuat program ini kurang efektif dalam memberdayakan penerima. Serta kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang menimbulkan sesenjangan dalam implemementasi program PKH. Kurangnya edukasi penerima PKH juga menjadi faktor penghambat terealisasi program, karena masih terdapat penerima bantuan yang belum memahami sepenuhnya bagaimana memanfaatkan bantuan untuk kemandirian ekonomi, justru menyalahgunakan bantuan sosial PKH untuk keperluan lain yang tidak menjadi prioritas. Sehingga temuan ini dapat digunakan untuk pembuatan strategi perbaikan seperti yang model refleksi janjikan bagi para pemangku kepentingan dan pelaksana program. Dengan memperhatikan faktor penghambat sebagai bahan evaluasi. Dalam hal ini maka perlu perbaikan validasi data penerima dengan selalu update dan bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk memastikan data tersebut akurat. Diamping itu dapat memperkuat pengawasan dan memberikan edukasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar bantuan PKH dapat menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi.

Kata Kunci: PKH, kemiskinan, refleksi, bantuan social

ESSENCE

Development in developing countries, including Indonesia, often results in diverse social consequences, one of which is income inequality that leads to poverty. Poverty is defined as the inability of individuals or groups to meet basic needs, making them vulnerable to other social issues. Although the Indonesian government has implemented various strategies to address poverty, the results have not been optimal, especially at the district level. In Kulon Progo Regency, particularly in Pagerharjo Village, despite the implementation of social assistance programs such as the Family Hope Program (PKH), issues such as misdirected beneficiaries and social jealousy persist. Data indicates that while the poverty line has increased, the number of poor people nationally has decreased. However, the Special Region of Yogyakarta (DIY) still records the highest poverty rate in Java, at 11.04%. In 2024, Kulon Progo Regency is projected to have the highest poverty rate among five other regencies, at 15.64%. This highlights the need for greater attention to the effectiveness of social assistance distribution in the region, particularly in Pagerharjo Village, to ensure that the aid provided can genuinely alleviate poverty and fulfill the basic rights of the community.

This research employs a qualitative approach using both primary and secondary data. Primary data is obtained through observations and in-depth interviews with the Kamituwa, Dukuh, PKH facilitators, PKH beneficiaries, and community leaders in Pagerharjo Village. In addition to primary data, the researcher also utilizes secondary data to support the analysis, which is gathered through document reviews, village profiles, and other relevant data. To test the validity of the data, the researcher employs both technique triangulation and result triangulation.

The findings of this study indicate that the PKH assistance in Pagerharjo Village has been able to help poor families meet their basic needs. However, in the context of alleviating poverty, it has not been comprehensive. This is influenced by several factors, including the inaccuracy in targeting PKH beneficiaries due to invalid data, which results in families that should receive assistance being left unrecorded. Additionally, the culture of "njagake bansos" (a term referring to the mindset of merely relying on social assistance) among some individuals makes this program less effective in empowering recipients. Furthermore, the lack of synergy between the central and local governments creates gaps

in the implementation of the PKH program. The insufficient education provided to PKH recipients also hinders the realization of the program, as some beneficiaries do not fully understand how to utilize the assistance for economic independence, and instead misuse the PKH aid for non-priority needs. Thus, these findings can be used to develop improvement strategies, serving as a reflective model for stakeholders and program implementers. By considering the hindering factors as evaluation material, it is essential to improve the validation of beneficiary data by regularly updating it and collaborating with local governments to ensure its accuracy. Additionally, strengthening oversight and providing education focused on community empowerment can help ensure that PKH assistance becomes a stepping stone towards economic independence.

Keywords: PKH, poverty, reflection, social assistance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	ix
<i>ESSENCE</i>	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Literatur	5
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Konseptual	11

BAB II.....	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik pemilihan Informan.....	34
F. Teknik Validasi Data.....	36
G. Tenik Analisis Data	40
BAB III	44
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	44
A. Sejarah Kelahiran Desa Pagerharjo	44
B. Kondisi Geografis Desa Pagerharjo.....	45
C. Kondisi Demografis	47
D. Data Penerima Bantuan Sosial.....	61
BAB IV	64
HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. HASIL TEMUAN DATA LAPANGAN	64
1. Informan Penelitian.....	64
2. Refleksi Bantuan Sosial PKH Dalam Pengentasan Kemiskinan.....	66
B. PEMBAHASAN.....	130

1. Refleksi Implementasi Program Bantuan Sosial PKH	130
2. Kontekstualisasi Tantangan.....	133
3. Strategi Perbaikan.....	134
4. Konsep 5G Mazhab Timoho Pada Refleksi Bantuan Sosial PKH Di Kalurahan Pagerharjo	135
BAB V	139
KESIMPULAN DAN SARAN.....	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
Daftar Pustaka	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kemiskinan menurut daerah dan kelompoknya (Rp/Kapita/Bulan)	5
Tabel 3. 1 Jumlah Dukuh di Kalurahan Pagerharjo.....	45
Tabel 3. 2 Daftar Rentang Umur Masyarakat Kalurahan Pagerhajo.....	47
Tabel 3. 3 Daftar Kategori Umur Masyarakat Kalurahan Pagerhajo.....	51
Tabel 3. 4 Daftar Pendidikan Masyarakat Kalurahan Pagerhajo	52
Tabel 3. 5 Daftar Pekerjaan Masyarakat Kalurahan Pagerhajo	55
Tabel 3. 6 Daftar Status Perkawinan Masyarakat Kalurahan Pagerhajo.....	57
Tabel 3. 7 Daftar Agama Masyarakat Kalurahan Pagerhajo.....	59
Tabel 3. 8 Daftar Sebaran Jenis Kelamin Masyarakat Kalurahan Pagerhajo.....	60
Tabel 3. 9 Data penerima bantuan sosial PKH per Padukuhan.....	61
Tabel 3. 10 Data bantuan yang berjalan.....	62
Tabel 4. 1 Daftar Informan Penelitian	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahap-Tahap Refleksi Graham Gibbs 1988.....	13
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perkembangan negara, proses pembangunannya selalu menghasilkan beragam konsekuensi sosial, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah ketidakseimbangan dalam pendapatan di antara penduduk, yang dapat menyebabkan kemiskinan. Masalah kemiskinan ini banyak dialami oleh negara-negara berkembang karena ketidakmampuan mengakses sumberdaya yang memadai (Norman, 2020). Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan ketidakmampuan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun kelompok, yang membuat mereka rentan terhadap munculnya permasalahan sosial lainnya. Kemiskinan dianggap sebagai kondisi di mana hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi dengan layak untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Nadila, 2023). Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami permasalahan kemiskinan tersebut. Sudah banyak strategi yang telah diimplementasikan oleh lembaga legislatif di Indonesia untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, namun pada kenyataannya, belum ada opsi yang dapat sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan hingga saat ini (Siregar et al., 2023).

Isu kemiskinan telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya (Siregar et al., 2023). Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin telah

diimplementasikan melalui berbagai perencanaan, kebijakan, dan program pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan memiliki dimensi yang beragam (Wahab & Sudirman, 2023). Proses pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan dan diintegrasikan secara holistik. Kemiskinan timbul karena disparitas kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan (Putra & Bawono, 2023).

Proses pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan khususnya oleh pemerintah Indonesia itu sendiri (Alawiyah & Setiawan, 2021). Pengentasan kemiskinan sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Yang mengingat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan kemudian di tegaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, serta di lengkapi dengan beberapa peraturan tentang kesejahteraan sosial yang mengikat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan dan memenuhi hak-hak dari pada masyarakatnya agar dapat menikmati hasil pembangunan. Nampaknya beberapa kasus telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian misi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga menyebabkan ketidaksetaraan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan yang terjadi di DIY sesuai data BPS pada tahun 2024 yang menyebutkan prosentase penduduk miskin berdasarkan Provinsi, Daerah DIY memiliki prosentase tertinggi di pulau jawa sebesar 11,04 %. Hal ini juga berdampak pada Kabupaten/Kota yang ada di DIY, salah satunya adalah Kabupaten Kulon Progo yang memiliki presentase berdasarkan data BPS tahun 2024 adalah sebesar 15,64%, data ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo masih tinggi dan merupakan yang tertinggi di antara Kabupaten/Kota lainya yang ada di DIY. Salah satu yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.

Menurut data yang diperoleh dari data sekunder Kalurahan Pagerharjo data yang menunjukkan tingkat pekerjaan dan pengangguran pada tahun 2024 yang ada di Kalurahan Pagerharjo menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat adalah bekerja sebagai petani atau pekebun sebesar 36,53% dari jumlah keseluruhan penduduk Kalurahan Pagerhajo. Disamping itu jumlah belum atau tidak bekerja memiliki prosentase yang cukup besar yaitu 13,19%. Hal ini merupakan masalah yang serius, sifat malas yang dimiliki oleh sebagian individu di Kalurahan Pagerharjo untuk tidak mau bekerja dan enggan bekerja sebagai petani dapat memicu bertambahnya tingkat kemiskinan ditingkat kalurahan bahkan dapat berdampak pada tingkat kabupaten hingga provinsi. Kebanyakan masyarakat justru *njagakke* bantuan dari pemerintah, menjadikan sifat malas dan enggan untuk bekerja serta tidak merasa malu ketika mendapatkan bantuan yang tidak seharusnya diterima.

Beragam program bantuan sosial yang ada terdapat di Kalurahan Pagerharjo diantaranya adalah PKH, BPNT, BPNT-PPKM, PBI JKN, dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah membantu keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membentuk kemandirian keluarga serta mengentaskan kemiskinan, namun yang terjadi adalah para penerima merasa nyaman atas bantuan yang didapatkan dan terdapat penerima manfaat yang *njagake* bantuan sosial dan enggan untuk bekerja untuk mencapai kemandirian keluarga sehingga bantuan sosial yang di berikan terkesan tidak tepat sasaran.

Fenomena kesejahteraan sosial melalui bantuan sosial PKH untuk mengentaskan kemiskinan menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut. Salah satu fenomena yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah terkait bantuan sosial PKH yang ada di Kabupaten Kulon Progo, DIY. Paparan yang disampaikan Oleh kepala Dinas Sosial Drs. Irianta dalam rapat Evaluasi Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Kabupaten Kulon Progo, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan dan kapanewon sudah optimal, namun untuk tingkat kabupaten masih dianggap belum optimal. Permasalahan yang terjadi selama ini seperti kecemburuan sosial, penerima tidak tepat sasaran, budaya tidak malu menerima bansos, rawan pemotongan untuk alasan tertentu dan *njagakke* bansos. Permasalahan lain yang dapat diangkat adalah masalah data yang dari dulu belum ada solusi yang lebih baik (Irianta, 2022). Maka dari itu fenomena tersebut menjadi menarik untuk dijadikan refleksi pada bantuan sosial khususnya PKH dalam menurunkan angka kemiskinan dengan validasi data yang sesuai

di kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo, DIY pada tahun 2024.

B. Kajian Literatur

Data Nasional menunjukkan garis kemiskinan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah dalam pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Pada tabel 1.1 terlihat bahwa selama maret 2022-Maret 2023, garis kemiskinan nasional meningkat sebesar 8,90 %. Sementara itu, garis kemiskinan di wilayah perkotaan naik sebesar 9,17%, dan di wilayah pedesaan naik sebesar 8,34%.

**Tabel 1. 1 Kemiskinan menurut daerah dan kelompoknya
(Rp/Kapita/Bulan)**

Daerah	Tahun	Garis Kemiskinan		
		Makanan	Non-Makanan	Total (GK)
(1)		(2)	(3)	(4)
Perkotaan	Maret 2022	377.958	143.536	521.494
	Maret 2023	415.588	153.711	569.299
Perdesaan	Maret 2022	370.096	114.113	484.209
	Maret 2023	399.460	125.590	525.050
Perkotaan + Perdesaan	Maret 2022	374.455	131.014	505.469
	Maret 2023	408.522	141.936	550.458

Sumber: BPS 2023

Meskipun angka garis kemiskinan terus naik, justru jumlah penduduk miskin 2023 turun dibandingkan tahun 2022, jumlah penduduk miskin pada 2023 sebesar 25,90 juta jiwa (9,36 %), turun 260

ribu orang dibandingkan 2022 yang sebesar 26,16 juta orang (9,54%) (BPS, 2023).

Mengacu pada data penelitian yang dilakukan oleh BPS diatas secara nasional menyatakan angka kemiskinan di Indonesia turun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak berarti seluruh nusantara mengalami penurunan angka kemiskinan yang merata, dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata yang disebabkan oleh adanya distribusi pendapatan yang tidak merata (Payapo et al., 2023). Pada data BPS yang menyebutkan prosentase penduduk miskin berdasarkan Provinsi menunjukan Daerah DIY memiliki presentase tertinggi di pulau jawa sebesar 11,04 %. Maka dari itu perlunya perhatian khusus terhadap Daerah DIY sebagai kota pendidikan namun masih memiliki presentasi masyarakat miskin tertinggi di pulau Jawa. Dalam hal ini apakah bantuan sosial yang selama ini digalangkan dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dapat tersalurkan dengan semestinya atau tidak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winarta et al (2020) menunjukan bahwa kebijakan bantuan sosial di kabupaten Gianyar masih belum efektif dan dapat dikatakan kurang tepat, karena masih adanya masyarakat/kelompok/organisasi yang menerima dana bantuan sosial lebih dari satu kali dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Maka hal ini berarti pengawasan pemerintah dalam implelementasi kebijakan bantuan sosial masih lemah atau kurang baik dan menyebabkan bantuan tidak sesuai dengan sasaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Supit & Lumingkewas (2023) dengan topik implementasi kebijakan bantuan sosial tunai di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Minahasa menyatakan bahwa implemtasi penyaluran dana peserta bantuan sosial tunai sudah tepat sasaran. Selain itu dalam penelitian tersebut menjelaskan terdapat dampak positif dan dampak negatif dari program bantuan sosial tunai, dampak positifnya sangat membantu masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan dampak negatif adalah program ini menciptakan budaya ketergantungan dan sifat malas atau bisa disebut dengan njagake bantuan sosial. Lebih lanjut dalam penelitian yang sudah dilakukan menjelaskan bahwa penerima bantuan yang sudah mendapatkan bantuan lain dari pemerintah seperti PKH tidak berhak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial tunai. Pengawasan yang ketat seperti wawancara langsung dan pencocokan data dengan kondisi dilapangan dilakukan oleh pihak kalurahan untuk memastikan tidak terdapat salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial tunai ini.

Bantuan sosial yang ada di berbagai daerah, layaknya daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bukan hanya bantuan berupa PKH tetapi juga berupa bantuan pangan non tunai atau BPNT dalam upaya pengentasan kemiskinan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadhli & Nazila (2023) bantuan yang berupa BPNT tidak memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya bantuan pangan hanya memenuhi kebutuhan pangan dan menekan pengeluaran saja, sehingga belum maksimal dalam pengentasan kemiskinan. Peneliti lain dengan lokasi penelitian di Yogyakarta menyatakan bahwa bantuan pangan non tunai atau BPNT

secara umum berjalan efektif namun dengan beberapa catatan yang perlu di perhatikan untuk meningkatkan kinerjanya salah satunya adalah performa dari dimensi administrasi yang masih kurang (Iwan Hermawan et al., 2021). Bantuan pangan non tunai yang merupakan salah satu jenis dari PKH secara langsung di beberapa daerah memiliki pengaruh yang positif dalam kesejahteraan sosial penerima manfaat (Lestari & Talkah, 2020).

Apapun jenis bantuan sosial yang ada, salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan sosial masyarakat. Namun masih terdapat kesenjangan di berbagai daerah yang tidak memanfaatkannya dengan baik, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Hal ini juga terjadi di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kabupaten Kulon Progo. Terlebih angka kemiskinan Daerah DIY masih di atas ambang batas nasional yaitu sebesar 11,04 % dan tertinggi di pulau jawa. Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus bagi para peneliti, banyaknya bantuan sosial yang di glontorkan namun angka kemiskinan masih tergolong tinggi.

C. Fokus Penelitian

Berpijak pada angka kemiskinan Daerah DIY di atas ambang batas kemiskinan nasional, maka fokus penelitian ini bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diimplementasikan pada Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. PKH, didalami dari kondisi eksisting kesejahteraan sosial, pendistribusian bantuan sosial, dan penggunaan bantuan sosial yang tepat sesuai dengan peruntukannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dirumuskan tiga rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi eksisting kesejahteraan sosial di Kalurahan Pagerharjo Tahun 2024.
- b. Bagaimana proses pendistribusian bantuan sosial PKH di kalurahan Pagerharjo?
- c. Apakah penggunaan bantuan sosial PKH di kalurahan Pagerharjo sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kemanfaatannya?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk menganalisis kondisi eksisting kesejahteraan sosial di Kalurahan Pagerharjo, Kulon Progo. Menggambarkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di Kalurahan Pagerharjo saat ini. Tujuan ini berfokus pada pemahaman menyeluruh tentang status sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat setempat.
 - 2) Untuk mengidentifikasi proses pendistribusian bantuan sosial PKH. Menelaah dan mendokumentasikan bagaimana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) didistribusikan di Kalurahan Pagerharjo. Ini termasuk mekanisme penyaluran, kendala yang dihadapi, serta efektivitas dari proses distribusi tersebut.
 - 3) Untuk menilai sasaran dan kemanfaatan penggunaan bantuan sosial PKH. Mengevaluasi apakah bantuan sosial PKH yang diberikan sudah tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik

oleh penerima di Kalurahan Pagerharjo. Tujuan ini berfokus pada analisis apakah bantuan tersebut telah mencapai kelompok yang paling membutuhkan dan apakah bantuan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan program, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

- a) Pengembangan Pengetahuan: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik, kesejahteraan sosial, dan studi pembangunan, khususnya terkait program pengentasan kemiskinan.
- b) Model Analisis Baru: Menghasilkan model refleksi baru yang dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial, khususnya PKH, dalam konteks lokal.
- c) Literatur Empiris: Memperkaya literatur empiris tentang implementasi dan dampak program bantuan sosial di tingkat desa/kalurahan di Indonesia.
- d) Metodologi Penelitian: Memberikan contoh pendekatan metodologis untuk melakukan evaluasi program sosial di tingkat mikro (desa/kalurahan).
- e) Teori Pembangunan: Berkontribusi pada pengembangan teori pembangunan *bottom-up* dan partisipatif dalam konteks pengentasan kemiskinan.

2) Manfaat Praktis

- a) Evaluasi Program: Memberikan evaluasi mendalam tentang implementasi PKH di Kalurahan Pagerharjo, yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program.
- b) Perbaikan Kebijakan: Menyediakan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan implementasi PKH di tingkat lokal.
- c) Keberlanjutan Program: Memberikan masukan untuk meningkatkan keberlanjutan dampak positif PKH dalam jangka panjang.
- d) Replikasi Model: Menyediakan model refleksi yang dapat diadaptasi dan direplikasi di daerah lain untuk evaluasi program bantuan sosial serupa.

F. Kerangka Konseptual

1. Refleksi

Istilah Refleksi dijelaskan dalam banyak definisi, dalam hal ini ditemukan satu titik temu, yaitu refleksi berkaitan dengan proses belajar secara kritis dari dan melalui pengalaman. Jhon Dewey (1933) merupakan pemeriksa mengenai refleksi, menyatakan refleksi adalah pertimbangan yang dilakukan secara aktif, hati-hati terhadap semua keyakinan atau segala bentuk pengetahuan untuk memecahkan persoalan (Anantasari, 2012). Dewey meyakini bahwa pengalaman dan teori memiliki proposi kepentingan yang sama. Bagi Dewey karakter individu yang reflektif adalah memiliki keterbukaan pikiran, kemauan untuk menerima tanggungjawab

terhadap pandangan pribadi, keberanian menghadapi rasa takut dan ketidakpastian serta penuh antusiasme (Hubbs & Brand, 2005). Dalam beberapa diskusi, istilah refleksi kritis sering muncul. Dalam perspektif Dewey, kritis berarti mampu membuat analisis yang menghasilkan asumsi-asumsi pencerahan untuk memecahkan masalah.

Sebagian besar literatur mengenai refleksi yang dikembangkan dari gagasan Dewey berfokus pada pembelajaran. Refleksi juga diaplikasikan di bidang industry dan organisasi (Burton, 2000). Mengingat manusia berciri multi dimensi, pengembangan di satu bidang berpengaruh pada bidang lain. Perkembangan satu aspek berkaitan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan. begitu pula yang terjadi pada organisasi semua aspek-aspek saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Maka penting sebuah organisasi, Lembaga, program, maupun diri individu untuk melakukan refleksi dan merencanakan langkah tindakan yang lebih baik lagi dari langkah sebelumnya. Model refleksi yang dikembangkan oleh Graham Gibbs (1988) dipandang cukup komperhensif dan membantu untuk mengembangkan manusia dalam keutuhan dimensinya, dan hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dari suatu organisasi ataupun sebuah program. Pada penelitian terdahulu model refelksi Gibbs banyak diaplikasikan dalam bidang Pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti model refleksi Gibbs dan mencoba mengaplikasikanya dalam program bantuan sosial.

2. Model Refleksi Graham Gibbs

Gibbs, dengan nama lengkapnya Graham Gibbs (1988), adalah seorang ahli yang bergerak dalam bidang Pendidikan di Universitas Oxford. Model refleksi yang disarankan oleh Graham Gibbs (1988) adalah sebuah pengembangan model dari siklus Kolb yang dibuat pada tahun 1984 (Kolb, 1984). Siklus Kolb meliputi tahap pengalaman konkrit, pengamatan reflektif, konseptualisasi abstrak dan perencanaan percobaan secara aktif. Siklus tersebut dianggap kurang luas dan kurang maju, sehingga Gibbs mengajukan suatu siklus yang dipandang dapat mengembangkan studi Kolb. Walaupun tidak banyak perubahan dari siklus Kolb ke Model yang ditawarkan Gibbs. Namun pengembangan ini cukup memberikan dampak pada industri Kesehatan maupun Pendidikan. maka dari itu menarik apabila modul Gibbs ini dapat diimplementasikan dalam bidang sosial seperti bantuan sosial. Tahapan yang dilakukan cukup memberikan gambaran yang terjadi masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang (Gibbs, 1988).



Gambar 1. 1 Tahapa-Tahap Refleksi Graham Gibbs 1988

Keterangan :

1. *Description*, Menggambarkan apa yang terjadi secara akurat dan detail
2. *Feelings*, Menggambarkan apa yang dirasakan dan dipikirkan
3. *Evaluatuon*, menilai hal-hal baik dan hal-hal buruk dari pengalaman tersebut
4. *Analysis*, menggambarkan pendapat mengenai situasi tersebut, secara kritis melihat hubungan antar bagian dalam suatu peristiwa serta alternatif yang ada dan mencari maknanya.
5. *Conclusion*, menegaskan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dan mencari hal-hal yang harus dilakukan
6. *Action Plan*, Membuat penegasan, apabila hal tersebut terjadi lagi, apa yang akan dilakukan. Berdasarkan pencerahan yang telah didapatkan.

Keenam tahapan ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan sebuah tindakan refleksi.

3. Bantuan Sosial

Berdasarkan permensos Nomor 5 tahun 2021, Bantuan Sosial adalah langkah pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat yang tidak mampu atau miskin dari risiko sosial, dengan menggunakan dana publik yang diberikan kepada penerima bantuan sosial dalam bentuk transfer uang, barang, atau jasa dari pemerintah pusat atau daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan ekonomi dan mencapai kesejahteraan agar mereka

dapat hidup secara layak. Dari segi lamanya pemberian, bantuan sosial dapat diberikan secara berlanjut untuk menjaga tingkat kesejahteraan dan kemandirian, atau dapat bersifat sementara dengan penyaluran tidak setiap tahun anggaran dan berhenti jika penerima dianggap sudah tidak lagi menghadapi risiko sosial. Bantuan diberikan dalam bentuk transfer uang elektronik (*nontunai*), barang, dan pelayanan. Kriteria penerima bantuan sosial meliputi mereka yang mengalami masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, perilaku menyimpang, keterpencilan, korban bencana, korban diskriminasi, eksploitasi, serta penyalahgunaan zat adiktif, psikotropika, dan narkotika.

Menurut Rahayu, (2012), Bantuan sosial yang didanai oleh anggaran APBN dibagi menjadi empat sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Dalam mekanisme penyalurannya, bantuan sosial dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga yang telah diatur dalam PMK Nomor 228/PMK.05/2016. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang berasal dari APBN berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanggulangan bencana, pelayanan dasar, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu Kementerian atau Lembaga tersebut adalah Kementerian Sosial, yang bertugas dalam penyaluran berbagai jenis program bantuan sosial sesuai dengan tupoksinya yang mencakup rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial,

penanggulangan bencana, pelayanan dasar, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.

Melalui program perlindungan dan jaminan sosial yang dikenal sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS), bantuan disalurkan melalui program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), serta untuk korban bencana alam maupun sosial. Bantuan sosial untuk penanganan fakir miskin mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan sosial untuk mengembangkan ekonomi produktif melalui kemitraan usaha. Bantuan rehabilitasi sosial dapat diberikan kepada lanjut usia, anak yang membutuhkan rehabilitasi sosial, tuna sosial, penyandang disabilitas, serta korban penyalahgunaan obat terlarang. Sementara itu, bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial mencakup pemberdayaan komunitas adat terpencil dan masyarakat dalam kategori risiko sosial.

a. Bantuan Sosial berdasarkan Teori Ekologi,

Teori Ekologi yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1994), menawarkan perspektif yang komprehensif dalam memahami interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks bantuan sosial, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana program-program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), mempengaruhi individu dan komunitas dalam berbagai tingkatan.

1) Mikrosistem

Mikrosistem mencakup lingkungan terdekat individu, seperti keluarga, teman, dan sekolah. Dalam konteks bantuan sosial, program seperti PKH dapat memberikan dukungan langsung kepada keluarga penerima, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya bantuan, keluarga dapat mengurangi stres ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan interaksi positif dalam keluarga dan lingkungan sosial mereka.

2) Mesosistem

Mesosistem melibatkan interaksi antara berbagai mikrosistem. Misalnya, bantuan sosial dapat memperkuat hubungan antara keluarga dan institusi pendidikan atau layanan kesehatan. Ketika keluarga menerima bantuan untuk pendidikan, anak-anak lebih mungkin untuk bersekolah secara teratur, yang dapat meningkatkan hasil pendidikan. Selain itu, program kesehatan yang terintegrasi dengan bantuan sosial dapat mendorong keluarga untuk lebih aktif dalam menjaga kesehatan mereka.

3) Eksosistem

Eksosistem mencakup lingkungan yang tidak langsung memengaruhi individu tetapi tetap berdampak pada mereka, seperti kebijakan pemerintah dan program sosial. Kebijakan yang mendukung bantuan sosial, seperti PKH, dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi keluarga miskin. Namun, jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan

dengan baik atau tidak ada dukungan dari lembaga terkait, maka dampak positifnya dapat berkurang.

4) Makrosistem

Makrosistem mencakup nilai-nilai budaya, norma, dan kebijakan yang lebih luas. Dalam konteks bantuan sosial, makrosistem dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memandang penerima bantuan. Stigma sosial terhadap penerima bantuan dapat menghambat partisipasi mereka dalam program-program sosial dan mengurangi efektivitas bantuan. Oleh karena itu, penting untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap bantuan sosial agar penerima merasa didukung dan tidak terdiskriminasi.

5) Kronosistem

Kronosistem mencakup perubahan yang terjadi seiring waktu, baik dalam kehidupan individu maupun dalam masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik dapat memengaruhi kebutuhan dan efektivitas program bantuan sosial. Misalnya, krisis ekonomi atau bencana alam dapat meningkatkan jumlah keluarga yang membutuhkan bantuan, sehingga memerlukan penyesuaian dalam program yang ada.

b. Bantuan sosial berdasarkan teori ketergantungan

Teori Ketergantungan, yang berasal dari pemikiran ekonomi politik, berfokus pada hubungan ketergantungan antara negara-negara berkembang (*periphery*) terhadap negara-negara maju (*core*) (Frank, 1967; Wallerstein, 1974). Dalam konteks bantuan sosial, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana

program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dapat menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan pemerintah, serta mengkritisi ketidaksetaraan struktural yang mendasari kemiskinan.

1) Ketergantungan Ekonomi

Teori Ketergantungan mengkritisi bahwa bantuan sosial dapat menciptakan ketergantungan ekonomi pada penerima bantuan. Misalnya, keluarga yang menerima PKH mungkin menjadi bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tanpa upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Jika program bantuan tidak disertai dengan upaya pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau akses ke modal usaha, masyarakat dapat terjebak dalam siklus ketergantungan yang berkepanjangan.

2) Ketidaksetaraan Struktural

Teori ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah individu, tetapi juga hasil dari ketidaksetaraan struktural dalam sistem ekonomi dan sosial. Bantuan sosial sering kali hanya menjadi solusi sementara yang tidak mengatasi akar masalah, seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya, meskipun PKH membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar, program ini mungkin tidak mampu mengubah struktur ekonomi yang membuat mereka tetap miskin.

3) Peran Negara dan Kebijakan

Teori ini juga mengkritisi peran negara dalam menciptakan ketergantungan melalui kebijakan bantuan sosial. Jika kebijakan hanya fokus pada pemberian bantuan tanpa upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural, maka program tersebut hanya akan menjadi alat untuk mempertahankan status quo. Negara perlu merancang kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem yang adil dan inklusif untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

4. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang selalu terkait dengan evolusi struktur ekonomi suatu negara, yang menghasilkan disparitas pendapatan di antara berbagai lapisan masyarakat. Menurut Machmud, A. (2016), kemiskinan adalah kondisi di mana masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi standar hidup minimum. Standar ini diukur dari kemampuan konsumsi yang dapat mencukupi kebutuhan gizi dasar serta kebutuhan dasar lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana masyarakat atau individu tidak memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka karena kondisi ekonomi yang sulit dan pendapatan yang rendah. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, pendidikan, perumahan, air bersih, kesehatan, dan lingkungan hidup.

b. Ciri-Ciri Kemiskinan

Beberapa karakteristik kemiskinan yang diidentifikasi oleh para ahli dari berbagai penelitian untuk membedakan antara masyarakat yang mengalami kemiskinan dan yang tidak (Suyanto, 2013), sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang termasuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan umumnya tidak memiliki faktor produksi, seperti tanah, modal, atau keterampilan yang cukup, yang mengakibatkan keterbatasan dalam kemampuan untuk meningkatkan pendapatan.
- 2) Umumnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh aset produksi secara mandiri.
- 3) Tingkatan pendidikan yang rendah
- 4) Sebagian besar tinggal di daerah pedesaan yang memiliki sedikit atau tidak memiliki lahan pertanian yang layak garap, dan mereka mencari mata pencaharian sebagai buruh tani atau pekerja kasar di sektor-sektor di luar pertanian.
- 5) Kurangnya keterampilan atau keahlian, pendidikan yang terbatas, serta kehidupan di perkotaan, sering kali dengan usia yang relatif muda.

c. Pengentasan kemiskinan

Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip Ala (1981) meliputi:

- 1) Strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka

pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya;

- 2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.

Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu:

- 1) Penyediaan kebutuhan pokok;
- 2) Pengembangan sistem jaminan sosial; dan
- 3) Pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat.

Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut John Friedmann setidaknya terdiri empat tipe yaitu:

- 1) Perencanaan sebagai reformasi sosial (*social reform*), bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat;
- 2) Perencanaan sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*), bahwa para penentu kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat;
- 3) Perencanaan sebagai pembelajaran sosial (*social learning*), bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik (*learning by doing*), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli; dan
- 4) Perencanaan sebagai mobilisasi sosial (*social mobilization*), bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan digerakkan dengan berbagai konsep/ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka.

5. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian

dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik (Kemesos RI, 2016).

a. Tujuan PKH

Tujuan PKH pada umumnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat. sedangkan tujuan khusus dari PKH adalah (Kemesos RI, 2016):

- 1) PKH diarahkan untuk membanatu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
- 2) PKH diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil/nifas/balita ke fasilitas kesehatan, dan meningirmkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
- 3) Dengan jangka panjang, PKH diharaptkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

b. Penerima Bantuan

Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada

ibu maka: nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepersertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di kartu PKH (Kemesos RI, 2016).

c. Kewajiban Penerima

Beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap penerima PKH, baik pada bidang kesehatan maupun pada bidang pendidikan. Bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh para penerima, maka pendamping PKH berhak mengerluarkan sanksi (Kemesos RI, 2016).

1) Ketentuan bentuan kesehatan

Sasaran	Persyaratan (kewajiban peserta)
Ibu Hamil	Melakukan pemeriksaan kehamilan (antenatal care) sebanyak minimal 4 kali (K1 di trimester 1, K2 di trimester 2, K3 dan K4 di trimester 3) selama masa kehamilan.
Ibu Melahirkan	Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Ibu Nifas	Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari
Bayi Usia 0-11 Bulan	Anak berusia di bawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan.

Bayi Bulan	Usia 6-11	Mendapat suplemen tablet vitamin A
Anak Tahun	Usia 1-5	Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan penimbangan secara rutin setiap 1 bulan; Mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada bulan Februari dan Agustus
Anak Tahun	Usia 5-6	Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan/atau mengikuti program pendidikan anak usia dini.

Sumber: Kemesos RI, 2016

2) Ketentuan bantuan pendidikan

Anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan perogram pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka.

Sanksi yang diterima oleh para penerima PKH bila tidak menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut adalah peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yangt telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuanya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari progarm (Kemesos RI, 2016).

d. Hak Peserta PKH

Hak peserta PKH antara lain (Kemesos RI, 2016):

- 1) Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan.

- 2) Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Pusat kesehatan masyarakat, Posko pelayanan terpadu, Pondok bersalin desa).
- 3) Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal.
- 4) Peserta PKH diikutsertakan pada Program bantuan sosial lainnya (Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, Beras Miskin, Kelompok Usaha Bersama, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

e. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar PKH antara lain:

- 1) Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- 3) Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 4) Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- 5) Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung

Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

f. Dasar Pelaksanaan PKH

- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.
 - 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
 - 3) Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
 - 4) Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
- e. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

6. Konsep dasar Mazhab Timoho 5G

Konsep dasar Mahab Timoho yang dikenal sebagai 5G sering dikaitkan dengan prinsip atau nilai-nilai dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia. 5G dalam hal ini biasanya mengacu pada lima prinsip utama yang menjadi landasan bagi kebijakan atau tata kelola tertentu.

Meskipun istilah ini tidak begitu umum dalam literatur akademik, konsep 5G dalam Mahab Timoho kemungkinan merujuk pada lima aspek penting dalam pemerintahan atau administrasi publik, seperti:

- a. Good Governance: Prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- b. Government: Peran pemerintah dalam mengelola kebijakan publik dan pembangunan.
- c. Governability: Kemampuan pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif.
- d. Globalization: Respons pemerintah terhadap dinamika global dalam kebijakan dan pembangunan.
- e. Growth: Fokus pada pertumbuhan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pembangunan manusia.

Konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis dalam konteks bantuan sosial (Bansos) dalam hal ini adalah bantuan sosial PKH untuk melihat apakah implementasi pada program tersebut efektif, transparan, dan tepat sasaran.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, (2016), kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kejadian, kasus, atau fenomena secara alamiah, dimana dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrument kunci. Penelitian biasanya bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menerangkan kasus atau fenomena yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam untuk menggali makna. Sehingga karakteristik dari penelitian kualitatif adalah penelitian terbuka yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan jumlah relative kecil.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada pada Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diambil secara langsung pada lokasi penelitian, dan data sekunder yang menggunakan data pendukung dari BPS dan pemerintah DIY khususnya Kab Kulon Progo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini sebagai langkah paling utama, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Menurut Sugiyono, (2016) Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan di lingkungan alami (natural setting), menggunakan sumber data primer atau sekunder, serta melalui berbagai metode. Metode pengumpulan data meliputi observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi partisipan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra, termasuk penggunaan mata dan telinga, serta dibantu oleh panca indra lainnya. Dalam observasi ini, peneliti aktif terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek yang diamati, dengan mencatat dan merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh sumber data.

Menurut Sugiyono (2016) Dengan menggunakan observasi partisipan, data yang diperoleh diharapkan lebih komprehensif, detail, dan dapat memahami makna dari setiap perilaku yang diamati. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan tidak terstruktur, di mana pengamatannya tidak disiapkan atau dilakukan secara sistematis terkait dengan objek yang diamati. Peneliti tidak memiliki pengetahuan pasti tentang apa yang akan diamati. Saat melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan

instrumen yang formal, tetapi mengikuti pedoman pengamatan yang sudah ditetapkan.

Observasi partisipan tidak terstruktur dilakukan dengan cara mengamati aktivitas kegiatan program bantuan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan di wilayah DIY khususnya Kabupaten Kulon Progo.

Pada awal tahun 2024, sebuah observasi partisipan tidak terstruktur dilakukan di Kalurahan Pagerharjo, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan melalui program Keluarga Harapan (PKH). Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi dan dampak dari perogram tersebut, serta untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dana yang mungkin terjadi.

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian besar penerima manfaat di pagerharjo memanfaatkan dana PKH untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan anak, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Namun, ada juga beberapa kasus dimana dana tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan program, seperti pembelian barang konsumtif yang tidak mendesak. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan agar dana PKH dapat diugunakan secara lebih efektif.

Obeservasi ini memberikan wawasan berharga mengenai dinamika pelaksanaan PKH di tingkat lokal dan menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengawasan dan evaluasi program.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara peneliti dengan narasumber atau informan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Menurut Anggoro & M.Toha (2009) Wawancara semi terstruktur melibatkan serangkaian pertanyaan yang dirancang terlebih dahulu, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengembangkan topik dengan menggunakan pertanyaan setengah terbuka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari narasumber.

Adapun menurut Sugiyono (2016) Wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Ini berbeda dengan kegiatan observasi, di mana peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang diamati. Dalam pengumpulan data melalui wawancara, peneliti bertujuan untuk menggali informasi tentang proses distribusi bantuan sosial PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan diajukan kepada narasumber. Namun, dalam prosesnya, pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016) Dokumen adalah catatan tentang peristiwa masa lampau. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun menurut

Ibrahim (2018) Dokumen dapat berbentuk rekaman kejadian masa lalu yang dicatat atau ditulis, seperti catatan anekdot, buku harian, surat, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada sebelumnya.

Dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini diantaranya adalah dokumentasi geografis yang mencakup peta wilayah yang menunjukkan batas administratif, jaringan jalan, serta lokasi fasilitas umum. Selain itu terdapat dokumentasi demografis Kalurahan Pagerharjo yang dapat memberikan wawasan penting dalam memahami konteks sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Data demografis ini mencakup informasi tentang jumlah penduduk, distribusi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan struktur keluarga yang ada di Kalurahan Pagerharjo.

Dengan menggabungkan data geografis dan demografis, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi di Kalurahan Pagerharjo. Hal ini memungkinkan perumusan strategi yang lebih tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program seperti PKH.

E. Teknik pemilihan Informan

Penelitian kualitatif jarang menggunakan istilah sampel dan populasi karena fokusnya adalah pada individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu, dan temuan-temuannya relevan dengan konteks sosial tersebut. Spradley (2016) Konsep situasi sosial

digunakan untuk menggambarkan konteks di mana kelompok yang sedang diselidiki berada. Situasi sosial ini terdiri dari tiga elmen kunci, (1) individu yang terlibat (actors), (2) lokasi atau tempat (place), dan (3) kegiatan yang dilakukan (Activities). Situasi sosial dijadikan sebagai objek penelitian yang ingin diungkap dan dideskripsikan secara mendalam. Dalam konteks situasi sosial, peneliti melakukan wawancara dengan individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, serta melakukan observasi langsung terhadap kegiatan yang dilakukan atau bahkan mengambil foto untuk mengabadikan peristiwa atau kejadian. Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan oleh peneliti bukanlah "partisipan", melainkan "informan".

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, menurut Sumargo (2020) Artinya, penentuan informan dilakukan berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Alasan penggunaan teknik purposive sampling dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan informasi terkait dengan bantuan sosial PKH di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di Kalurahan/Desa Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh.

Informan yang akan dipilih sebagai sampel akan disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Hendarso (2011) informan penelitian meliputi tiga macam, yaitu:

- a. Dalam penelitian ini, informan kuncinya adalah para pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh

peneliti, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo atau Panewu Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

- b. Informan utama adalah orang yang memiliki pengetahuan teknis dan detail yang mendalam tentang masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, informan utama adalah Pendamping PKH, Perangkat Desa (Kamitua), Dukuh, dan Bpkal.
- c. Informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan tambahan adalah Tokoh masyarakat, Penerima bansos PKH, dan Masyarakat yang bukan sebagai penerima.

F. Teknik Validasi Data

a. Uji Drajat Kepercayaan (Credibility)

Pada dasarnya adalah menggantikan validitas internal dalam penelitian non-kualitatif. Kriteria ini berfungsi sebagai:

- 1) Melaksanakan inkuiri, sehingga tingkat kepercayaan penemuanya dapat dicapai.
- 2) Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

a) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan mengimplikasikan bahwa peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang telah ditemui sebelumnya atau yang baru. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan ini, hubungan antara peneliti dan

narasumber dapat semakin terjalin. Hubungan yang semakin akrab dan terbuka memungkinkan adanya saling kepercayaan sehingga informasi yang diberikan tidak ada yang disembunyikan lagi. Ketika terbentuk hubungan yang harmonis, maka penelitian berjalan dengan wajar, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang sedang diamati (Stainback & William, 1998).

b) Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketelitian berarti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan terus-menerus. Dengan pendekatan ini, kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam dengan pasti dan sistematis. Ketelitian dalam pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap keakuratan data yang telah ditemukan. Selain itu, dengan meningkatkan ketelitian, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis mengenai apa yang diamati.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode, dan dilakukan pada berbagai waktu yang berbeda. Flick (2018) membedakan beberapa macam triangulasi sebagai Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *Sumber, Metode, Penyidik*.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan informasi

yang diperoleh dari berbagai waktu dan metode yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987). Cara yang dapat digunakan adalah:

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- (2) Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi,
- (3) Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dilakukannya sepanjang waktu,
- (4) membandingkan keadaan dan prspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang pemerintahan.
- (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Yang penting di sini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. (Patton, 1987)

2. Triangulasi metode/Teknik

Menurut Patton (1987) terdapat dua strategi yaitu:

- (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa Teknik pengumpulan data (mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang brebeda)

(2) Pengecekan drajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

d) Pengecekan sejawat dengan diskusi

Pemeriksaan sejawat merupakan proses pemeriksaan yang melibatkan kolega sebidang yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang topik penelitian, sehingga bersama-sama mereka dapat melakukan review terhadap persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan oleh peneliti. Teknik ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk mengasah pemikiran peneliti namun tetap mempertahankan sikap terbuka dan jujur; kedua, memberikan kesempatan awal yang baik untuk mulai menjelajahi dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

e) Kecukupan referensi

Bahan referensi dalam konteks ini mengacu pada pendukung yang menyediakan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Ini mencakup dukungan berupa rekaman wawancara, gambaran keadaan yang didukung dengan foto, dan penggunaan berbagai alat bantu perekam seperti kamera dan alat rekam suara.

f) Keteralihan (transferability)

Teransferabilitas merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi atau konteks lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai teransferabilitas bergantung pada pengguna atau pemakai hasil penelitian,

yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat berguna dalam konteks sosial dan situasi yang berbeda.

g) Kebergantungan (dependability)

Dependabilitas digunakan untuk memastikan keandalan dan kepastian data dengan melakukan audit terhadap proses maupun hasil penelitian. Audit ini dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing untuk mengaudit seluruh aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti harus dapat menunjukkan bagaimana mereka memulai dengan menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan untuk mengumpulkan data, menentukan sumber data, melakukan analisis data, menguji keabsahan data, dan menarik kesimpulan.

h) Kepastian (confirmability)

Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang terkait dengan proses penelitian itu sendiri, serupa dengan dependability, sehingga kedua aspek ini dapat dilakukan secara bersamaan. Jika hasil penelitian merupakan hasil langsung dari proses penelitian yang dilakukan, itu berarti telah memenuhi confirmability.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan ketika data empiris yang diperoleh berupa kata-kata atau narasi, bukan sekadar angka, dan tidak dapat diorganisir dalam kategori atau struktur klasifikasi. Data ini dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, atau rekaman audio. Biasanya, data ini

diproses terlebih dahulu melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau transkripsi sebelum dapat digunakan. Analisis kualitatif melibatkan pengorganisasian kata-kata ini menjadi teks yang diperluas, tidak melibatkan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles & Huberman (1992), Proses analisis terdiri dari tiga tahap yang berjalan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahap ini berinteraksi secara saling terkait, membentuk suatu siklus proses yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data. Proses ini menghasilkan pemahaman mendalam yang dikenal sebagai "analisis", di mana setiap tahapan berperan membangun wawasan umum.

Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif, meliputi transkripsi hasil wawancara, reduksi data, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses analisis data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan sebagai metode utama.

2. Reduksi Data

Reduksi data tidak berdiri sendiri dalam proses analisis. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar

yang berasal dari catatan tertulis lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung secara berkelanjutan, terutama selama proyek penelitian kualitatif berlangsung atau selama proses pengumpulan data.

3. Display Data

Display data adalah deskripsi dari sejumlah informasi yang terstruktur sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dan dilakukan tindakan berikutnya. Penyajian data kualitatif biasanya dalam bentuk teks naratif namun juga dapat berupa matriks, diagram, tabel, dan grafik.

4. Verifikasi dan penegasan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Ini melibatkan kegiatan interpretasi untuk menemukan makna dari data yang telah dipresentasikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan, terdapat aktivitas analisis data yang terjadi. Dalam konteks analisis data kualitatif, ini merupakan upaya yang berkelanjutan, berulang, dan terus-menerus. Proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berurutan menjadi indikasi keberhasilan dalam rangkaian kegiatan analisis yang saling terkait.

Setelah data dianalisis, dijelaskan, dan diberi makna dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan fakta-fakta di lapangan serta menjawab pertanyaan penelitian, kemudian disimpulkan dalam intisari. Setiap tahap dalam proses tersebut bertujuan untuk memastikan keabsahan data dengan meneliti semua informasi yang

diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui wawancara lapangan, studi dokumentasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Kelahiran Desa Pagerharjo

Setiap Desa atau Daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda, yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah Desa atau Daerah selalu menjadi cerita turun temurun dari penduduk desa atau daerah setempat sehingga sulit untuk mencari fakta, karena masing-masing individu menaburkan dengan kapasitas kemampuan dirinya dalam menyerap isi sejarah tersebut. Dan tidak jarang cerita tersebut dihubungkan dengan mitos pada tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat, seperti halnya Desa Pagerharjo yang memiliki adat dan tradisi yang merupakan identitas desa secara turun temurun.

Nama Pagerharjo ada setelah sebelumnya berdiri tiga pemerintahan Desa/Kelurahan, yaitu Kelurahan Plono dipimpin oleh Simbah Kariyo Sentono, Kelurahan Gegerbajing dipimpin oleh Simbah R. Dermo, dan Kelurahan Kalirejo dipimpin oleh Simbah R. Udoikromo, sampai dengan tahun 1948.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka lahirlah gagasan dan pemikiran dari para tokoh, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat untuk menggabung tiga Kelurahan tersebut menjadi satu Kelurahan dan satu Pimpinan/Lurah yaitu Simbah Kariyo Sentono.

Dari ketiga Kelurahan tersebut akhirnya digabung menjadi satu Kelurahan dan nama Kelurahan diambilkan dari huruf-huruf tertentu dari tiga Kelurahan yaitu P dari Plono, GER dari Gegerbajing, dan JO dari Kalirejo, sehingga tersusunlah sebuah nama PAGERHARJO yang berarti Desa yang ramai dan kaya.

B. Kondisi Geografis Desa Pagerharjo

1. Luas Wilayah Desa Pagerharjo

Luas wilayah Desa Pagerharjo adalah 1.069,5115 Ha, mencakup area yang cukup luas dengan beragam potensi sumber daya dan penggunaan lahan. Desa ini terdiri atas 20 (dua puluh) padukuhan, yaitu:

***Tabel 3. 1 Jumlah Dukuh di Kalurahan
Pagerharjo***

1	Padukuhan Separang	11	Padukuhan Kemesu
2	Padukuhan Sarigono	12	Padukuhan Ngentak
3	Padukuhan Ngemplak	13	Padukuhan Sinogo
4	Padukuhan Plono Barat	14	Padukuhan Kalirejo Utara
5	Padukuhan Plono Timur	15	Padukuhan Kalirejo Selatan
6	Padukuhan Nglinggo Barat	16	Padukuhan Kalinongko
7	Padukuhan Nglinggo Timur	17	Padukuhan Jetis
8	Padukuhan Jobolawang	18	Padukuhan Beteng
9	Padukuhan Ngaglik	19	Padukuhan Suren
10	Padukuhan Gegerbajing	20	Padukuhan Mendolo

Sumber: Dokumen Data Kalurahan Pagerharjo 2024

2. Batas Wilayah

- a) Utara : Desa Sedayu Loano
- b) Selatan : Desa Pucungroto, Desa Ngadirejo Loano
- c) Barat : Desa Sedayu Loano
- d) Timur : Desa Ngargosari, Desa Banjarsari Samigaluh

3. Topografi

- a) Luas kemiringan lahan (rata-rata)

Luas kemiringan lahan di Desa Pagerharjo terdiri atas dua kategori, yaitu lahan datar dengan luas 32,085 Ha dan lahan miring yang mencakup area sebesar 1.037,426 Ha.

- b) Ketinggian

Ketinggian Desa Pagerharjo berada pada rata-rata 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut, menciptakan karakteristik wilayah yang sejuk dan mendukung berbagai potensi alam.

4. Hidrologi

Sistem hidrologi Desa Pagerharjo didukung oleh irigasi dengan pengairan teknis, yang memastikan distribusi air yang optimal untuk mendukung kebutuhan pertanian dan kegiatan lainnya.

5. Klimatologi

Desa Pagerharjo memiliki kondisi klimatologi yang khas. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celsius, dengan curah hujan mencapai 2.500 hingga 3.000 mm per tahun. Informasi mengenai kelembaban udara dan kecepatan angin belum tersedia, tetapi faktor-faktor iklim yang ada menunjukkan wilayah ini memiliki potensi lingkungan yang mendukung aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat.

6. Luas Lahan pertanian

Luas lahan pertanian di Desa Pagerharjo terbagi menjadi dua jenis, yaitu sawah teririgasi dengan luas 58,20 Ha dan sawah tadah hujan seluas 48,2565 Ha. Pembagian ini mencerminkan variasi dalam sistem pengelolaan air untuk menunjang produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

7. Luas Lahan Pemukiman

Luas lahan permukiman di Desa Pagerharjo adalah 351,2335 Ha, yang menunjukkan alokasi wilayah yang signifikan untuk hunian dan aktivitas kehidupan masyarakat.

C. Kondisi Demografis

1. Rentang Umur

**Tabel 3. 2 Daftar Rentang Umur Masyarakat Kalurahan
Pagerhajo**

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	0 S/D 1 TAHUN	31	0,66%	19	0,40%	12	0,25%
2	2 s/d 4 Tahun	126	2,68%	63	1,34%	63	1,34%
3	5 s/d 9 Tahun	288	6,12%	151	3,21%	137	2,91%
4	10 s/d 14 Tahun	278	5,90%	145	3,08%	133	2,82%
5	15 s/d 19 Tahun	315	6,69%	174	3,70%	141	2,99%
6	20 s/d 24 Tahun	348	7,39%	180	3,82%	168	3,57%
7	25 s/d 29 Tahun	368	7,82%	192	4,08%	176	3,74%

8	30 s/d 34 Tahun	296	6,29%	152	3,23%	144	3,06%
9	35 s/d 39 Tahun	239	5,08%	122	2,59%	117	2,49%
10	40 s/d 44 Tahun	253	5,37%	120	2,55%	133	2,82%
11	45 s/d 49 Tahun	331	7,03%	165	3,50%	166	3,53%
12	50 s/d 54 Tahun	353	7,50%	189	4,01%	164	3,48%
13	55 s/d 59 Tahun	341	7,24%	168	3,57%	173	3,67%
14	60 s/d 64 Tahun	292	6,20%	137	2,91%	155	3,29%
15	65 s/d 69 Tahun	271	5,76%	134	2,85%	137	2,91%
16	70 s/d 74 Tahun	207	4,40%	110	2,34%	97	2,06%
17	Di atas 75 Tahun	371	7,88%	175	3,72%	196	4,16%
	JUMLAH	4708	100,00%	2396	50,89%	2312	49,11%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	4708	100,00%	2396	50,89%	2312	49,11%

Sumber: Dokumen Data Kalurahan Pagerharjo 2024

Tabel 3.2 memberikan gambaran tentang distribusi rentang umur masyarakat di Kalurahan Pagerharjo pada tahun 2024. Berikut adalah analisis dari data tersebut:

a) Distribusi Umur:

Populasi di Kalurahan Pagerharjo tersebar di berbagai kelompok umur, dengan jumlah total penduduk sebanyak 4.708 orang. Kelompok umur terbesar adalah "Di atas 75 Tahun" dengan 371 orang, yang mencakup 7,88% dari total populasi, menunjukkan adanya populasi lansia yang signifikan di wilayah

ini. Selain itu, kelompok umur 25 s/d 29 tahun juga memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu 368 orang atau 7,82% dari total populasi, menandakan potensi tenaga kerja muda yang dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial di Kalurahan Pagerharjo.

b) Distribusi Jenis Kelamin:

Secara keseluruhan, distribusi jenis kelamin di Kalurahan Pagerharjo cukup seimbang, dengan 2.396 laki-laki (50,89%) dan 2.312 perempuan (49,11%). Namun, pada kelompok umur "Di atas 75 Tahun", terdapat lebih banyak perempuan, yaitu 196 orang (4,16%), dibandingkan laki-laki yang berjumlah 175 orang (3,72%). Hal ini mungkin menunjukkan harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki di wilayah ini, yang merupakan tren umum di banyak populasi.

c) Kelompok Usia Produktif:

Kelompok usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, mendominasi populasi di Kalurahan Pagerharjo, mencakup sebagian besar tenaga kerja potensial. Di antara kelompok ini, kelompok umur 20 s/d 24 tahun dan 25 s/d 29 tahun memiliki jumlah yang cukup besar, masing-masing dengan 348 orang (7,39%) dan 368 orang (7,82%). Kehadiran signifikan dari kelompok usia ini menunjukkan potensi tenaga kerja muda yang dapat berkontribusi secara produktif terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.

d) Kelompok Usia Anak dan Remaja:

Kelompok usia anak dan remaja (0 s/d 14 tahun) juga cukup besar, dengan total 723 orang (15,36% dari total populasi),

menunjukkan potensi kebutuhan akan fasilitas pendidikan dan layanan anak.

e) Implikasi Sosial dan Ekonomi:

Dengan populasi lansia yang cukup besar, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperhatikan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi kelompok ini, agar mereka dapat hidup dengan kualitas yang baik. Di sisi lain, kelompok usia produktif yang besar dapat menjadi aset ekonomi yang berharga jika diberdayakan dengan baik melalui pelatihan dan kesempatan kerja yang memadai. Keseimbangan gender yang relatif merata juga dapat mendukung kebijakan yang inklusif dan adil dalam berbagai program sosial dan ekonomi, memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang. Secara keseluruhan, data ini memberikan wawasan penting untuk perencanaan kebijakan dan program di Kalurahan Pagerharjo, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari setiap kelompok umur dan jenis kelamin.

2. Kategori Umur

**Tabel 3. 3 Daftar Kategori Umur Masyarakat Kalurahan
Pagerhajo**

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	BALITA (0 - 5)	208	4,42%	108	2,29%	100	2,12%
2	ANAK-ANAK (6 - 17)	712	15,12%	384	8,16%	328	6,97%
3	DEWASA (18 - 30)	906	19,24%	469	9,96%	437	9,28%
4	TUA (31 - 99999)	2882	61,21%	1435	30,48%	1447	30,73%
	JUMLAH	4708	100,00%	2396	50,89%	2312	49,11%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	4708	100,00%	2396	50,89%	2312	49,11%

Sumber: Dokumen Data Kalurahan Pagerharjo 2024

Tabel 3.3 menunjukkan distribusi kategori umur masyarakat di Kalurahan Pagerharjo, dengan total populasi sebanyak 4.708 orang. Dari data tersebut, kelompok umur "TUA" (31 tahun ke atas) mendominasi populasi dengan jumlah 2.882 orang, yang mencakup 61,21% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kalurahan Pagerharjo berada dalam kategori usia yang lebih tua, yang dapat mempengaruhi kebutuhan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Kelompok "DEWASA" (18-30 tahun) juga menunjukkan angka yang signifikan, dengan 906 orang atau 19,24% dari total populasi. Ini menandakan adanya potensi tenaga kerja yang cukup

besar di kalangan pemuda, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, kelompok "ANAK-ANAK" (6-17 tahun) mencakup 712 orang atau 15,12%, yang menunjukkan pentingnya perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan anak-anak di kalurahan ini.

Kelompok "BALITA" (0-5 tahun) memiliki jumlah 208 orang atau 4,42%, yang meskipun lebih kecil, tetap memerlukan perhatian dalam hal kesehatan dan pendidikan awal. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang struktur demografis di Kalurahan Pagerharjo, yang dapat menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pendidikan dalam KK

**Tabel 3. 4 Daftar Pendidikan Masyarakat Kalurahan
Pagerhajo**

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	415	8,81%	211	4,48%	204	4,33%
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	378	8,03%	222	4,72%	156	3,31%
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	1205	25,59%	567	12,04%	638	13,55%
4	SLTP/SEDERAJAT	838	17,80%	413	8,77%	425	9,03%
5	SLTA / SEDERAJAT	1604	34,07%	867	18,42%	737	15,65%
6	DIPLOMA I / II	20	0,42%	6	0,13%	14	0,30%

7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	68	1,44%	18	0,38%	50	1,06%
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	172	3,65%	87	1,85%	85	1,81%
9	STRATA II	6	0,13%	4	0,08%	2	0,04%
	JUMLAH	470 6	99,96%	239 5	50,87 %	231 1	49,09 %
	BELUM MENGENAL	2	0,04%	1	0,02%	1	0,02%
	TOTAL	470 8	100,00 %	239 6	50,89 %	231 2	49,11 %

Sumber: Dokumen Data Kalurahan Pagerharjo 2024

Tabel 3.4 menyajikan data mengenai tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Pagerharjo, dengan total populasi sebanyak 4.708 orang. Dari data tersebut, terlihat bahwa kelompok yang memiliki pendidikan "TIDAK / BELUM SEKOLAH" mencapai 415 orang atau 8,81% dari total populasi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam akses pendidikan bagi sebagian masyarakat.

Kelompok "BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT" mencakup 378 orang (8,03%), sementara kelompok "TAMAT SD / SEDERAJAT" memiliki jumlah yang lebih besar, yaitu 1.205 orang (25,59%). Ini menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah individu yang telah menyelesaikan pendidikan dasar, masih ada banyak yang belum mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Kelompok "SLTP/SEDERAJAT" terdiri dari 838 orang (17,80%), dan kelompok "SLTA / SEDERAJAT" merupakan kelompok terbesar dengan 1.604 orang (34,07%). Dominasi kelompok SLTA menunjukkan bahwa pendidikan menengah cukup umum di kalurahan ini, yang dapat menjadi modal untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat.

Namun, jumlah individu yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti "DIPLOMA I / II" (20 orang, 0,42%) dan "AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA" (68 orang, 1,44%), masih sangat rendah. Hanya 172 orang (3,65%) yang mencapai "DIPLOMA IV/ STRATA I", dan hanya 6 orang (0,13%) yang memiliki pendidikan "STRATA II".

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pendidikan di Kalurahan Pagerharjo, di mana meskipun ada proporsi yang signifikan dari masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan menengah, masih banyak yang belum melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan kebijakan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pekerjaan

**Tabel 3. 5 Daftar Pekerjaan Masyarakat Kalurahan
Pagerhajo**

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	N	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	621	13,19%	326	6,92%	295	6,27%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	318	6,75%	0	0,00%	318	6,75%
3	PELAJAR/ MAHASISWA	738	15,68%	406	8,62%	332	7,05%
4	PENSIUNAN	52	1,10%	32	0,68%	20	0,42%
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	42	0,89%	26	0,55%	16	0,34%
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	6	0,13%	5	0,11%	1	0,02%
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	8	0,17%	8	0,17%	0	0,00%
8	PERDAGANGAN	14	0,30%	7	0,15%	7	0,15%
9	PETANI/PEKEBUN	1720	36,53%	837	17,78%	883	18,76%
10	PETERNAK	2	0,04%	1	0,02%	1	0,02%
11	KONSTRUKSI	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
12	KARYAWAN SWASTA	734	15,59%	449	9,54%	285	6,05%
13	KARYAWAN HONORER	3	0,06%	3	0,06%	0	0,00%
14	BURUH HARIAN LEPAS	53	1,13%	50	1,06%	3	0,06%
15	PEMBANTU RUMAH TANGGA	3	0,06%	0	0,00%	3	0,06%
16	MEKANIK	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
17	DOSEN	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
18	GURU	72	1,53%	32	0,68%	40	0,85%
19	PERAWAT	6	0,13%	1	0,02%	5	0,11%
20	SOPIR	2	0,04%	2	0,04%	0	0,00%

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	N	%
21	PEDAGANG	7	0,15%	3	0,06%	4	0,08%
22	PERANGKAT DESA	30	0,64%	25	0,53%	5	0,11%
23	KEPALA DESA	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
24	WIRASWASTA	268	5,69%	176	3,74%	92	1,95%
	JUMLAH	4703	99,89%	2393	50,83%	2310	49,07%
	BELUM MENGISI	5	0,11%	3	0,06%	2	0,04%
	TOTAL	4708	100,00%	2396	50,89%	2312	49,11%

Sumber: Dokumen Data Kalurahan Pagerharjo 2024

Tabel 3.5 menyajikan data mengenai jenis pekerjaan masyarakat di Kalurahan Pagerharjo, dengan total populasi sebanyak 4.708 orang. Dari data tersebut, terlihat bahwa 621 orang (13,19%) belum atau tidak bekerja, yang menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan lapangan kerja di wilayah ini.

Sebanyak 318 orang (6,75%) terlibat dalam mengurus rumah tangga, yang merupakan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh perempuan. Kelompok pelajar dan mahasiswa mencakup 738 orang (15,68%), menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi prioritas bagi sebagian besar masyarakat.

Pekerjaan formal seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan tentara nasional Indonesia (TNI) memiliki jumlah yang sangat kecil, masing-masing 42 orang (0,89%) dan 6 orang (0,13%). Hal ini menunjukkan bahwa peluang kerja di sektor publik mungkin terbatas. Sementara itu, sektor perdagangan hanya melibatkan 14 orang (0,30%), yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di kalurahan ini lebih didominasi oleh sektor pertanian.

Kelompok petani atau pekebun merupakan yang terbesar, dengan 1.720 orang (36,53%), menandakan bahwa pertanian

adalah sumber utama mata pencaharian masyarakat di Kalurahan Pagerharjo. Selain itu, 734 orang (15,59%) bekerja sebagai karyawan swasta, yang menunjukkan adanya sektor swasta yang cukup signifikan di wilayah ini.

Pekerjaan lain seperti wiraswasta, guru, dan perawat juga tercatat, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan struktur pekerjaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan menunjukkan perlunya pengembangan sektor lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perencanaan kebijakan yang berfokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan keterampilan kerja sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kalurahan Pagerharjo.

5. Status Perkawinan

Tabel 3. 6 Daftar Status Perkawinan Masyarakat Kalurahan Pagerhajo

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM KAWIN	1716	36,45%	996	21,16%	720	15,29%
2	KAWIN	2427	51,55%	1201	25,51%	1226	26,04%
3	CERAI HIDUP	68	1,44%	32	0,68%	36	0,76%
4	CERAI MATI	380	8,07%	104	2,21%	276	5,86%
	JUMLAH	4591	97,51%	2333	49,55%	2258	47,96%
	BELUM MENGISI	117	2,49%	63	1,34%	54	1,15%
	TOTAL	4708	100,00%	2396	50,89%	2312	49,11%

Sumber: Dokumen Data Kalurahan Pagerharjo 2024

Tabel 3.6 menyajikan data mengenai status perkawinan masyarakat di Kalurahan Pagerharjo, dengan total populasi sebanyak 4.708 orang. Dari data tersebut, terlihat bahwa 1.716 orang (36,45%) berstatus belum kawin, yang menunjukkan proporsi signifikan dari populasi yang masih lajang. Di antara mereka yang belum kawin, terdapat 996 laki-laki (21,16%) dan 720 perempuan (15,29%), menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki yang belum menikah dibandingkan perempuan.

Kelompok yang sudah kawin mencakup 2.427 orang (51,55%), dengan 1.201 laki-laki (25,51%) dan 1.226 perempuan (26,04%). Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kalurahan Pagerharjo telah menikah, yang dapat berimplikasi pada struktur keluarga dan dinamika sosial di wilayah tersebut.

Selain itu, terdapat 68 orang (1,44%) yang berstatus cerai hidup, dengan 32 laki-laki (0,68%) dan 36 perempuan (0,76%). Sementara itu, status cerai mati tercatat sebanyak 380 orang (8,07%), di mana 104 laki-laki (2,21%) dan 276 perempuan (5,86%) terdaftar. Angka cerai hidup dan cerai mati ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan hubungan perkawinan di kalurahan ini.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang status perkawinan masyarakat Kalurahan Pagerharjo, yang dapat menjadi dasar untuk perencanaan program sosial dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan individu. Dengan mayoritas penduduk yang sudah menikah, penting untuk memperhatikan layanan dan dukungan bagi keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

6. Agama

Tabel 3. 7 Daftar Agama Masyarakat Kalurahan Pagerhajo

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	ISLAM	4116	87,43%	2113	44,88%	2003	42,54%
2	KRISTEN	118	2,51%	57	1,21%	61	1,30%
3	KATHOLIK	474	10,07%	226	4,80%	248	5,27%
	JUMLAH	4708	100,00%	2396	50,89%	2312	49,11%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	4708	100,00%	2396	50,89%	2312	49,11%

Sumber: Dokumen Data Kalurahan Pagerharjo 2024

Tabel 3.7 menyajikan data mengenai agama masyarakat di Kalurahan Pagerharjo, dengan total populasi sebanyak 4.708 orang. Dari data tersebut, mayoritas penduduk, yaitu 4.116 orang (87,43%), menganut agama Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama dominan di kalurahan ini, dengan 2.113 laki-laki (44,88%) dan 2.003 perempuan (42,54%) yang beragama Islam.

Sementara itu, terdapat 118 orang (2,51%) yang menganut agama Kristen, dengan 57 laki-laki (1,21%) dan 61 perempuan (1,30%). Angka ini menunjukkan bahwa penganut agama Kristen merupakan kelompok minoritas di Kalurahan Pagerharjo.

Selain itu, terdapat 474 orang (10,07%) yang menganut agama Katolik, dengan 226 laki-laki (4,80%) dan 248 perempuan (5,27%). Meskipun jumlah penganut Katolik lebih tinggi dibandingkan dengan Kristen, mereka tetap merupakan kelompok minoritas di kalurahan ini.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang keragaman agama di Kalurahan Pagerharjo, di mana Islam mendominasi. Informasi ini penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya di wilayah tersebut, serta dapat menjadi dasar bagi perencanaan program-program yang mendukung toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

7. Jenis Kelamin

**Tabel 3. 8 Daftar Sebaran Jenis Kelamin Masyarakat
Kalurahan Pagerhajo**

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	LAKI-LAKI	2396	50,89%	2396	50,89%	0	0,00%
2	PEREMPUAN	2312	49,11%	0	0,00%	2312	49,11%
	JUMLAH	4708	100,00%	2396	50,89%	2312	49,11%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	4708	100,00%	2396	50,89%	2312	49,11%

Sumber: Dokumen Data Kalurahan Pagerharjo 2024

Tabel 3.8 menyajikan data mengenai sebaran jenis kelamin masyarakat di Kalurahan Pagerharjo, dengan total populasi sebanyak 4.708 orang. Dari data tersebut, terdapat 2.396 laki-laki yang mencakup 50,89% dari total populasi, sementara jumlah perempuan mencapai 2.312 orang, atau 49,11% dari total.

Distribusi jenis kelamin ini menunjukkan bahwa proporsi laki-laki dan perempuan di Kalurahan Pagerharjo cukup seimbang, meskipun terdapat sedikit kelebihan jumlah laki-laki. Keseimbangan ini dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan mendukung kebijakan yang inklusif dalam berbagai program sosial

dan ekonomi di kalurahan tersebut. Data ini juga penting untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk memastikan bahwa kebutuhan kedua kelompok gender dapat terpenuhi secara adil.

D. Data Penerima Bantuan Sosial

1. Data penerima Bantuan Sosial PKH

Tabel 3. 9 Data penerima bantuan sosial PKH per Padukuhan

No	Padukuhan	Jumlah (orang)
1	BETENG	12
2	GEGERBAJING	10
3	JETIS	14
4	KALINONGKO	16
5	KEMESU	13
6	MENDOLO	19
7	NGAGLIK	16
8	NGENTAK	31
9	NGLINGGO BARAT	25
10	NGLINGGO TIMUR	24
11	SARIGONO	18
12	SEPARANG	21
13	SINOGO	11
14	SUREN	16
Total		246

Sumber: Dokumen Data Kalurahan Pagerharjo 2024

Berdasarkan data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo, total penerima mencapai 246 orang, dengan variasi jumlah penerima di setiap padukuhan. Padukuhan **NGENTAK** mencatat jumlah penerima

tertinggi, yaitu 31 orang, yang menunjukkan kemungkinan adanya tingkat kemiskinan yang lebih tinggi atau lebih banyak keluarga yang memenuhi syarat untuk bantuan. Di sisi lain, padukuhan **BETENG** memiliki jumlah penerima terendah, yaitu 12 orang, yang dapat mengindikasikan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Rata-rata jumlah penerima per padukuhan adalah sekitar 17 orang, menunjukkan bahwa sebagian besar padukuhan memiliki jumlah penerima di bawah rata-rata, dengan beberapa padukuhan seperti NGENTAK dan MENDOLO jauh di atas rata-rata.

Ketimpangan dalam distribusi penerima bantuan ini mencerminkan perbedaan kondisi sosial ekonomi, akses informasi mengenai program PKH, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di masing-masing padukuhan. Oleh karena itu, di padukuhan dengan jumlah penerima yang tinggi, seperti NGENTAK dan MENDOLO, perlu ada program pendampingan untuk memberdayakan penerima bantuan agar dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

2. Data Bantuan Berjalan

Tabel 3. 10 Data bantuan yang berjalan

No	Bansos
1	BPNT
2	PKH
3	BPNT-PPKM
4	PBI JKN

Sumber: Dokumen Data Kalurahan Pagerharjo 2024

Di Kalurahan Pagerharjo, terdapat beberapa jenis bantuan sosial (bansos) yang sedang berjalan, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT-PPKM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). BPNT bertujuan untuk memastikan akses keluarga miskin terhadap kebutuhan pangan yang bergizi melalui bantuan non-tunai. Sementara itu, PKH memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti anak-anak yang bersekolah dan ibu hamil, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi dalam pendidikan dan kesehatan. BPNT-PPKM merupakan program tambahan yang dirancang untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi COVID-19, memberikan dukungan ekonomi di tengah situasi yang sulit.

Terakhir, PBI JKN memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya. Keberadaan berbagai program bantuan sosial ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memastikan efektivitas program-program tersebut, diperlukan sosialisasi yang baik dan mekanisme distribusi yang tepat sasaran agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan. Analisis adalah proses berpikir yang bertujuan untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat memahami karakteristik masing-masing, hubungan antarbagian, serta fungsi setiap komponen dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam penelitian ini, analisis memiliki peran yang sangat penting karena merupakan metode untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat dimengerti dan bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penjelasan analisis data ini yakni mengenai Refleksi Bantuan Sosial PKH Dalam Pengentasan Kemiskinan (Study Kasus Di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo).

A. HASIL TEMUAN DATA LAPANGAN

1. Informan Penelitian

Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, dengan penentuan informan sebagai subjek penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Melalui teknik ini, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang informasi dan permasalahan yang diteliti serta dapat dipercaya sebagai sumber data.

Informasi dari para informan yang telah diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	P/L	Usia	Posisi Informan	Pengabdian/ pemanfaatan
1	Drs. Lucius Bowo Pristiyanto	L		Kepala Dinas Sosial PPPA Kab. Kulon Progo	1 Tahun
2	Andar Kusnanto	L	41	Dukuh	8 Tahun
3	Priyo Saptono	L	42	Dukuh Plono Timur	8 Tahun
4	Saptono	L	52	Kamituwa	18 Tahun
5	Joko Wilantoro	L	66	Ketua BPKAL	4 Tahun
6	Ananias Yuniarto	L	55	Anggota BPKAL	4 Tahun
7	K. Dewi Astuti	P	33	Pendamping PKH	3 Tahun
8	Tumingin	L	62	Penerima Bantuan PKH	5 Tahun
9	Maryanto	L	45	Penerima Bantuan PKH	5 Tahun
10	Agustinus Sulisty	L	41	Tokoh Masyarakat	-

Sumber: Data Primer diolah 2024

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa penentuan informan ini mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam proses Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo. Pemerintah Kalurahan Pagerharjo sebagai pihak yang melaksanakan program ini yang merupakan program dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk membantu secara langsung Keluarga yang masih berada dalam garis

kemiskinan dan di sebut dengan Keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2. Refleksi Bantuan Sosial PKH Dalam Pengentasan Kemiskinan

a. Kondisi eksiting kesejahteraan sosial di Kalurahan

Pagerharjo tahun 2024

Kondisi kesejahteraan sosial di Kalurahan Pagerharjo dapat dilihat melalui beberapa aspek salah diantaranya adalah:

1) Aspek Ekonomi

Kalurahan Pagerharjo memiliki ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, baik nabati maupun hewani. Masyarakat setempat mengembangkan berbagai jenis tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran, yang menjadi sumber utama penghidupan keluarga. Selain itu, peternakan juga menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi Kalurahan Pagerharjo, dengan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam yang dipelihara oleh sebagian rumah tangga.

Selain pertanian dan peternakan, sektor perdagangan juga turut menyumbang terhadap perekonomian daerah Kalurahan Pagerharjo. Aktivitas perdagangan terjadi di pasar-pasar lokal, yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari serta produk pertanian lokal. Hal ini menciptakan kesempatan bagi para petani dan peternak untuk memasarkan hasil produksi mereka langsung ke konsumen.

Pemerintah Kalurahan mendukung berbagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui perogram-program pemberdayaan, seperti bantuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perternakan, serta sesekali mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal. Selain itu terdapat juga kawasan pariwisata argowisata berbentuk perkebunan teh, serta memiliki potensi mengembangkan kawasan pariwisata yang mencakup wisata budaya, alam, bahkan buatan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan akses pasar dan perubahan iklim masih mempengaruhi stabilitas ekonomi di kalurahan pagerharjo.

a) Gambaran Umum Kondisi Ekonomi Masyarakat

Masyarakat kalurahan pagerharjo ecara umum memiliki tingkat ekonomi yang relatif setara, meskipun terdapat perbedaan antara kelompok masyarakat yang tergolong kaya dan miskin. Menurut **Andar Kusnanto (Dukuh)**, sebagian besar masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dan hanya sedikit yang tergolong sangat miskin.

“Kondisi ekonomi masyarakat Pagerharjo setara walaupun ada yang kaya tetapi Sebagian kecil, yang miskin sekali juga sedikit sekali.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Pernyataan ini dikuatkan oleh **Priyo Saptono (Dukuh)**, yang menekankan bahwa kebutuhan primer masyarakat seperti pangan telah tercukupi, terutama bagi mereka yang aktif bekerja, misalnya di sektor pertanian atau budidaya.

“Kondisi ekonomi Masyarakat pagerharjo sebenarnya untuk kebutuhan primer sudah tercukupi jika mau kerja misalnya dengan bercocok tanam atau budidaya apapun kaitanya dengan ketahanan pangan, tetapi untuk warga yang jompo, sakit jiwa, disabilitas saya kira memang perlu bantuan, disabilitas saja ada yang bisa kerja.” (Wawancara, Priyo S, 17/10/2024)

Namun, **Supanto (Kamituwa)** menggarisbawahi bahwa Pagerharjo masih masuk dalam kategori wilayah miskin di Kapanewon Samigaluh, dengan banyak warga berpenghasilan rendah.

“Pagerharjo masuk dalam kategori miskin di kapanewon samigaluh dan banyak warga yang berpenghasilan rendah.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Joko Wulantoro (Ketua BPKal) menambahkan bahwa meskipun terdapat peningkatan ekonomi, ketimpangan masih terlihat, khususnya antara petani dengan pegawai negeri (ASN) atau kelompok pekerja formal lainnya.

“Kondisi lebih baik banyak peningkatan ekonomi, yg membedakan ekonomi agak jauh antara petani dan pegawai/ASN.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

b) Sumber Pendapatan Utama

Mayoritas penduduk Pagerharjo bergantung pada sektor agraris, seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan, sebagai sumber utama penghasilan mereka. Hal ini secara konsisten disebutkan oleh keempat narasumber. Sebagian kecil penduduk bekerja di sektor jasa, perdagangan, atau sebagai buruh tani.

Andar Kusnanto menyebut bahwa pendapatan masyarakat terutama berasal dari pertanian dan buruh tani.

“Sumber pendapatan sebagian besar dari pertanian, buruh tani dan sebagian kecil jasa.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

sementara **Priyo Saptono** menambahkan bahwa peternakan dan perkebunan juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

“Sumber pendapatan dari dulu bersumber dari pertanian, peternakan dan perkebunan.” (Wawancara, Priyo S, 17/10/2024)

Bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, pekerjaan buruh tani atau serabutan menjadi alternatif, sebagaimana dijelaskan oleh **Joko Wulantoro**.

“Mayoritas petani tetapi ada juga buruh tani dan pedagang.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

Selain itu, kelompok masyarakat tertentu, seperti ASN atau pegawai formal, memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata.

c) Perbedaan dan Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi di Pagerharjo tidak terlalu mencolok, meskipun ada perbedaan antara kelompok masyarakat dengan pekerjaan tertentu. **Andar Kusnanto** dan **Supanto** menekankan bahwa perbedaan penghasilan cenderung terlihat pada mereka yang berstatus pegawai negeri atau ASN dibandingkan petani dan buruh tani.

“Perbedaan pendapatan hampir sama tidak begitu jauh kecuali yang ASN/pegawai atau dengan yang

*karena sakit kronis dan tidak bisa beraktifitas.”
(Wawancara, Andar K, 19/10/2024)*

*“Menurut saya tidak ada perbedaan yang mencolok
ya rata rata, kalo ada itu karena pegawai atau ASN.”
(Wawancara, Supanto 13/10/2024)*

Joko Wulantoro menambahkan bahwa keterbatasan lahan pertanian menjadi salah satu faktor pembatas bagi petani dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka.

*“Setara , Bagi warga petani yang terbatas
kepemilikan lahan untuk pertanian memang hanya
buruh tani/srabutan yang bisa dilakukan, bagi warga
yang kepemilikan tanahnya luas ekonominya cukup
karena dari hasil pertanian/perkebunan.”
(Wawancara, Joko W, 15/11/2024)*

Sementara itu, **Priyo Saptono** menyoroti bahwa kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, **atau** warga dengan sakit kronis memerlukan perhatian khusus karena keterbatasan mereka dalam beraktivitas ekonomi.

*“Perbedaan pendapatan setara tetapi mengingat
memang harus diimbangi dengan pengetahuan
walapun ada yang kecukupan dan yang kekurangan
tapi sebegini kecil saja.” (Wawancara, Priyo S,
17/10/2024)*

d) Ketahanan Pangan

Secara umum, masyarakat Pagerharjo memiliki ketahanan pangan yang cukup baik karena sumber penghidupan mereka masih terkait erat dengan sektor agraris. Namun, kelompok rentan seperti jompo, penyandang disabilitas, dan warga dengan penyakit kronis sangat membutuhkan bantuan

sosial. Priyo Saptono menegaskan bahwa meskipun sebagian penyandang disabilitas mampu bekerja, tetap diperlukan intervensi khusus untuk memastikan kelompok ini tidak tertinggal secara ekonomi.

Dari 4 data wawancara sesuai indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Pagerharjo secara umum memiliki tingkat ekonomi yang cukup setara, meskipun terdapat perbedaan signifikan antara kelompok petani kecil dengan pegawai formal atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagian besar penduduk Kalurahan Pagerharjo bergantung pada sektor agraris sebagai sumber utama penghasilan mereka. Namun, sektor agraris ini sering kali menghadapi tantangan, seperti fluktuasi harga hasil tani, terbatasnya akses ke teknologi modern dalam hal pemasaran, serta kurangnya diversifikasi pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Smith, J., Brown, L., & Jones, (2022) menjelaskan hal yang sama bahwa perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi stabilitas ekonomi global, memperburuk tantangan seperti terbatasnya akses ke pasar. Hal ini menyebabkan kelompok petani kecil rentan terhadap tekanan ekonomi, terutama dalam kondisi tertentu seperti gagal panen atau cuaca ekstrim. Pristiwa cuaca ekstrem mengganggu sektor-sektor seperti pertanian dan pariwisata, yang membutuhkan kebijakan ekonomi yang kuat untuk mitigasi dan adaptasi terhadap risiko-risiko terkait iklim ini (Borah et al., 2024)

Untuk mendukung kelompok rentan, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memegang peranan penting. Program ini ditujukan untuk membantu lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit kronis agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keberadaan PKH memberikan kontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di kalurahan ini. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mendorong inklusi sosial dan akses yang lebih merata terhadap layanan publik bagi seluruh masyarakat Pagerharjo.

2) Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang mencakup layanan kesehatan dan pendidikan yang terdapat di daerah Kalurahan Pagerharjo sudah cukup baik.

a) Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang tersedia di kalurahan Pagerharjo adalah Puskesmas Samigaluh II, yang sebenarnya puskesmas ini mengampu dari 3 kalurahan yaitu Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan Kebonharjo, dan Kalurahan Banjarsari. Selain itu terdapat beberapa Puskesmas pembantu, Poskesdes, dan Puskesmas Keliling yang ada di wilayah kerja Puskesmas Samigaluh II, diantaranya yaitu, Puskesmas Pembantu Plono, Puskesmas Pembantu Bendo dan Puskesmas Pembantu Banjarsari, Poskesdes Kebonharjo, Puskesmas Keliling Kaliwunglon, Puskesmas Keliling Sinogo, Puskesmas Keliling

Pelem. Dengan adanya layanan kesehatan ini, diharapkan masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dan praktis.

Secara umum, layanan kesehatan di Pagerharjo dianggap memadai dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. **Andar Kusnanto** menyoroti ketersediaan Puskesmas Samigaluh 2 dan keberadaan ambulans desa sebagai faktor pendukung penting.

“Layanan dasar kesehatan cukup baik karena dekat dengan puskesmas samigaluh 2, dan juga ada ambulans desa.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Hal ini sejalan dengan pernyataan **Priyo Saptono (Dukuh)**, yang menyebut bahwa program BPJS telah mencakup sebagian besar warga, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak memeriksakan kesehatan mereka.

“Untuk layanan kesehatan cukup bagus karena dengan layanan terdekat yaitu puskesmas smaigaluh 2, dan juga dengana danya BPJS semua dapat terkafer dan tak ada alasan untuk tidak periksa kesehatan.” (Wawancara, Priyo S, 17/10/2024)

Supanto (Kamituwa) juga menambahkan bahwa selain puskesmas utama, terdapat puskesmas pembantu yang memberikan akses kesehatan lebih dekat bagi masyarakat.

“Untuk layanan keshatan tidak masalah karena ada puskesmas dan puskesmas pemabntu dan ambulans desa.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Joko Wulantoro (Ketua BPKal) mencatat bahwa penyuluhan kesehatan secara rutin juga berkontribusi terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

*“Sudah bagus dengan tersedianya fasilitas layanan puskesmas serta penyuluhan pada masyarakat.”
(Wawancara, Joko W, 15/11/2024)*

Namun, **Ananias Yuniarto (Anggota BPKal)** menyoroti adanya pekerja berisiko yang belum memiliki jaminan keselamatan kerja, yang dapat menjadi perhatian khusus untuk program sosial.

*“Sudah cukup dengan tersedianya fasilitas layanan puskesmas walaupun ada beberapa pekerja berisiko tetapi belum punya jaminan keselamatan.”
(Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)*

b) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Pagerharjo sangat memadai, dengan ketersediaan berbagai jenjang pendidikan dari PAUD, SD, SMP, hingga SMK. Menurut **Andar Kusnanto**, satu kalurahan memiliki 6 PAUD, 5 SD/ sederajat, 1 SMP, dan 1 SMK, sehingga akses pendidikan tidak menjadi kendala. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga cukup tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh **Priyo Saptono**, yang menyebut bahwa warga berupaya semaksimal mungkin agar anak-anak mereka tetap dapat bersekolah.

“Fasilitas pendidikan juga sangat cukup tidak kesulitan karena satu kalurahan ada 6 paud 5 SD/ sederajat, 1 SMP dan 1 SMK.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

“Fasilitas pendidikan cukup memadai tidak kesulitan karena tersedianya fasilitas mulai dari dasar sampai SMA ada di pagerharjo, bahkan kesadaran untuk sekolah cukup tinggi dan berupaya bagaimana

caranya untuk bisa bersekolah.” (Wawancara, Priyo S, 17/10/2024)

Joko Wulantoro mencatat perubahan dalam preferensi masyarakat, yang kini cenderung menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan swasta, berbeda dengan tren sebelumnya.

“Bagus lengkap mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK, namun masyarakat cenderung menyekolahkan di swasta beda dengan tempo dulu, dan harus pergi jauh juga.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

Sementara itu, **Ananias Yuniarto** menggarisbawahi bahwa tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat, dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan belajar siswa di berbagai jenjang.

“Tingkat Pendidikan masy cukup bagus termasuk fasilitas Pendidikan tersedia mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK.” (Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)

c) Infrastruktur

Kondisi infrastruktur di Pagerharjo secara umum dinilai baik. **Andar Kusnanto** menyebut bahwa jalan utama hingga jalan lingkungan dalam kondisi baik, meskipun ada beberapa jalan kabupaten yang rusak, sebagaimana juga diungkapkan oleh **Supanto**.

“Infrastruktur cukup baik jalan utama sampai jalan lingkungan cukup terkonidisi, air bersih cukup ada pades, pamsimas dan sumber-sumber mata air yang lain, listrik hampir semua terjangkau listrik kecuali yang kelurga baru ada beberapa yang belum terpasang.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Air bersih tersedia melalui beberapa sumber, seperti PAMDes, PAMSIMAS, dan mata air alami. Namun, selama musim kemarau, masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami kekurangan air.

“Infrastruktur cukup baik ada beberapa ruas jalan kabupaten rusak air juga tidak masalah kecuali jika kemarau ada yang kekurangan, listrik ada beberapa yang masih belum punya.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Dari segi listrik, hampir semua wilayah telah terjangkau, kecuali beberapa keluarga baru yang belum memiliki instalasi listrik, sebagaimana disampaikan oleh **Andar Kusnanto** dan **Priyo Saptono**. **Joko Wulantoro** menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang didukung oleh dana desa telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

“Dengan adanya dana desa jalan, air bersih, listrik sudah banyak terbangun serta bisa dinikmati masyarakat.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

Namun, **Ananias Yuniarto** menekankan pentingnya penertiban dalam pengelolaan air bersih untuk memastikan keberlanjutannya.

“Pembangunan Infrastruktur jalan sudah bagus, air bersih sudah tersedia tinggal pengelolaannya yang perlu ditertibkan, listrik semua teraliri listrik.” (Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)

Sehingga dapat disimpulkan dari ketiga indikator, Kalurahan Pagerharjo memiliki layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang cukup baik untuk mendukung

kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, ambulans desa, dan BPJS membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan secara merata. Di bidang pendidikan, fasilitas yang memadai dan kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan menjadi kekuatan utama bagi Pagerharjo. Meskipun masih terdapat tantangan terkait kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Haemmerli et al., (2021), dari hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun akses terhadap fasilitas umum memadai, kesadaran masyarakat diperlukan agar suatu program dapat berjalan secara efektif.

Sementara itu, infrastruktur jalan, air bersih, dan listrik sudah relatif baik, meskipun masih ada beberapa tantangan seperti jalan kabupaten yang rusak, kekurangan air saat musim kemarau, dan beberapa keluarga baru yang belum memiliki listrik. Program bantuan sosial seperti PKH dapat dioptimalkan untuk membantu kelompok rentan dan pekerja berisiko, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses layanan dasar yang lebih baik.

3) Kondisi Perumahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, berikut adalah temuan lapangan terkait kondisi perumahan di Pagerharjo:

a) Gambaran Umum Kondisi Perumahan

Mayoritas perumahan di Kalurahan Pagerharjo berada dalam kondisi yang layak dan memadai. **Andar Kusnanto** menyampaikan bahwa sebagian besar rumah masyarakat dibangun secara swadaya atau melalui program subsidi dari pemerintah maupun pihak swasta.

“Kondisi perumahan mayoritas cukup bagus dan layak karena swadaya sendiri maupun subsidi dari pemerintah/pihak swasta. Tetapi ada sebagian kecil yang perlu perbaikan.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Hal ini didukung oleh **Priyo Saptono**, yang menyatakan bahwa hampir semua rumah dalam kondisi bagus, meskipun ada sebagian kecil yang memerlukan perbaikan.

“Hampir semua kondisinya bagus-bagus, tetapi ada sebagian kecil perlu perbaikan.” (Wawancara, Priyo S, 17/10/2024)

Supanto menambahkan bahwa bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas perumahan di Pagerharjo.

“Kondisi perumahan rata-rata sudah bagus banyak subsidi RTLH.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Sementara itu, **Joko Wulantoro** menyoroti bahwa kasus rumah tidak layak huni umumnya disebabkan oleh faktor tertentu, seperti rumah yang berdiri di tanah bukan milik sendiri atau penghuni yang merupakan lansia sebatang kara.

“Banyak bantuan bedah rumah yang diberikan dan kecil sekali perumahan yang masih tidak layak, hal itu terjadi karena hanya numpang dan bukan tanah miliknya sehingga tidak bisa terbangun lebih layak.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

Ananias Yuniarto (Anggota BPKal) mencatat bahwa sebagian kecil warga cenderung menunggu bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka, sehingga kondisi rumah dibiarkan dalam keadaan kurang layak.

“Ada tetapi Sebagian kecil saja, dan karena pemahamannya yang selalu menunggu bantuan sehingga rumah dibiarkan rusak biar diberikan bantuan.” (Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)

b) Rumah tidak layak huni

Meskipun kondisi perumahan secara umum cukup baik, tetap ada beberapa rumah yang tidak layak huni. Menurut **Andar Kusnanto**, sebagian kecil rumah belum layak karena keterbatasan kemampuan swadaya atau kurangnya kesadaran untuk memperbaiki kondisi rumah.

“Ada sebagian kecil rumah dalam kondisi tidak layak huni karena memang belum ada niat maupun karena kemampuan swadaya yang kurang.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Pernyataan ini dikuatkan oleh **Priyo Saptono**, yang menyebut bahwa rumah yang tidak layak biasanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran penghuni dalam merawat dan memperbaiki rumah.

“Ada satu atau dua rumah saja yang belum layak huni karena kesadaranya kurang dalam

pengkondisian rumahnya.”(Wawancara, Priyo S, 17/10/2024)

Joko Wulantoro juga menjelaskan bahwa ada beberapa kasus di mana rumah tidak dapat dibangun lebih layak karena status tanahnya bukan milik pribadi. Selain itu, sebagian kecil warga lansia atau masyarakat dalam kondisi tertentu, seperti jompo yang hidup sebatang kara, menjadi kelompok yang rentan dalam hal perbaikan rumah.

“Sangat sedikit itu juga memang belum niat, dan karena sebab tertentu, missal jompo sebatangkara, dll”(Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

c) Kondisi sanitasi

Kondisi sanitasi lingkungan di Pagerharjo dinilai cukup baik. **Andar Kusnanto** dan **Priyo Saptono** sama-sama menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat telah memiliki jamban atau toilet sendiri, sehingga perilaku Buang Air Besar (BAB) sembarangan hampir tidak ditemukan.

“Sanitasi terhadap lingkungan cukup terkondisi sudah jarang hampir tidak ada yang BAB sembarangan rata-rata sudah punya jamban/toilet sendiri.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan **lingkungan** telah meningkat secara signifikan. **Joko Wulantoro** juga menegaskan bahwa sanitasi lingkungan di Pagerharjo sudah mayoritas sehat, mendukung kondisi perumahan yang layak dan aman untuk dihuni.

Sehingga dapat disimpulkan kondisi perumahan di Kalurahan Pagerharjo secara umum tergolong baik, dengan mayoritas rumah sudah layak huni. Program subsidi seperti bantuan RTLH telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas perumahan masyarakat. Namun, masih terdapat sebagian kecil rumah yang tidak layak, terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan swadaya, rendahnya kesadaran penghuni, atau status tanah yang bukan milik pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Ismowati & Subhan, (2018) menunjukkan bahwa program bantuan RTLH belum berhasil sepenuhnya, dengan masalah seperti distribusi bantuan yang tidak merata dan anggaran yang terbatas.

Kondisi sanitasi lingkungan juga menunjukkan perbaikan signifikan, dengan mayoritas masyarakat telah memiliki akses toilet pribadi dan perilaku BAB sembarangan yang hampir tidak ditemukan. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa lingkungan di Pagerharjo sudah cukup mendukung pola hidup sehat dan layak.

4) Pekerjaan dan Lapangan Kerja

Berikut adalah hasil temuan lapangan berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber:

a) Ketersediaan Lapangan Kerja

Secara umum, lapangan kerja di Kalurahan Pagerharjo tersedia di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, jasa, pariwisata, dan UMKM. **Andar Kusnanto** menyoroti bahwa banyak jenis pekerjaan tersedia, seperti buruh tani,

tukang bangunan, pengangkut kayu, dan buruh perkebunan, terutama saat panen cengkih. Hal ini menunjukkan bahwa Pagerharjo memiliki potensi pekerjaan yang cukup beragam.

“Banyak lapangan kerja dari buruh tani, tukang bangunan, angkut kayu, buruh perkebunan saat panen cengkih, karena masih banyak mendatangkan tenaga dari luar kalurahan.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Priyo Saptono menambahkan bahwa pemerintah juga mendukung dengan program padat karya, di samping potensi pariwisata dan pertanian. **Joko Wulantoro (Ketua BPKal)** dan **Ananias Yuniarto (Anggota BPKal)** juga menekankan adanya sektor pariwisata dan UMKM sebagai peluang yang terus berkembang, meskipun masyarakat memerlukan pelatihan dan pendampingan untuk memanfaatkannya secara maksimal.

“Lapangan kerja juga cukup tersedia, seperti kepariwisataan, umkm, tetapi memang tidak semuanya menangkap peluang tersebut, butuh motivasi terus serta pendampingan, pelatihan.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

“Lapangan kerja juga cukup tersedia, diberbagai sector mulai dari buruh tani, wisata, jasa dll.” (Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)

b) Tingkat Pengangguran

Mayoritas narasumber sepakat bahwa tingkat pengangguran di Pagerharjo tergolong rendah. **Andar Kusnanto** menyebut bahwa pengangguran lebih sering disebabkan oleh faktor personal, seperti malas bekerja, gengsi

terhadap pekerjaan kasar, atau ketergantungan pada orang tua. Pernyataan ini juga diamini oleh **Priyo Saptono**, yang menekankan bahwa pekerjaan tersedia, tetapi faktor gengsi menjadi salah satu kendala utama.

“Sebenarnya tingkat pengangguran boleh dibilang tidak ada/kecil, yang nganggur itu biasanya karena malas kerja, gengsi dengan pekerjaan kasar, dan karena masih mengandalkan orang tuanya.”
(Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

“Sebenarnya pengangguran tidak ada/ kecil, karena malas kerja, gengsi dengan pekerjaan didesa saja.”
(Wawancara, Priyo S, 17/10/2024)

Menurut **Supanto (Kamituwa)**, meskipun ada pengangguran, mereka biasanya tetap memiliki lahan untuk dikelola, seperti bertani atau berkebun. **Joko Wulantoro** menegaskan bahwa tidak ada pengangguran sepenuhnya, karena masyarakat biasanya bekerja secara serabutan atau situasional.

“Tingkat pengangguran ada tetapi kecil, tidak 100% nganggur karena punya lahan kerja seperti pertanian dan perkebunan.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

“Bisa dibilang tidak ada pengangguran walaupun kerjanya ya serabutan dan situasional kadang kerja kadang libur” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

c) Inovasi dan Pengembangan Lapangan Kerja

Inovasi dalam menciptakan lapangan kerja terus berkembang di Pagerharjo. **Andar Kusnanto** menyampaikan bahwa masyarakat mulai mengembangkan sektor pariwisata dan

perkebunan kopi dari hulu hingga hilir, serta membangun UMKM dan jasa lainnya. Hal ini menunjukkan adanya usaha kreatif dalam menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

“Banyak inovasi yang diciptakan diantaranya sector pariwisata, perkebunan kopi dari hulu sampai hilir; UMKM, jasa dan lain lain.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Selain itu, **Joko Wulantoro** dan **Ananias Yuniarto** mencatat bahwa pemerintah desa sering menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, pendampingan UMKM, dan pengembangan keterampilan untuk mendukung masyarakat dalam memanfaatkan peluang kerja.

“Sering diselenggarakan pelatihan2, serta penciptaan lapangan kerja baik wisata, pertanian secara luas dan jasa.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

“Pelatihan2 pendampingan UKM.” (Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)

Dari ketiga indikator diatas dapat disimpulkan Kondisi pekerjaan dan lapangan kerja di Kalurahan Pagerharjo cukup memadai, dengan sektor-sektor utama seperti pertanian, perkebunan, jasa, pariwisata, dan UMKM. Tingkat pengangguran cenderung rendah, dengan masyarakat yang bekerja secara situasional atau serabutan. Namun, kendala seperti gengsi terhadap pekerjaan kasar dan kurangnya motivasi kerja menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Inovasi dan dukungan pemerintah, seperti program padat karya, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor pariwisata serta UMKM, telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, penting untuk mendorong inovasi, terutama di sektor pariwisata dan UMKM, serta mengubah pandangan masyarakat terhadap pekerjaan di sektor pertanian (Widyastuti & Ambarwati, 2020). Selain itu Program PKH dapat diintegrasikan dengan inisiatif ini untuk memberikan dorongan lebih besar kepada kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga mereka mampu memanfaatkan peluang kerja yang tersedia.

5) Kesejahteraan Sosial

Berikut adalah temuan lapangan berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber:

a) Kondisi Umum Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial masyarakat di Kalurahan Pagerharjo secara umum sudah menunjukan perbaikan. **Joko Wulantoro** menekankan bahwa meskipun kesejahteraan masyarakat meningkat, tantangan utama adalah kebutuhan dan keinginan yang terus berkembang, sering kali melebihi pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan beberapa keluarga menghadapi masalah ekonomi, terutama ketika pendapatan tidak mampu mengimbangi gaya hidup atau kebutuhan tambahan.

“Kesejahteraan bagi masyarakat sudah lebih baik hanya karena kebutuhan dan keinginan yang selalu bertambah dan macam-macam, tetapi tidak diiringi

dengan pendapatan yang cukup sehingga kadang kala menjadi problem.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

Ananias Yuniarto (Anggota BPKal) juga menggarisbawahi bahwa kesejahteraan sulit dicapai secara absolut karena kesejahteraan bersifat dinamis, tergantung pada kebutuhan dan keinginan individu yang terus bertambah. Meski demikian, sebagian besar masyarakat sudah berada dalam kondisi yang lebih baik, dengan hanya sebagian kecil yang masih membutuhkan perhatian khusus.

“Sebenarnya sudah baik tinggal Sebagian kecil yang belum sejahtera, walaupun Namanya kesejahteraan tidak ada batas maksimalnya. Kesejahteraan sulit dicapai karena dengan berkembangnya beban2 hidup yang semakin banyak dan semakin banyak keinginan yang ingin dicapai.” (Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)

b) Peran bantuan Sosial

Bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Joko Wulantoro** mengungkapkan bahwa bantuan-bantuan ini penting, tetapi dominasi bantuan dapat menimbulkan efek negatif, seperti kurangnya motivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha atau menjadi mandiri.

“Bantuan itu penting tetapi jika didominasi oleh bantuan, tidak mendidik masy untuk mengembangkan usaha.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

Hal serupa juga disampaikan oleh **Ananias Yuniarto**, yang menyoroti adanya kecenderungan ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial.

“Cukup banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta justru masy menjadi ketergantungan” (Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)

Dalam beberapa kasus, ditemukan masyarakat yang lebih memilih menunggu bantuan daripada berusaha secara aktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Deswita & Ariany, 2024). Hal ini menjadi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara memberikan bantuan dan mendorong kemandirian masyarakat.

c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi di Pagerharjo cukup tinggi, meskipun tidak merata. **Joko Wulantoro** mencatat bahwa program padat karya berhasil memotivasi sebagian masyarakat untuk terlibat aktif, tetapi ada kelompok kecil yang menjadi pasif akibat terlalu bergantung pada bantuan sosial. Bahkan, terdapat fenomena di mana masyarakat yang jarang berkontribusi dalam kegiatan sosial justru menjadi penerima manfaat bantuan, yang terkadang memicu rasa tidak adil di kalangan masyarakat.

“Partisipasi masy, cukup bagus dengan adanya padat karya, justru ada sedikit dampak kurang baik dengan adanya bantuan yang diberikan pada masyarakat, karena kadang dijumpai warga yang

malas dan jarang berkecimpung dalam kegiatan sosial masyarakat malah dapat bantuan.”
(Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

Ananias Yuniarto juga menyoroti hal serupa, dengan menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki semangat yang baik untuk berpartisipasi, meskipun terdapat individu-individu yang cenderung malas dan kurang berperan aktif.

“Partisipasi masy cukup tinggi, walaupun ada beberapa gelintir orang yang pemalas.”
(Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)

Motivasi tambahan, seperti melalui bantuan atau program yang berbasis insentif, sering kali diperlukan untuk meningkatkan partisipasi mereka.

Sehingga dapat disimpulkan Kesejahteraan sosial masyarakat Kalurahan Pagerharjo secara umum telah meningkat, didukung oleh berbagai program bantuan sosial dan partisipasi masyarakat yang cukup baik. Namun, tantangan utama terletak pada:

- a) *Kebutuhan dan Keinginan yang Meningkat:* Pendapatan masyarakat sering kali tidak mampu mengimbangi kebutuhan yang terus bertambah.
- b) *Ketergantungan pada Bantuan Sosial:* Bantuan yang berlebihan dapat menciptakan ketergantungan dan mengurangi motivasi masyarakat untuk menjadi mandiri.
- c) *Kesetaraan dalam Partisipasi:* Meski mayoritas masyarakat aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, terdapat segelintir individu yang kurang berkontribusi, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adil dalam pendistribusian bantuan.

Program bantuan sosial seperti PKH perlu diintegrasikan dengan strategi pengembangan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan insentif berbasis kinerja. Dengan demikian, program tersebut dapat lebih efektif dalam mendukung kemandirian dan pengentasan kemiskinan di Pagerharjo. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan jenis bantuan yang memberdayakan, seperti pemberian modal kerja atau peralatan yang dapat mendorong masyarakat untuk menjadi mandiri dan menciptakan sumber pendapatan jangka panjang (Alvarez et al., 2018; Hikmawati, 2022)

6) Program Bantuan dan Dukungan

Selain bantuan PKH yang terdapat di Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan ini merupakan salah satu wilayah yang menerima berbagai program bantuan sosial dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sumber situs web resmi Kalurahan Pagerharjo, beberapa program utama yang berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan meliputi Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat, Bantuan Bedah Rumah dari Baznas Kulon Progo, dan Penyaluran Bantuan Sosial berupa beras untuk keluarga miskin.

Program bantuan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun Anggaran 2024 yang merupakan program dari Direktorat Jendral Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kalurahan

Pagerharjo menjadi salah satu yang mendapatkan peninjauan oleh Dirjen PEI untuk verifikasi lapangan dalam penilaian kelayakan usulan bantuan yang diajukan oleh Bumdes Binangun Raharja, yang akan digunakan untuk pengembangan usaha dari bidang peternakan. Kemudian akan dilakukan kerjasama dengan kelompok usaha lain dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha tersebut.

Selain itu, bantuan bedah rumah yang disalurkan oleh Baznas Kulon Progo juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Program ini tidak hanya memperbaiki kondisi tempat tinggal yang layak, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang positif bagi penerima bantuan, meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan.

Selain bantuan sosial langsung, Kalurahan Pagerharjo juga mendapatkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satunya adalah Dana Keistimewaan yang difokuskan untuk pengembangan pertanian kopi di daerah tersebut. Bantuan yang diberikan berupa bibit kopi dan pupuk organik melalui kelompok Tani Muda Asta Brata bertujuan untuk memperluas hamparan perkebunan kopi sebagai bagian hamparan dari destinasi wisata edukasi di pagerharjo, yang pada akhirnya dapat memaksimalkan pemanfaatan tanah kas desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya petani kopi serta menambah pendapatan

asli desa melalui pengelolaan kopi oleh BUMDes Binangun Raharja Pagerharjo.

Pembangunan infrastruktur seperti proyek Jalan Plono Nglinggo dan Jaringan Irigrasi Sederhana Kemesu juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi lokal. Akses yang lebih baik ke area pertanian dan pasar lokal memungkinkan peningkatan mobilitas ekonomi dan distribusi hasil tani secara lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berikut adalah hasil temuan berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber:

1) Program Bantuan yang berjalan

Berbagai program bantuan telah berjalan di Kalurahan Pagerharjo, di antaranya:

- a) Program Keluarga Harapan (PKH)
- b) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
- c) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
- d) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- e) Bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa peralatan atau modal.
- f) Bantuan Ketahanan Pangan mencakup sektor perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Andar Kusnanto mencatat bahwa bantuan-bantuan ini secara umum berdampak positif, seperti meningkatkan daya beli

masyarakat, mengurangi beban kebutuhan hidup, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, ia juga mengingatkan bahwa bantuan berupa barang habis pakai sering kali menimbulkan ketergantungan, sehingga masyarakat menjadi tidak mandiri jika bantuan berhenti.

“Bagi penerima merasa tepat dan efektif tetepi scara umum, ada bantuan yang kurang tepat dan kurang efektif karena habis pakai kalau tidak dibantu terus ya tidak ada, lain kalau berupa bantuan peralatan kerja/modal kerja akan menjadi sumber pendapatan.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

2) Efektifitas Program Bantuan

Dari segi efektivitas, mayoritas narasumber sepakat bahwa program bantuan memiliki dampak positif, tetapi dengan beberapa catatan:

- a) Tepat Sasaran dan Berkelanjutan: **Supanto (Kamituwa)** menyoroti bahwa meskipun banyak program yang tepat sasaran, ada pula bantuan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama jika hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

“Dampaknya ketergantuan, kecemburuan sosial, bantuan habis pakai kalau habis ya miskin lagi.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

- b) Dampak Negatif: Menurut **Joko Wulantoro (Ketua BPKal)**, bantuan sosial yang bersifat langsung, seperti BLT atau BPNT, sering kali membuat masyarakat menjadi malas dan terlalu

bergantung pada bantuan. Hal ini diperparah oleh kurangnya edukasi dan pemberdayaan yang menyertai bantuan tersebut.

“Bantuan itu kurang efektif tidak mendidik masyarakat, tetapi membuat masyarakat malas sehingga menjagakan bantuan tidak ada upaya untuk kerja keras.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

- c) Jenis Bantuan yang Efektif: **Priyo Saptono** dan **Ananias Yuniarto** menekankan pentingnya bantuan yang bersifat memberdayakan, seperti pemberian modal atau peralatan kerja, dibandingkan bantuan habis pakai. Bantuan ini dianggap lebih efektif karena mendorong masyarakat untuk mandiri dan menciptakan sumber pendapatan jangka panjang.

“Sebenarnya lebih tepatnya bantuan kerja berkelanjutan bukan bantuan yang habis pakai, dan perlunya edukasi mental agar tidak menjagakan bantuan terus.” (Wawancara, Priyo S, 17/10/2024)

3) Tantangan dan Kendala

Program bantuan di Pagerharjo menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan dampaknya:

- a) Ketergantungan Masyarakat: Banyak masyarakat yang cenderung menunggu bantuan tanpa berupaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri. Hal ini terutama terlihat pada bantuan habis pakai seperti BPNT atau BLT.
- b) Kecemburuan Sosial: **Supanto** mencatat bahwa ada kecemburuan sosial di antara masyarakat, terutama ketika

distribusi bantuan dianggap tidak merata atau tidak sesuai kebutuhan.

*“Dampaknya ketergantuan, kecemburuan sosial, bantuan habis pakai kalau habis ya miskin lagi.”
(Wawancara, Supanto 13/10/2024)*

- c) Kurangnya Evaluasi dan Edukasi: **Joko Wulantoro** menyoroti perlunya evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa jenis bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, edukasi mental dan motivasi kerja sangat diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan.

*“Butuh identifikasi permasalahan tidak semua harus sama bantuannya, tetapi menurut yang dibutuhkan.”
(Wawancara, Joko W, 15/11/2024)*

Dari berbagai temuan dan pendapat narasumber, program bantuan sosial di Kalurahan Pagerharjo, seperti PKH, BPNT, BLT DD, dan lainnya, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan-bantuan ini mampu memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan seperti keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas, sehingga mengurangi beban ekonomi mereka. Selain itu, bantuan tersebut juga membantu masyarakat menghadapi situasi darurat, seperti krisis ekonomi atau dampak pandemi, yang secara langsung memengaruhi taraf hidup mereka.

Namun, berbagai tantangan masih perlu diatasi agar bantuan sosial ini lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu kendala utama adalah

munculnya ketergantungan masyarakat pada bantuan, yang dapat menghambat upaya pemberdayaan mereka. Selain itu, ketidakmerataan distribusi bantuan sering kali menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu pendekatan baru yang lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan edukasi yang tepat (Standisyah & Ramadhan, 2024). Pendekatan ini tidak hanya membantu masyarakat mandiri secara ekonomi tetapi juga mendukung terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan di Kalurahan Pagerharjo.

b. Proses pendistribusian bantuan sosial PKH di kalurahan Pagerharjo

1) Mekanisme pendistribusian bantuan sosial PKH

Mekanisme pendistribusian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo telah berjalan dengan baik melalui dua bentuk utama bantuan, yaitu bantuan tunai dan bantuan pangan. Bantuan tunai disalurkan secara non-tunai melalui transfer langsung ke rekening **Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)** milik penerima manfaat atau melalui ATM dan Agen Bank BNI 46. Hal ini disampaikan oleh **Dewi Astuti** selaku pendamping PKH, yang menambahkan bahwa penerima manfaat harus memastikan sendiri dana yang telah ditransfer dengan mengecek langsung ke bank atau ATM.

“Bansos PKH diberikan oleh kemensos secara non tunai, atau ditranfer melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) / ATM masing2 pengurus PKH.” (Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

Selain bantuan tunai, bantuan pangan disalurkan melalui e-Warung untuk memudahkan akses masyarakat yang membutuhkan. Pendamping PKH berperan penting dalam memberikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait proses pencairan, sementara pihak bank dan agen bank mendukung proses teknis distribusi dana bantuan tersebut.

Meskipun secara umum sistem distribusi PKH ini dinilai cukup efisien dan mandiri, beberapa tantangan masih ditemukan di lapangan. Berdasarkan keterangan **Agustinus Sulistyo**, terdapat kasus di mana penerima manfaat kesulitan menarik dana langsung sehingga harus meminta bantuan keluarga lain, seperti anak mereka.

“Ada beberapa hal yang harus disampaikan, uang yang melalui tf, bisa jadi yang menerima tf tidak bisa menarik, yang menarik anaknya, apakah anaknya menyampikan atau tidak, tidak semua itu tidak tercapai dengan sistem dnegan tf, tapi di lapangan masih dijumpai seperti itu. Bisa di dimungkinkan bahwa bantuan pkh ini salah digunakan, karena yang ngambil keluarga yang lain.” (Wawancara, Agustinus S, 25/11/2024)

Hal ini dapat memunculkan potensi penyalahgunaan karena tidak semua keluarga yang membantu memiliki tanggung jawab penuh untuk menyampaikan uang tersebut kepada penerima utama. Selain itu, bantuan PKH yang diterima tidak selalu digunakan secara tepat sesuai kebutuhan pokok, sehingga dapat mengurangi dampak positif dari program ini.

Agustinus juga menyoroti perlunya pembaruan data penerima bantuan secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada keluarga yang masih membutuhkan, mengingat beberapa penerima lama mungkin sudah tidak memenuhi kriteria program.

Terlepas dari kendala yang ada, mekanisme pendistribusian bantuan PKH melalui sistem perbankan dinilai memiliki keunggulan dari segi transparansi dan efisiensi. Dengan pola transfer langsung, penerima manfaat memiliki kontrol lebih baik terhadap dana yang diterima. Namun, evaluasi terhadap pelaksanaan program ini tetap diperlukan untuk meminimalkan kendala teknis maupun sosial di lapangan. Selain itu, edukasi kepada penerima manfaat tentang pentingnya penggunaan dana sesuai peruntukan dapat membantu meningkatkan efektivitas program. Dengan pembaruan data, pengawasan yang lebih ketat, dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan program PKH dapat terus mendukung pengentasan kemiskinan di Kalurahan Pagerharjo secara lebih optimal. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada penerima manfaat tentang penggunaan dana yang tepat, karena edukasi ini dapat membuat mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan dampak keseluruhan program, memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat (Magalhães et al., 2024).

2) Proses identifikasi dan verifikasi penerima

Proses identifikasi dan verifikasi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo dilakukan berdasarkan data awal yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial melalui *By Name By Address* (BNBA). Menurut **Dewi Astuti**, selaku pendamping PKH, calon penerima manfaat diundang ke desa untuk dilakukan validasi dengan mencocokkan identitas mereka melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

“Diundang ke desa untuk dilakukan validasi KPM sesuai dengan KTP dan KK memastikan dia sendiri sesuai BNBA atau bukan, dilihat apakah ada kategori di dalam keluarga tersebut (anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, disabilitas) Jika layak tidak layak akan ditentukan oleh pusat” (Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

Proses ini bertujuan memastikan bahwa penerima benar-benar sesuai dengan data BNBA dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu kategori masyarakat miskin dengan anggota keluarga yang memiliki salah satu indikator prioritas, seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, atau disabilitas.

Pendamping PKH berperan utama dalam melakukan verifikasi lapangan. Mereka tidak hanya memvalidasi data, tetapi juga berkoordinasi dan berkonsultasi dengan perangkat desa, seperti Kamituwa dan para dukuh, untuk mendapatkan informasi tambahan terkait kelayakan penerima di wilayah masing-masing. Meskipun perangkat desa dapat memberikan

usulan dan masukan mengenai calon penerima, keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Sosial. Hal ini dikonfirmasi oleh **Andar Kusnanto**, yang menyebut bahwa pendamping PKH akan melakukan wawancara langsung kepada calon penerima yang tercantum dalam daftar BNBA, tanpa mempertimbangkan usulan baru jika nama calon tidak ada dalam daftar tersebut.

“Pendamping wawancara ke calon penerima yang sudah masuk dalam daftar. Walaupun ada usulan masukan dari dukuh tetap tidak bisa kalau tidak ada dalam daftar.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Supanto, selaku Kamituwa, mengaku bahwa proses teknis identifikasi dilakukan sepenuhnya oleh pendamping PKH, dan pihaknya hanya menerima laporan hasil akhir setelah proses tersebut selesai. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki peran yang lebih terbatas dalam menentukan penerima bantuan, meskipun mereka berfungsi sebagai mitra koordinasi di lapangan.

“Tehnisnya kami tidak tahu, hanya dilapori hasilnya dari pendamping PKH” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Secara umum, proses identifikasi dan verifikasi penerima PKH telah diatur dengan prosedur yang jelas untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, beberapa kendala muncul di lapangan, seperti keterbatasan fleksibilitas dalam menambahkan calon penerima baru di luar daftar BNBA. Selain

itu, meskipun koordinasi dengan perangkat desa telah dilakukan, terdapat tantangan dalam menyelaraskan data dengan kondisi faktual masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso et al., (2024) mengungkapkan bahwa kekakuan dalam proses identifikasi ini menghambat inklusi keluarga baru yang memenuhi syarat di luar daftar BNBA yang telah ditentukan, yang pada akhirnya menghasilkan ketidaksetaraan sosial. Maka perlu dilakukan pengawasan dan pembaruan data yang lebih rutin, proses ini dapat semakin meningkatkan efektivitas distribusi bantuan PKH di Kalurahan Pagerharjo.

3) Jadwal dan frekuensi pendistribusian

Pendistribusian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo dilakukan dengan jadwal dan frekuensi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan keterangan **Dewi Astuti**, selaku pendamping PKH, mekanisme pendistribusian mulai tahun 2024 dilakukan dalam dua skema utama. Untuk penerima yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bantuan disalurkan setiap dua bulan sekali melalui rekening bank masing-masing. Sementara itu, bagi penerima yang mengakses bantuan melalui Kantor Pos, distribusi dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Mulai di tahun 2024 ini mekanisme untuk yang pemegang KKS per 2 bulan sekali Yang melalui kantor pos 3 bulan sekali” (Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

“Tidak ada jadwal khusus hanya saja setiap per 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali bantuan turun,

tetapi tidak menentu untuk tanggalnya.”
(Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

Namun, **Dewi Astuti** juga menjelaskan bahwa jadwal pendistribusian tidak memiliki tanggal khusus yang tetap. Bantuan biasanya disalurkan secara berkala dalam periode waktu yang telah ditentukan, yakni setiap dua atau tiga bulan, tetapi tanggal pasti kapan bantuan turun bergantung pada keputusan pusat. Oleh karena itu, penerima manfaat harus terus memantau informasi terbaru yang disampaikan oleh pendamping atau pihak terkait lainnya.

Supanto, selaku Kamituwa, menyatakan bahwa jadwal distribusi bantuan PKH memang dilakukan secara rutin setiap bulan, tetapi detail mengenai mekanisme distribusi diketahui secara langsung oleh pendamping dan penerima. Hal serupa juga diungkapkan oleh **Andar Kusnanto**, yang menyebut bahwa informasi mengenai jadwal dan frekuensi distribusi langsung diberikan kepada penerima bantuan, sehingga perangkat desa tidak memiliki keterlibatan langsung dalam hal ini.

“Yang tahu pendamping ke penerima.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

“Informasi langsung ke penerima.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Secara keseluruhan, mekanisme pendistribusian bantuan PKH di Kalurahan Pagerharjo telah berjalan sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan. Namun, kurangnya jadwal yang pasti untuk tanggal distribusi dapat menyebabkan tantangan bagi penerima manfaat, terutama dalam hal perencanaan keuangan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara pendamping dan penerima sangat penting untuk memastikan bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan optimal.

4) Koordinasi dengan pihak terkait

Koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo memiliki peran penting untuk memastikan kelancaran distribusi dan efektivitas bantuan sosial. Berdasarkan temuan lapangan, mekanisme koordinasi menunjukkan dinamika tertentu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping PKH, perangkat desa, dan penerima manfaat.

Dewi Astuti, pendamping PKH di Kalurahan Pagerharjo, menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara intensif dengan pihak kelurahan dan padukuhan, terutama dalam hal validasi data penerima dan penyampaian informasi terkait bantuan.

“Pendamping selalu akan berkoordinasi dengan pihak Kelurahan ataupun Padukuhan, jika dengan Dinsos itu pasti karena kami dibawah naungan Dinsos.” (Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

Selain itu, pendamping PKH juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos), mengingat pendamping PKH

berada di bawah naungan langsung Dinsos. Namun, ia mencatat bahwa masyarakat umum tidak memiliki peran aktif dalam proses koordinasi, karena fokus utama hanya pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, **Supanto** selaku Kamituwa mengungkapkan bahwa koordinasi antara pendamping PKH dan pemerintah desa dinilai kurang intensif. Dalam praktiknya, pendamping lebih banyak berinteraksi langsung dengan penerima bantuan dibandingkan dengan perangkat desa.

Meskipun demikian, KPM diharapkan memiliki peran aktif melalui pertemuan kelompok penerima untuk menyampaikan masukan atau mendapatkan informasi terkini.

“Koordinasi ke pemdes kurang, karena sifatnya pendamping ke penerima. Jadi yang perlu peran aktif adalah penerima dalam pertemuan kelompok penerima bantuan PKH.” Wawancara, Supanto 13/10/2024

Andar Kusnanto memberikan pandangan serupa, menyoroti bahwa koordinasi yang terjadi lebih banyak antara pendamping dan penerima manfaat. Ketika terdapat kendala, seperti bantuan yang tidak kunjung diterima, masyarakat sering kali mengajukan pertanyaan atau keluhan kepada Kepala Dukuh. Sayangnya, perangkat desa seperti Dukuh sering kali tidak memiliki informasi terkait mekanisme bantuan, sehingga tidak mampu memberikan solusi. Hal ini juga menjadi

tantangan dalam kasus penerima bantuan yang dianggap tidak layak atau masyarakat yang layak tetapi tidak terdaftar sebagai penerima.

“Koordinasi langsung dari pendamping ke penerima. Kalau tidak turun-turun yang ditanya dari masyarakat ke dukuh padahal dukuh tidak tahu. Terus kalau ada penerima yang tidak layak lagi atau masyarakat yang layak tapi tidak dapat komplainnya ke dukuh.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Secara keseluruhan, mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan bantuan sosial PKH di Kalurahan Pagerharjo menunjukkan peran penting pendamping PKH sebagai penghubung utama antara pemerintah pusat, Dinsos, dan KPM. Namun, kurangnya koordinasi yang sistematis dengan perangkat desa dapat menciptakan hambatan dalam penyampaian informasi serta penanganan keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan sinergi antara pendamping PKH dan pihak pemerintah desa agar program bantuan sosial dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto et al., (2024) ditekankan pentingnya kolaborasi antara aparat desa, tokoh masyarakat, dan penerima bantuan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial. Dengan meningkatkan sinergi, distribusi bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga

meningkatkan transparansi data bantuan sosial serta kemampuan manajemen aparat desa.

5) Evaluasi dan umpan balik

Evaluasi dan umpan balik merupakan aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kalurahan Pagerharjo, pelaksanaan evaluasi dan pengumpulan umpan balik menunjukkan berbagai dinamika yang melibatkan pendamping PKH, perangkat desa, dan penerima manfaat.

Dewi Astuti, pendamping PKH, menjelaskan bahwa evaluasi program dilakukan melalui rekonsiliasi (rekon) setelah penyaluran bantuan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tepat, serta untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi selama pendistribusian. Pendamping PKH memanfaatkan momen rekonsiliasi ini untuk menerima masukan langsung dari penerima manfaat terkait program bantuan. Begitu juga yang disampaikan oleh Kepala Dinsos Kulon progo prosedur monev bantuan sosial PKH sudah dilakukan melalui pendamping PKH dalam kegiatan P2K2. Selain itu monev dilakukan langsung oleh Dinas Sosial Kulon Progo dengan langsung memantau pelaksanaan P2K2.

Namun, perspektif berbeda diungkapkan oleh **Supanto**, selaku Kamituwa. Menurutnya, evaluasi formal atau mekanisme umpan balik yang terstruktur belum pernah dilakukan di tingkat

pemerintah desa. Jika ada masukan atau keluhan, biasanya disampaikan secara informal melalui pendamping PKH ketika ada pertemuan atau saat bertemu secara kebetulan. Salah satu masukan yang sering disampaikan oleh masyarakat adalah permintaan untuk mempermudah akses bantuan dengan mendekatkan lokasi pencairan kepada penerima manfaat.

“Evaluasi melalui rekon setelah pengambilan bansos PKJ.” (Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

“Evaluasi Belum pernah dalam tingkat desa kadang kadang lewat pendamping jika pas kebetulan ketemua, masukan dari para warga ingin akses pengambilan dana di dekatkan.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

“Untuk evaluasi kurang tahu, tetapi ada grup dari penerima.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Andar Kusnanto juga mencatat bahwa informasi terkait evaluasi dan umpan balik tidak banyak diketahui oleh perangkat desa. Meski demikian, ia menyebut adanya grup komunikasi antar penerima bantuan yang dapat menjadi medium informal bagi penerima untuk berbagi informasi, memberikan masukan, atau menyampaikan keluhan.

Secara umum, pelaksanaan evaluasi dan pengumpulan umpan balik dalam program PKH di Kalurahan Pagerharjo masih terbatas pada mekanisme yang dilakukan oleh pendamping PKH melalui rekonsiliasi pasca penyaluran bantuan. Keterlibatan perangkat desa dalam proses ini

tampaknya masih minim, sementara masukan dari masyarakat disampaikan lebih banyak melalui jalur informal. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi dan umpan balik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa, pendamping, dan penerima manfaat, agar program dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Yanti & Sukmana, (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penting untuk memperkuat mekanisme evaluasi dan umpan balik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dapat menghasilkan pengelolaan data yang lebih baik dan distribusi bantuan yang lebih merata, yang pada gilirannya mendorong pemulihan ekonomi di daerah pedesaan.

6) Sosialisasi dan informasi

Sosialisasi dan penyampaian informasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo dilakukan melalui berbagai cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan pemahaman yang baik terkait program ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, berikut adalah temuan terkait proses sosialisasi dan penyampaian informasi PKH di wilayah tersebut.

Dewi Astuti, selaku pendamping PKH, menjelaskan bahwa sosialisasi program dilakukan secara rutin melalui pertemuan kelompok antara pendamping dan para penerima manfaat. Pertemuan ini diadakan satu bulan sekali dan menjadi medium utama untuk menyampaikan informasi penting terkait mekanisme, jadwal bantuan, serta hak dan kewajiban KPM. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan sudah sangat cukup karena melalui pertemuan ini, pendamping dapat memberikan penjelasan langsung serta menjawab pertanyaan atau keluhan dari para penerima manfaat.

“Penyampaian informasi melalui pertemuan kelompok antara pendamping dan KPM penerima bansos PKH, Ya sangat cukup karena 1 bulan sekali ada pertemuan kelompok antara pendamping dan kpm penerima bansos PKH.” (Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

Senada dengan itu, **Supanto**, Kamituwa Kalurahan Pagerharjo, menyebut bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping kepada penerima manfaat berjalan dengan baik. Ia tidak menemukan adanya permasalahan terkait penyampaian informasi dari pendamping kepada penerima manfaat. Meski demikian, ia menekankan bahwa sosialisasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pendamping, sehingga perangkat desa cenderung tidak terlibat secara langsung dalam proses ini.

Andar Kusnanto, salah satu kepala dukuh di Kalurahan Pagerharjo, mengonfirmasi bahwa sosialisasi dilakukan melalui komunikasi langsung antara pendamping dan kelompok

penerima manfaat, termasuk melalui grup komunikasi yang dibuat untuk memudahkan penyampaian informasi. Namun, ia mengaku kurang mengetahui detail proses atau mekanisme sosialisasi lebih lanjut.

Secara keseluruhan, sosialisasi dan penyampaian informasi dalam program PKH di Kalurahan Pagerharjo tampak berjalan cukup baik melalui pertemuan rutin dan komunikasi langsung antara pendamping dan KPM. Meski demikian, kurangnya keterlibatan perangkat desa dalam proses ini menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan koordinasi agar informasi dapat disampaikan lebih luas dan efektif, tidak hanya kepada penerima manfaat, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Dengan memperkuat koordinasi antara pendamping, aparat desa, dan penerima manfaat, serta melakukan evaluasi dan umpan balik yang lebih terstruktur, diharapkan program PKH dapat terus mendukung pengentasan kemiskinan di Kalurahan Pagerharjo dengan lebih efektif (Inkiriwang & Effendy, 2024).

7) Tantangan dan hambatan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dari sisi teknis pendistribusian maupun pemanfaatan bantuan oleh penerima. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, berikut adalah temuan terkait tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Supanto, Kamituwa Kalurahan Pagerharjo, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama adalah bagi penerima manfaat yang berusia lanjut. Lansia seringkali terkendala transportasi untuk menuju lokasi pengambilan bantuan, seperti bank atau tempat distribusi lainnya. Untuk mengatasi hal ini, **Supanto** menyarankan agar proses pendistribusian bantuan dapat didekatkan hingga ke tingkat kalurahan, sehingga memudahkan akses bagi penerima, terutama kelompok rentan seperti lansia.

“Bagi penerima yang lansia terkendala dengan transportasi. Untuk ketempat pengambilan bantuan. Cara mengatasi Pendistribusian didekatkan sampai ke tingkat kalurahan.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Dewi Astuti, pendamping PKH, menyoroti hambatan lain berupa ketidakhadiran beberapa KPM dalam pertemuan kelompok rutin. Ketidakhadiran ini menyebabkan mereka ketinggalan informasi penting terkait mekanisme dan proses program. Selain itu, kecemburuan sosial di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi, terutama ketika ada masyarakat yang merasa lebih layak menerima bantuan dibandingkan penerima yang terdaftar. Untuk mengatasi masalah ini, **Dewi Astuti** biasanya melakukan pendekatan personal kepada KPM untuk mendorong partisipasi mereka, serta mendengarkan keluhan masyarakat umum. Ia juga sering berkoordinasi dengan pihak lain jika ada program bantuan sosial

lain yang dapat membantu masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima PKH.

“KPM yang tidak mau hadir dalam pertemuan kelompok akan ketinggalan informasi terkait dengan proses PKH. Timbul kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.” (Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

“Cara mengatasi pendamping biasanya akan melakukan pendekatan secara personal kepada KPM. jika kepada masyarakat PDP melakukan pendekatan dengan mendengarkan keluhan kesah, jika memang ada yg perlu dibantu biasanya PDP akan berkoordinasi dengan pihak lain jika ada bantuan sosial yg lain, tanpa harus PKH.” (Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

Andar Kusnanto juga menggarisbawahi tantangan serupa bagi penerima lansia, yang sering kali harus didampingi keluarga untuk mengambil bantuan di bank yang jaraknya cukup jauh. Seperti **Supanto**, ia menyarankan agar distribusi bantuan dapat didekatkan hingga tingkat kalurahan untuk mengurangi beban transportasi bagi kelompok rentan.

Dari sisi efektivitas penggunaan bantuan, **Joko Wulantoro**, Ketua BPKal, menilai bahwa pendistribusian bantuan sudah berjalan cukup baik. Namun, tantangan utama adalah memastikan penggunaan bantuan oleh penerima dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya, penyuluhan yang konsisten dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mendorong KPM menggunakan bantuan dengan bijak.

“Proses pendistribusian sudah lebih bagus, tetapi yang jadi masalah pendistribusian penggunaan bantuan tersebut oleh penerima agar tepat penggunaannya. Tentu dengan penyuluhan yang terus menerus serta pengawasan yang maksimal.”
(Wawancara, Joko W, 15/11/2024)

Hal serupa disampaikan oleh **Ananias Yuniarto**, yang menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan oleh pendamping atau pejabat terkait untuk memastikan bantuan dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam hal pengeluaran dan belanja.

Sudah baik, Tantangannya pendistribusian lebih ke penggunaan/belanja Pengawasan oleh pejabat/pendamping, dan pembinaan. (Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan PKH di Kalurahan Pagerharjo mencakup aspek teknis, sosial, dan edukasi. Usulan seperti mendekatkan lokasi distribusi, meningkatkan pendekatan personal kepada penerima, serta memperkuat pengawasan dan penyuluhan dinilai sebagai langkah-langkah penting untuk mengatasi hambatan yang ada dan meningkatkan efektivitas program.

c. Penggunaan bantuan sosial PKH di kalurahan Pagerharjo sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kemanfaatannya

1) Proses penerimaan bantuan

Proses penerimaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah

pusat, pendamping PKH, dan perangkat desa. Berikut adalah temuan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait:

Supanto, Kamituwa Kalurahan Pagerharjo, menjelaskan bahwa dirinya pernah terlibat saat ada penambahan kuota penerima bantuan di tingkat kalurahan. Namun, secara teknis, proses tersebut sepenuhnya dikelola oleh pendamping PKH. Berdasarkan pengamatannya, penerima bantuan biasanya adalah keluarga yang memiliki anggota lansia dan anak sekolah.

“Saya pernah saat ada penambahan kuota itu dikalurahan tapi teknisnya pendamping sendiri. Setahuku keluarga yang punya lansia dan anak sekolah.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Menurut **Dewi Astuti**, pendamping PKH, daftar penerima bantuan atau *by name by address* (BNBA) sudah ditentukan sebelumnya oleh Kementerian Sosial. Penerima yang terdaftar diundang ke desa untuk dilakukan validasi data, dengan mencocokkan KTP dan KK untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan daftar BNBA. Selain itu, proses validasi juga mencakup pemeriksaan apakah keluarga tersebut memenuhi kategori penerima bantuan, seperti memiliki anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas. Jika penerima tidak memenuhi syarat, keputusan mengenai kelayakan ditentukan oleh pihak pusat. Kriteria utama penerima bantuan adalah masyarakat miskin yang tidak mampu dan termasuk dalam kategori tertentu seperti yang telah disebutkan.

“Diundang ke desa untuk dilakukan validasi KPM sesuai dengan KTP dan KK memastikan dia sendiri sesuai BNBA atau bukan, dilihat apakah ada kategori

di dalam keluarga tersebut (anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, disabilitas) Jika layak tidak layak akan ditentukan oleh pusat” (Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

Andar Kusnanto mengungkapkan bahwa pemerintah kalurahan biasanya menerima daftar calon penerima yang belum diverifikasi dari pemerintah pusat. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan oleh pendamping PKH. Perangkat desa, termasuk dirinya, tidak terlibat langsung dalam proses ini dan hanya mendukung pendamping jika diperlukan.

“Kalurahan dikasih daftar calon yang belum diverifikasi, seterusnya dilaksanakan oleh pendamping” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Secara keseluruhan, proses penerimaan bantuan PKH di Kalurahan Pagerharjo terpusat pada mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Validasi dilakukan oleh pendamping PKH, dengan fokus pada memastikan bahwa data penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Meskipun perangkat desa memiliki peran terbatas, mereka tetap berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan di tingkat lokal, untuk koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat (Hotimah & Koesbandrijo, 2019).

2) Pengetahuan dan pemahaman penerima

Pengetahuan dan pemahaman penerima terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo merupakan aspek penting dalam pelaksanaan program ini. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, ditemukan bahwa upaya untuk memberikan pemahaman kepada penerima

telah dilakukan, meskipun tingkat pemahaman yang dicapai belum dapat dipastikan secara menyeluruh.

Supanto, selaku Kamituwa Kalurahan Pagerharjo, menyatakan bahwa ia mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH kepada para penerima. Namun, ia mengakui bahwa dirinya tidak dapat memastikan apakah para penerima benar-benar memahami informasi yang disampaikan. Data dan informasi mengenai bantuan ini umumnya disampaikan melalui pendamping PKH.

“Setahuku ada sosialisasi.pendamping tetapi masalah paham tidaknya ya kurang tahu. Informasi dari data lewat pendamping.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Dewi Astuti, pendamping PKH, mengungkapkan bahwa upaya untuk meningkatkan pengetahuan penerima dilakukan melalui pertemuan kelompok yang rutin diadakan. Dalam pertemuan tersebut, pendamping memberikan penjelasan mengenai mekanisme bantuan, persyaratan, dan tanggung jawab penerima. Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk memastikan bahwa penerima memahami tujuan dan manfaat program PKH.

Andar Kusnanto menjelaskan bahwa seharusnya penerima bantuan mengetahui informasi yang diperlukan, karena sebelumnya telah ada sosialisasi dari pendamping PKH. Namun, ia juga menekankan bahwa data dan informasi utama berasal dari pendamping, sehingga penting untuk memastikan pendamping berkomunikasi secara efektif dengan para penerima.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan pertemuan kelompok rutin menjadi media utama dalam menyampaikan informasi kepada penerima bantuan. Namun, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar dipahami oleh semua penerima, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka dalam program PKH (Silalahi & Efendi, 2024).

3) Penggunaan bantuan

Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengenai penggunaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo, ditemukan berbagai pola penggunaan yang bervariasi.

Supanto, selaku Kamituwa, menyatakan bahwa bantuan tersebut sering kali digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan bagi anak-anak, contohnya membeli perlengkapan sekolah. Bantuan pangan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Namun, ia juga menyebutkan bahwa terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana beberapa penerima menggunakan bantuan untuk keperluan di luar kebutuhan utama.

“Kalau yang punya anak sekolah ya untuk kebutuhan sekolah, yang berupa pangan ya digunakan untuk makan. Untuk yang digunakan kebutuhan diluar ketentuan ya pasti ada.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Dewi Astuti, pendamping PKH, mengungkapkan bahwa idealnya bantuan PKH digunakan untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan pendidikan. Bantuan diharapkan digunakan untuk

keperluan yang tepat seperti membeli makanan, bahan pakaian, dan kebutuhan pendidikan anak-anak. Ia menekankan bahwa penggunaan bantuan yang sesuai dengan tujuan program akan membantu meningkatkan kesejahteraan penerima.

Andar Kusnanto menyebutkan bahwa meskipun umumnya bantuan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga sebagian penerima yang menggunakan bantuan untuk kepentingan lain di luar kebutuhan utama. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan bantuan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Untuk kebutuhan mereka tetapi juga ada yang untuk kepentingan lain diluar kebutuhan utama.”
(Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Dari temuan ini, terlihat bahwa penggunaan bantuan sosial PKH di Kalurahan Pagerharjo beragam tergantung pada kebutuhan masing-masing penerima. Penting untuk terus mengawasi dan memberikan bimbingan agar penggunaan bantuan tetap sesuai dengan tujuan program untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan (Qudus et al., 2024).

4) Manfaat yang dirasakan

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat nyata kepada penerima bantuan, meskipun efektivitasnya dalam mencapai kesejahteraan jangka panjang masih menjadi tantangan. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk aparatur desa dan penerima manfaat, ditemukan beberapa poin penting

terkait manfaat yang dirasakan, kendala pelaksanaan, dan harapan untuk perbaikan program di masa depan.

Manfaat PKH bagi keluarga penerima manfaat sangat signifikan, terutama dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak. **Tumingin**, salah satu penerima bantuan, mengungkapkan bahwa bantuan PKH sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti belanja kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan sekolah. Pendapat ini diperkuat oleh **Maryanto**, yang juga menyatakan bahwa bantuan PKH sangat mendukung pendidikan anak-anaknya, sehingga biaya pendidikan menjadi lebih ringan. Bahkan, kekurangan pembayaran sekolah anak dapat diminimalkan hingga hanya beberapa ratus ribu rupiah.

“Pendapat saya tentang bantuan PKH yang telah saya terima tentunya sangat bermanfaat dan sangat membantu karena bisa untuk membeli kebutuhan rumah tangga, sekolah anak dan lain sebagainya.”
(Wawancara, Tugimin, 24/11/2024)

Dampak bantuan PKH dalam pendidikan sangat dirasakan oleh keluarga penerima manfaat. Sebagian besar bantuan digunakan untuk pembiayaan sekolah anak-anak, seperti membeli perlengkapan sekolah atau membayar biaya pendidikan. **Maryanto** menegaskan bahwa prioritas bantuan dialokasikan untuk pendidikan, karena kebutuhan pendidikan bersifat mendesak dan harus dipenuhi, sedangkan kebutuhan rumah tangga dapat disiasati dengan hasil perkebunan atau sumber daya seadanya.

“Bantuan PKH ini sangat membantu sekali, contohnya yang dirasakan adalah dalam hal

pendidikan, anak sekolah sudah smk, termasuk kebutuhan sehari hari fokus pendidikan.”
(Wawancara, Maryanto, 24/11/2024)

Meskipun memberikan manfaat, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan jumlah bantuan dan frekuensi pencairan. Menurut **Tumingin**, bantuan yang diberikan setiap tiga bulan sekali sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan. Selain itu, **Maryanto** mengeluhkan bahwa pencairan dana tidak dilakukan secara serempak, sehingga menyulitkan beberapa penerima yang harus menunggu dana tersedia di rekening mereka.

“Bantuan yang diberikan dalam waktu 3 bulan sekali belum cukup memenuhi kebutuhan karena kebutuhan baik keluarga atau sekolah semakin mahal.”
(Wawancara, Tugimin, 24/11/2024)

“Dalam pencairan dana tidak bersamaan, kadang ada yang sudah turun dan ada yang belum, kemudian di cek di hari berikutnya, jadi tidak bersamaan turunnya.” (Wawancara, Maryanto, 24/11/2024)

Dari sisi administrasi, kendala seperti keterlambatan dana masuk ke rekening penerima juga menjadi masalah yang sering ditemui. Namun, kualitas layanan pendamping PKH di lapangan dinilai cukup baik oleh **Tumingin** dan **Maryanto**. Mereka mengapresiasi pendamping yang ramah dan responsif dalam

memberikan informasi terkait proses pencairan maupun syarat administrasi.

Meskipun manfaat PKH dirasakan secara langsung, seperti berkurangnya beban biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga, sebagian besar penerima merasa bahwa bantuan ini belum cukup untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang.

“Sejak menerima bantuan PKH belum membuat sejahtera karena masih banyak untuk membantu kebutuhan pendidikan anak juga, masih jauh dari harapan sejahtera.” (Wawancara, Tugimin, 24/11/2024)

“Peningkatakn kesejahteraan, secara keseluruhan belum, karena dalam bantuan pkh ini hanya pas digunakan untuk biaya sekolah anak, kadang malah kurang, ukuran sejahtera belum begitu terasa.” (Wawancara, Maryanto, 24/11/2024)

Supanto dan **Andar Kusnanto**, yang berperan sebagai aparaturnya desa, menilai bahwa program ini memang meringankan beban hidup keluarga miskin, tetapi belum mampu sepenuhnya menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima.

Tumingin dan **Maryanto** sama-sama mengusulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas PKH, bantuan sebaiknya ditambah atau diarahkan untuk modal usaha. Mereka menyarankan agar bantuan dapat digunakan untuk pengembangan usaha kecil, seperti peternakan kambing atau sapi, yang dapat memberikan pendapatan berkelanjutan bagi keluarga. Dengan demikian, ketika keluarga sudah tidak lagi menerima bantuan, mereka memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Syukur bantuannya ditambah dan bisa untuk modal usaha, karena takutnya kalau sudah tidak dapat bantuan tidak punya sumber pendapatan keluarga.”

(Wawancara, Tugimin, 24/11/2024)

“Kalau bisa ada penambahan dalam hal dana sukur sukur bisa buat modal untuk usaha, seperti peternakan, untuk jaga-jaga suatu saat sudah tidak dapat, bisa untuk tabungan, kalau di dusun kebanyakan petani, peternakan, dengan adanya bisa dikembangkan seperti kambing, sapi, ayam, yang bisa mendapatkan hasil, bantuan yang sifatnya berkelanjutan, Tambah nominalnya, bantuannya bisa untuk modal usaha, terutama dalam hal pertanian, peternakan, yang dapat menghasilkan, tidak Cuma monoton. Kalau kambing, betina bisa untuk bibit.”

(Wawancara, Maryanto, 24/11/2024)

Program PKH telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban kebutuhan hidup dan mendukung pendidikan anak-anak penerima manfaat. Namun, dampaknya terhadap kesejahteraan jangka panjang masih terbatas. Dengan mengintegrasikan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan program, PKH memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan kemandirian keluarga miskin di masa depan.

5) Tepat sasaran

Ketepatan sasaran merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, ditemukan bahwa sebagian besar penerima manfaat telah sesuai dengan kriteria, namun masih terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi

efektivitas distribusi bantuan. **Supanto**, seorang *Kamituwa*, menyampaikan bahwa meskipun sebagian besar penerima sudah tepat sasaran, terdapat laporan dari aparat dukuh tentang beberapa keluarga yang layak menerima bantuan namun belum terdata. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pendataan awal yang berpotensi mengabaikan masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan.

“Sebagian besar sudah tetapi menurut laporan pak dukuh ada juga yang kurang pas. Menurut laporan dukuh memang ada yang layak dapat bantuan tapi belum mendapat” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Andar Kusnanto juga menyampaikan pandangan serupa, bahwa meskipun mayoritas penerima bantuan sudah sesuai, terdapat beberapa kasus yang kurang tepat. Salah satu contoh yang ia sampaikan adalah masyarakat yang miskin mendadak akibat musibah atau masalah keluarga, seperti lansia yang tinggal bersama anaknya. Dalam situasi seperti ini, lansia sering kali dianggap bagian dari keluarga yang mampu, meskipun perhatian dan dukungan dari anggota keluarga tidak memadai. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih kontekstual dalam menentukan kelayakan penerima bantuan, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia atau keluarga yang mengalami perubahan status ekonomi secara mendadak.

“Ada masyarakat yang miskin mendadak karena sebab musibah, masyarakat yang kelihatan mampu tetapi ada masalah dalam keluarga, lansia jadi satu dengan anaknya dipandang dalam keluarga mampu

tetapi anaknya tidak memperhatikan.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Tokoh masyarakat, **Agustinus Sulisty**o, menyoroti bahwa permasalahan ketepatan sasaran juga berkaitan dengan proses pemetaan dan pendataan yang belum optimal. Ia menyarankan agar pendataan dilakukan dengan lebih rinci dan mempertimbangkan faktor produktivitas penerima. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan PKH benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan bukan kepada mereka yang masih produktif serta memiliki potensi ekonomi.

“Dari pendataan yang mendapatkan bantuan harus dipetakan benar benar membutuhkan atau masih produktif, maka pendataanya harus di tingkatkan lagi.” (Wawancara, Agustinus S, 25/11/2024)

Secara keseluruhan, meskipun PKH telah memberikan manfaat bagi banyak keluarga miskin, ketepatan sasaran masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan, evaluasi berbasis kondisi aktual, dan pemetaan yang lebih akurat terhadap calon penerima bantuan. Dengan perbaikan ini, diharapkan bantuan sosial PKH dapat semakin efektif dan adil dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

6) Transparan dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen penting dalam memastikan keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, program ini secara umum telah memenuhi standar transparansi, terutama dalam proses distribusi bantuan. **Dwi Astuti**, pendamping

PKH, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara konsisten. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengambil bantuan selalu dicatat dan direkonsiliasi, serta didampingi oleh pendamping PKH yang juga melakukan monitoring lapangan. Prosedur ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga akuntabilitas penggunaan bantuan.

*“Transparansi dan akuntabilitas, dalam pengawasan selalu ada setiap KPM mengambil bantuan akan ada rekonsiliasi bagi KPM yang telah mengambil bantuan, pendamping juga memonitoring.”
(Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)*

Joko Wulantoro, Ketua BPKal, mengonfirmasi bahwa transparansi telah diterapkan melalui mekanisme penyaluran bantuan yang langsung ditransfer ke rekening penerima. Namun, ia menyoroti pentingnya pengawasan lebih lanjut dalam penggunaannya. Menurutnya, pendamping PKH perlu memberikan arahan kepada penerima manfaat agar bantuan dapat digunakan secara optimal, khususnya untuk kebutuhan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan penggunaan dana bantuan.

*“Sudah transparansi karena bantuan langsung ditranfer lewat rekening penerima, tetapi perlu diarahkan penggunaanya.
Pengawasan harus melekat ke masyarakat, tidak hanya mendapatkan laporan saja setidaknya meminimalisir penyimpangan penggunaan PKH pada penerima.” (Wawancara, Joko W, 15/11/2024)*

Pandangan serupa disampaikan oleh **Ananias Yuniarto**, anggota BPKal, yang menilai bahwa proses penyaluran bantuan

sudah transparan, tetapi perlu adanya perhatian terhadap aspek etika. Ia mencatat bahwa kecemburuan sosial dapat timbul di antara masyarakat yang tidak menerima bantuan, sehingga penerima manfaat perlu diarahkan untuk menjaga sikap dan penggunaan bantuan agar tetap sesuai dengan tujuan program. Selain itu, penerima juga dimintai laporan penggunaan sederhana sebagai langkah preventif untuk memastikan bantuan digunakan dengan tepat.

“Sudah transparansi karena bantuan langsung ditranfer lewat rekening penerima, tetapi perlu menjaga etika bagi penerima agar tidak timbul kecemburuan sosial.

Penerima juga dimintai laporan penggunaan yang mendasar saja setidaknya meminimalisir penyimpangan penggunaan PKH pada penerima.”
(Wawancara, Ananias Y, 26/11/2024)

Secara keseluruhan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PKH dinilai sudah cukup baik, terutama karena bantuan langsung diterima oleh penerima melalui mekanisme transfer. Namun, tantangan yang masih perlu diperhatikan adalah pengawasan terhadap penggunaan bantuan dan pembinaan terhadap penerima manfaat agar dapat memanfaatkan bantuan secara optimal dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan bantuan sosial.

7) Efektifitas program

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan masih menjadi perdebatan di

berbagai kalangan. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah narasumber, ditemukan bahwa meskipun program ini memiliki dampak positif, efektivitasnya dalam menekan angka kemiskinan jangka panjang masih terbatas. **Supanto**, seorang *Kamituwa*, menjelaskan bahwa PKH telah membawa perubahan pada kehidupan penerima, seperti peningkatan daya beli masyarakat. Namun, bantuan yang bersifat habis pakai ini dinilai tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, karena tidak mendukung keberlanjutan ekonomi, seperti melalui modal usaha.

“Ada perubahan kehidupan penerima setelah mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak mempengaruhi penurunan angka kemiskinan karena bantuan habis pakai bukan bantuan yang berkelanjutan untuk modal usaha.” (Wawancara, Supanto 13/10/2024)

Dewi Astuti, pendamping PKH, menyoroti bahwa salah satu tantangan dalam efektivitas program ini adalah pola pikir sebagian masyarakat yang masih bergantung pada bantuan, meskipun mereka sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan intensif bagi penerima manfaat untuk mendorong kemandirian serta pembaruan data penerima secara berkala agar bantuan tepat sasaran.

“Pola pikir masyarakat yang masih mengandalkan bantuan padahal sudah tidak layak” (Wawancara, Dwi A, 9/10/2024)

Dari perspektif **Andar Kusnanto**, PKH memang mampu meningkatkan daya beli masyarakat penerima bantuan. Namun, ia sependapat bahwa program ini belum mampu secara langsung menurunkan angka kemiskinan.

“Ada perubahan tetapi tidak mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.” (Wawancara, Andar K, 19/10/2024)

Agustinus Sulisty, seorang tokoh masyarakat, menguatkan pandangan ini dengan menyatakan bahwa bantuan yang bersifat habis pakai kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Menurutnya, bantuan yang lebih sesuai adalah yang mendukung potensi ekonomi keluarga penerima, seperti bantuan berbasis pertanian atau usaha produktif yang memiliki nilai ekonomi jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data setiap tahun untuk memastikan apakah penerima mengalami peningkatan ekonomi atau masih layak menerima bantuan.

“Untuk mengurangi angka kemiskinan, harus mempertimbangkan bantuan yang habis pakai atau yang sifatnya fleksibel. Kalo bantuan yang sifatnya habis pakai itu tidak efektif. Disamping itu untuk memastikan bantuan tepat sasaran maka perlu dilakukan pembaruan data, harus dilihat betul apakah yang menerima bantuan PKH masih produktif atau tidak, maka perlu pemetaan data penerima bantuan, dan perlunya pemberian bantuan yang bersifat produktif tidak habis pakai.” (Wawancara, Agustinus S, 25/11/2024)

Secara keseluruhan, PKH dinilai cukup efektif dalam memberikan manfaat langsung, seperti memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan daya beli. Namun, efektivitasnya dalam mengatasi kemiskinan jangka panjang masih terbatas akibat sifat bantuan yang habis pakai dan kurangnya dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perubahan kebijakan, seperti pengalihan sebagian bantuan menjadi bantuan produktif, pendampingan untuk membangun kemandirian penerima, serta pembaruan data secara berkala untuk memastikan validitas penerima bantuan. Dengan langkah-langkah ini, PKH dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

8) Saran dan perbaikan

Berbagai saran dan perbaikan disampaikan oleh para narasumber untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH, baik dalam hal penyaluran, pemanfaatan, maupun dampak jangka panjangnya. Salah satu rekomendasi utama yang diutarakan oleh **Supanto** dan **Andar Kusnanto** adalah perlunya pembaruan data penerima secara berkala. Verifikasi data ini tidak hanya melibatkan pendamping PKH, tetapi juga tokoh masyarakat dan kepala dusun untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan harus dinonaktifkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

“Perlu update data secara berkala. Verifikasi perlu melibatkan banyak pihak, bantuan bagi masyarakat yang masih produktif perlu inovasi yang lain berupa modal peralatan usaha /permodalan, harus ada

*pengawasan. agar tidak salah penggunaan”
(Wawancara, Supanto 13/10/2024)*

Pendamping PKH, **Dewi Astuti**, juga menegaskan pentingnya kerjasama dengan kepala dukuh dalam proses verifikasi penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran. Meski demikian, ia menilai bahwa sejauh ini pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik, meskipun evaluasi rutin tetap diperlukan untuk menyempurnakan mekanisme yang ada.

Agustinus Sulistyo menyoroti perlunya transformasi dalam bentuk bantuan yang diberikan. Ia menyarankan agar bantuan sosial tidak hanya berupa uang tunai yang habis pakai, tetapi diubah menjadi modal usaha atau alat-alat produktif seperti bibit pertanian, peralatan usaha, atau bahkan bantuan berbasis teknologi. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi penerima manfaat, terutama mereka yang masih memiliki potensi produktif. Selain itu, ia menekankan bahwa kategori kemiskinan tidak hanya diukur dari usia atau kondisi fisik penerima, tetapi juga potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.

Kategori miskin tidak diukur dari tua dan mudanya, jika memang yang masih memiliki potensi yang harus dikembangkan, diberikan bantuan yang sifatnya berkelanjutan, jangan dalam bentuk uang atau habis di pakai. (Wawancara, Agustinus S, 25/11/2024)

Agustinus juga menggarisbawahi pentingnya melihat kemiskinan tidak hanya dari sisi hulu (bantuan yang diberikan),

tetapi juga dari sisi hilir, yaitu bagaimana penerima bantuan dapat memanfaatkan hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia mengusulkan pemanfaatan teknologi seperti e-commerce untuk memasarkan hasil usaha penerima bantuan. Dengan melibatkan anak muda sebagai distributor, PKH dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.

“Angka kemiskinan tidak hanya dilihat dari hulu saja tetapi harus dilihat dari hilirnya, setelah menerima bantuan ada beberapa hal jika mereka masih bisa berusaha harus memberikan peluang seperti anak muda yang dapat menjadi distributor dengan memanfaatkan teknologi e-commerce, dan dapat memasarkan produk olahan atau pertanian yang dihasilkan oleh penerima manfaat yang masih produktif” (Wawancara, Agustinus S, 25/11/2024)

Secara keseluruhan, saran yang diberikan menyoroti pentingnya peningkatan akurasi data, transformasi bentuk bantuan menjadi modal produktif, pengawasan yang lebih ketat, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan dampak jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, PKH dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya mengurangi angka kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.

B. PEMBAHASAN

1. Refleksi Implementasi Program Bantuan Sosial PKH

Dalam Konteks Kalurahan Pagerharjo, Implementasi PKH menunjukkan adanya potensi sekaligus tantangan yang signifikan. Dengan menggunakan model refleksi Gibbs, analisis dapat dirinci sebagai berikut:

a. Deskripsi

Program Keluarga Harapan (PKH) telah diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan bersyarat yang mencakup pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebagian besar penerima manfaat berasal dari kelompok ekonomi terendah, dengan kondisi sosial yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong penerima manfaat untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan (Inkiriwang & Effendy, 2024; Khabibi & Rodiyah, 2024)

b. Perasaan (Feelings)

Sebagian besar penerima bantuan merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, beberapa penerima juga mengungkapkan perasaan ketidakpastian akan keberlanjutan bantuan ini di masa depan. Di sisi lain, para pelaksana program merasa tantangan terbesar adalah menghadapi resistensi dari masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan utama program bantuan PKH (Osinski, 2020).

c. Evaluasi

Dari sisi positif, PKH berhasil meringankan beban ekonomi penerima manfaat dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, terdapat beberapa kelemahan:

- a) Ketidaktepatan sasaran penerima: Masih ada penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria.

- b) Kurangnya edukasi: banyak penerima belum memahami sepenuhnya bagaimana memanfaatkan bantuan untuk kemandirian ekonomi.
- c) Budaya ketergantungan: Program ini masih menciptakan ketergantungan di kalangan masyarakat tertentu.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Handayani & Aliyudin, (2020); Rahmi, (2021); Restianti, (2018) mengungkapkan bahwa bantuan PKH masih mengalami hal yang sama hingga saat ini, ketidakakuratan dalam penentuan sasaran merupakan masalah dasar dalam pelaksanaan bantuan sosial PKH. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, masih kurang dalam melakukan evaluasi dan pemantauan program hingga tingkat desa. Hal ini juga dibuktikan oleh beberapa wawancara dengan informan yang menjelaskan bahwa seleksi dan distribusi bantuan PKH tidak melibatkan Pemerintah Desa secara langsung, sehingga bantuan dianggap kurang efektif dan efisien.

d. Analisis

Ketidaktepatan sasaran penerima PKH sebagian besar disebabkan oleh masalah validasi data. Proses seleksi penerima yang menggunakan data lama menyebabkan adanya penerima yang seharusnya sudah tidak memenuhi syarat. Selain itu, budaya “njagakke bantuan sosial” yang berkembang di beberapa individu membuat program ini menjadi kurang efektif dalam memberdayakan penerima. Lebih lanjut lagi, kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menimbulkan kesenjangan dalam implementasi program.

e. Kesimpulan

Program bantuan sosial PKH memiliki dampak positif yang signifikan dalam membantu masyarakat miskin. Namun, terdapat kebetulan mendesak untuk meningkatkan akurasi data penerima, memperkuat pengawasan, serta memberikan edukasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar bantuan ini dapat menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi.

f. Rencana Tindakan

- a) Meningkatkan validasi data penerima secara berkala dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat loka.
- b) untuk memberikan edukasi kepada penerima manfaat tentang Mengintegrasikan perogram pemberdayaan ekonomi lokal dengan PKH, seperti pelatihan ketrampilan dan pemberian kases modal usaha.
- c) Melibatkan pendamping program pentingnya memanfaatkan bantuan secara produktif.

2. Kontekstualisasi Tantangan

a. Kendala Validasi Data

Validasi data penerima bantuan sosial PKH di Kalurahan Pagerharjo masih menggunakan data yang tergolong belum update, sehingga terdapat beberapa penermima bantuan tidak lagi sesuai dengan kriteria. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi untuk memastikan pembaruan data secara berkala.

b. Budaya Ketergantungan

Budaya “*njagakke* bantuan sosial” di beberapa kelompok masyarakat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihilangkan. Perlu ada upaya edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk mengubah pola pikir masyarakat.

c. Koordinasi Lintas Instansi

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program bantuan PKH menyebabkan implementasi program tidak optimal. Misalnya, target bantuan di tingkat kabupaten sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik di tingkat desa.

3. Strategi Perbaikan

a. Validasi Data

Pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi terpadu yang dapat memverifikasi dan memperbarui data penerima secara real-time.

b. Pendampingan Intensif

Tingkatkan pelatihan dan pendampingan bagi penerima manfaat untuk memastikan bantuan digunakan secara produktif, misalnya untuk modal usaha kecil. Hal ini berlaku bagi penerima bantuan yang masih produktif dan masih bisa beraktifitas seperti orang normal pada umumnya.

c. Integrasi Dengan Program Lokal.

Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan ketrampilan atau akses modal usaha dapat diintegrasikan dengan program bantuan PKH untuk mendorong kemandirian ekonomi. Hal

ini juga dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.

4. Konsep 5G Mazhab Timoho Pada Refleksi Bantuan Sosial PKH Di Kalurahan Pagerharjo

Untuk memahami implementasi dan tantangan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Pagerharjo, analisis berbasis konsep 5G Mazhab Timoho digunakan. Konsep ini mencakup *Government, Governing, Governability, Governance, dan Governmentality*, Berikut adalah analisis rinci setiap dimensinya:

a. *Government* (Pemerintah)

Pemerintah sebagai institusi utama bertanggungjawab dalam pelaksanaan PKH. Regulasi seperti Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2009 memberikan dasar hukum pelaksanaan program ini. Di tingkat lokal, perangkat desa dan pemerintah kabupaten menjadi perpanjangan tangan dalam mengimplementasikan kebijakan nasional. Analisis Program pada program PKH dengan pendekatan *Government*:

- a) Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan strategis yang komperhensif. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi hambatan seperti validasi data yang tidak akurat.
- b) Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali kurang optimal, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan.

Maka relevansi pada dimensi ini adalah pemerintah menjadi aktor utama yang memastikan kebijakan diterapkan sesuai tujuan pengentasan kemiskinan.

b. *Governing* (Proses Pemerintahan)

Proses pemerintahan dalam konteks PKH mencakup identifikasi penerima manfaat, distribusi bantuan, dan evaluasi dampak. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses ini sering terkendala oleh data yang kurang update dan kurangnya pengawasan. Berikut ini merupakan analisis program PKH dengan pendekatan *Governing*:

- a) Proses validasi penerima PKH kurang terstruktur, menyebabkan banyaknya penerima yang tidak tepat sasaran.
- b) Distribusi bantuan dilakukan secara formal, tetapi seringkali tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai di tingkat lokal.
- c) Ketergantungan masyarakat pada bansos mengindikasikan perlunya pendekatan baru dalam pelaksanaan program.

Sehingga relevansinya adalah efektivitas proses governing sangat menentukan keberhasilan program dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

c. *Governability* (Kemampuan untuk Diperintah)

Governability merujuk pada kapasitas masyarakat untuk mengikuti aturan dan memanfaatkan bantuan secara produktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya "njagakke bansos" menjadi tantangan signifikan. Analisis dalam pendekatan *Governability* adalah sebagai berikut:

- a) Sebagian masyarakat kurang memahami pentingnya memanfaatkan bantuan untuk investasi jangka panjang, seperti pendidikan atau modal usaha.

- b) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dipengaruhi oleh akurasi data dan kejelasan distribusi bantuan.
- c) Beberapa kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas memerlukan pendampingan khusus agar dapat memanfaatkan bantuan secara optimal.

Relevansi dari pendekatan ini adalah tingkat *governability* mempengaruhi keberlanjutan dampak positif program bantuan sosial

d. *Governance* (Tata Kelola)

Tata kelola PKH melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat. prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif menjadi kunci tata kelola yang baik. Analisis pendekatan *Governance* sebagai berikut:

- a) Kurangnya transparansi dalam validasi data penerima menyebabkan munculnya kecemburuan sosial di masyarakat.
- b) Tidak adanya integrasi program pemberdayaan ekonomi lokal dengan PKH membuat penerima bantuan tetap tergantung pada bantuan sosial tanpa adanya kemandirian ekonomi.
- c) Kolaborasi antara perangkat desa dan pendamping PKH masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif.

Sehingga relevansi yang ditimbulkan adalah tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program.

e. *Governmentality* (Mentalitas Pemerintahan)

Konsep ini merujuk pada upaya pemerintah dalam mengatur cara berpikir masyarakat untuk memenuhi tujuan program. Dalam

konteks PKH, tujuan utamanya adalah mengubah perilaku masyarakat agar lebih mandiri dan produktif. Analisis dalam pendekatan *Governmentality* adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah menggunakan strategi seperti edukasi tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. Namun, budaya ketergantungan masyarakat pada bansos masih sulit dihilangkan.
- b) Kampanye kesadaran publik belum sepenuhnya efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif ke produktif.
- c) Pendekatan berbasis pemberdayaan lokal diperlukan untuk membangun kemandirian yang berkelanjutan.

Relevansi yang ditimbulkan adalah mentalitas penerima manfaat sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan dampak jangka panjang program PKH.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kondisi Eksisting Kesejahteraan Sosial

Kalurahan Pagerharjo memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang bervariasi. Mayoritas penduduk bergantung pada sektor agraris seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Namun, kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan rumah tangga miskin masih membutuhkan perhatian khusus. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari program bantuan yang ada.

2. Proses Pendistribusian Bantuan Sosial PKH

Proses pendistribusian PKH di Kalurahan Pagerharjo pada dasarnya sudah berjalan sesuai prosedur. Namun, masih terdapat kendala pada validasi data penerima, yang menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Selain itu, tantangan lain meliputi koordinasi antara pihak pendamping dan perangkat desa.

3. Pemanfaatan Bantuan Sosial PKH

Sebagian besar penerima manfaat menggunakan bantuan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Namun, masih ada penerima yang memanfaatkan bantuan untuk keperluan konsumtif, sehingga tujuan program untuk

meningkatkan kemandirian ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

4. Berdasarkan Analisis 5G Mazhab Timoho

- a) *Government*: Pemerintah telah menyediakan kerangka kebijakan yang jelas, tetapi implementasi di tingkat lokal memerlukan perbaikan dalam validasi data dan pengawasan.
- b) *Governing*: Proses distribusi bantuan sosial PKH perlu didukung dengan sistem pengawasan yang lebih baik dan berbasis teknologi.
- c) *Governability*: Budaya ketergantungan masyarakat memerlukan pendekatan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif.
- d) *Governance*: Tata kelola yang kolaboratif antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengatasi kecemburuan sosial dan memastikan keberlanjutan program.
- e) *Governmentality*: Mentalitas penerima manfaat dapat diubah melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan program pendidikan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah

- a) Peningkatan Validasi Data

Membangun sistem informasi terpadu untuk memastikan data penerima secara berkala. Melibatkan

perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam proses verifikasi dapat meningkatkan akurasi data.

b) Edukasi dan Sosialisasi

Adakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran penerima manfaat tentang pentingnya memanfaatkan bantuan secara produktif. Sosialisasi juga dapat dilakukan untuk mengurangi budaya ketergantungan.

c) Integrasi Program Pemberdayaan Ekonomi

Menggabungkan program bantuan PKH dengan program pemberdayaan ekonomi lokal seperti pelatihan ketrampilan atau pemberian akses modal usaha untuk mendorong kemandirian masyarakat.

2. Masyarakat

a) Pemanfaatan Bantuan secara Produktif

Manfaatkan bantuan untuk investasi jangka panjang, seperti pendidikan anak atau pengembangan usaha kecil, daripada hanya untuk kebutuhan konsumtif

b) Partisipasi Aktif

Berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.

3. Penelitian selanjutnya

a) Studi Longitudinal

Melakukan penelitian jangka panjang untuk mengevaluasi dampak sosial bantuan PKH terhadap penerimaan manfaat dari waktu ke waktu.

b) Eksplorasi Inovasi

Mengembangkan strategi baru untuk meningkatkan efektifitas program bantuan sosial, termasuk pemanfaatan teknologi untuk pendampingan dan pengawasan penerima manfaat.

Daftar Pustaka

- Ala, A. B. (1981). *Kemiskinan dan strategi memerangi kemiskinan*. Liberty.
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal pada masyarakat desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 131–154.
- Alvarez, K., van Leeuwen, E., Montenegro-Montenegro, E., & van Vugt, M. (2018). Empowering the poor: A field study of the social psychological consequences of receiving autonomy or dependency aid in Panama. *British Journal of Social Psychology*, 57(2), 327–345.
- Anantasari, M. L. (2012). Model refleksi Graham Gibbs untuk mengembangkan religiusitas. *Jurnal Teologi (Journal of Theology)*, 1(2), 195–208.
- Anggoro, & M.Toha. (2009). *METODE PENELITIAN*. universitas terbuka : Jakarta.
- Borah, A., Sahu, S., Srivastava, R. P., Singh, M., & Tyagi, D. B. (2024). Exploring the Economic Challenges Threatening Global Agriculture and Food Security. *Ecology, Environment & Conservation (0971765X)*, 30.
- BPS. (2023). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. *Badan Pusat Statistik*, 15, 1–90.
<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/60138aa2d7b9b78802991240/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di->

indonesia-tahun-2019.html

- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. *International Encyclopedia of Education*, 3(2), 37–43.
- Burton. (2000). Reflection: nursing's practice and education panacea? *Journal of Advanced Nursing*, 31(5), 1009–1017.
- Deswita, R., & Ariany, R. (2024). ANALISA DAMPAK PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH. *Journal Publicuho*, 7(3), 1303–1316.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial Bpnt Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196–202.
- Flick, U. (2018). *Triangulation in data collection*. The SAGE handbook of qualitative data collection.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. *Further Education Unit*.
- Haemmerli, M., Powell-Jackson, T., Goodman, C., Thabrany, H., & Wiseman, V. (2021). Poor quality for the poor? A study of inequalities in service readiness and provider knowledge in Indonesian primary health care facilities. *International Journal for*

Equity in Health, 20, 1–12.

Handayani, L., & Aliyudin, A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan (PKH). *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1).

Hendarso, E. S. (2011). Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah. In *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*.

Hikmawati, N. K. (2022). Community Empowerment Efforts. *Journal Intellectual Sufism Research (JISR)*, 4(2), 96–103.

Hotimah, S., & Koesbandrijo, B. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2).

Hubbs, D., & Brand, C. (2005). The Paper Mirror: Understanding Reflective Journaling. *Journal of Experiential Education*, 28, 60–71. <https://doi.org/10.1177/105382590502800107>

Ibrahim. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. ALVABETA.

Inkiriwang, I. E., & Effendy, K. (2024). Analysis of the Family Hope Program (PKH) implementation in addressing social welfare issues in Manado City, North Sulawesi Province. *Jurnal Tatapamong*, 88–101.

Irianta. (2022). *EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN KULON PROGO*. Nomporejo-

- Kulonprogo.Desa.Id. <https://nomporejo-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2022/12/16/evaluasi-penyelenggaraan-program-bantuan-sosial-di-kabupaten-kulonprogo#!>
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi program pemberdayaan sosial kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di kabupaten Pandeglang. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205.
- Iwan Hermawan, S. P., Izzaty Izzaty ST, M. E., Budiyaniti, E., Rafika Sari, S. E., Sudarwati, Y., IP, S., Teja, M., & Sos, S. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 131–145.
- Khabibi, A., & Rodiyah, I. (2024). Challenges and Solutions in the Implementation of the Family Hope Program. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3), 10–21070.
- Kolb, B. (1984). Functions of the frontal cortex of the rat: a comparative review. *Brain Research Reviews*, 8(1), 65–98.
- Kristanto, T., Rochmah, W., Prayoga, R., Mustaqim, T., Kamal, M., Sholik, M., Rahman, F., Kusumawati, A., & Hariyanto, M. (2024). Socialization and Assistance in the Implementation of Social Assistance for the Dalegan Village Community, Gresik Regency. *JUMADI: Jurnal Masyarakat Mengabdi*, 1, 55–61. <https://doi.org/10.62058/jumadi.v1i2.94>
- Lestari, R. W., & Talkah, A. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial

- PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 229–241.
- Magalhães, J., Ziebold, C., Evans-Lacko, S., Matijasevich, A., & Paula, C. S. (2024). Health, economic and social impacts of the Brazilian cash transfer program on the lives of its beneficiaries: a scoping review. *BMC Public Health*, 24(1), 2818.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Nadila, S. (2023). *Pengaruh Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sprovinsi Lampung Tahun 2017-2021 Dalam Pandangan Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Norman, M. O. H. N. (2020). *Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Partisipasi Pendidikan Dan Kesehatan Pada Program Keluarga Harapan (PKH)*. Universitas Hasanuddin.
- Osinski, A. (2020). Evaluating transition pathways beyond basic needs: A transdisciplinary approach to assessing food assistance. *Food Ethics*, 5(1), 19.
- Patton, M. Q. (1987). *How to use qualitative methods in evaluation* (Issue 4). Sage.
- Payapo, R. W., Leiwakabessy, E., & Assel, M. R. (2023). Kemiskinan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 79–88.

- Putra, Z. K., & Bawono, A. D. B. (2023). *Pengaruh Realisasi Belanja Kesehatan Belanja Pendidikan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Selu*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Qudus, D. H. R., Nurodin, I., & Nugroho, G. W. (2024). Effectiveness Of Distribution Of Social Assistance For The Family Hope Program In An Effort To Maintain Accountability Of Reports (Case Study Of Social Service Of Sukabumi Regency). *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 3(2), 507–522.
- Rahayu, S. L. (2012). ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN PROGRAM KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 16(3), 55–88.
- Rahmi, R. (2021). The Program Keluarga Harapan (PKH): For Poverty Reduction and Social Protection. *Proceedings of International Conference on Multidiciplinary Research*, 4(1), 26–32.
- Restianti, A. (2018). Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Program Keluarga Harapan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(2), 405–426.
- Santoso, R., Kornia, A., Indra, G. L., & Zaharah, R. (2024). THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS IN DETERMINING RECIPIENTS OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) ACCORDING TO MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS REGULATION NO. 1/2018

FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH TANFIDZIYAH:
PERAN APARATUR DESA DALAM MENENTUKAN
PENERIMA PROGRAM KELUA. *Constitutional Law Society*, 3(2),
145–161.

Silalahi, N. M., & Efendi, E. (2024). Strategi Komunikasi Publik Program Keluarga Harapan dalam Sosialisasi Bantuan Sosial di Kecamatan Rantau Selatan Labuhan Batu. *R Eslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(8), 4478 – 4488.
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i8.4879>

Siregar, S. B., Harahap, P. P., Sinaga, E. P., & Siregar, T. M. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 7(12).

Smith, J., Brown, L., & Jones, M. (2022). The Impact of Climate Change on Global Economic Stability. *Journal of Environmental Economics and Management*, 103(2), 102–120.
<https://doi.org/10.5296/ieb.v10i1.22277>

Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.

Stainback, S., & William, S. (1998). Understanding and Conducting Qualitative. *Research. Iowa: Kendall Publishing Company*.

Standsyah, R. E., & Ramadhan, D. S. (2024). Community Economic Empowerment for the Creation of Self-Sufficient Villages. *Help: Journal of Community Service*, 1(2), 148–156.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: IKAPI.

- Sumargo, B. (2020). *Teknik sampling*. Unj press.
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1059–1068.
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi kemiskinan dan strategi penanganannya: fakta kemiskinan masyarakat pesisir, kepulauan, perkotaan dampak dari pembangunan di Indonesia*. Intrans Publishing.
- Wahab, A., & Sudirman, S. (2023). Persoalan Kemiskinan Perkotaan. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 230–238.
- Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System I Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, With a New Prologue*.
- Widyastuti, S., & Ambarwati, S. (2020). Increasing the rural economy of village owned enterprises BUMDes Antajaya Bogor. *6th Annual International Conference on Management Research (AICMaR 2019)*, 224–228.
- Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah kabupaten ganyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.
- Yanti, H. Y. N., & Sukmana, H. (2024). Implementation of the Direct Cash Assistance Program for Village Funds. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3), 10–21070.

PANDUAN INTERVIEW:

a. Identitas Informance

2. Nama :
3. Jenis kelamin :
4. Usia :
5. Jabatan :
6. Status :
7. Masa kerja/pengabdian :

b. Tujuan Penelitian 1 dan rumusan masalah 1 (Kondisi Eksisting)

Untuk mengeksplorasi **kondisi eksisting** kesejahteraan sosial di Kalurahan Pagerharjo, berikut adalah beberapa sub pertanyaan yang dapat digunakan dalam wawancara mendalam:

1. Aspek Ekonomi:

- Bagaimana kondisi ekonomi rata-rata keluarga di Kalurahan Pagerharjo saat ini?
- Apa saja sumber pendapatan utama bagi masyarakat di sini?
- Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pendapatan antara keluarga satu dengan yang lain?

2. Akses terhadap Layanan Dasar:

- Bagaimana akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di Kalurahan Pagerharjo?
- Apakah fasilitas pendidikan di Kalurahan Pagerharjo memadai dan mudah diakses oleh anak-anak?
- Bagaimana kondisi infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan listrik di Kalurahan Pagerharjo?

3. Kondisi Perumahan:

- Bagaimana kondisi perumahan masyarakat di Kalurahan Pagerharjo?
- Apakah banyak rumah yang masih dalam kondisi tidak layak huni?
- Bagaimana akses masyarakat terhadap sanitasi yang baik?

4. Pekerjaan dan Lapangan Kerja:

- Apakah ada cukup lapangan kerja yang tersedia di Kalurahan Pagerharjo?
- Bagaimana tingkat pengangguran di kalurahan ini?
- Apakah ada program atau inisiatif yang mendukung penciptaan lapangan kerja?

5. Kesejahteraan Sosial:

- Bagaimana pandangan masyarakat mengenai kesejahteraan sosial mereka saat ini?
- Apakah masyarakat merasa cukup mendapatkan dukungan sosial dari pemerintah atau organisasi lainnya?
- Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial di Kalurahan Pagerharjo?

6. Masalah dan Tantangan:

- Apa masalah utama yang dihadapi masyarakat Kalurahan Pagerharjo terkait kesejahteraan sosial?
- Apakah ada kelompok atau individu tertentu yang paling rentan terhadap kemiskinan dan masalah sosial lainnya?

7. Program Bantuan dan Dukungan:

- Apakah ada program bantuan yang saat ini berjalan di Kalurahan Pagerharjo? Bagaimana dampaknya?

- Apakah masyarakat merasa program bantuan tersebut sudah efektif dan tepat sasaran?

c. Tujuan Penelitian 2 dan rumusan masalah 2 (proses pendistribusian)

Untuk mengeksplorasi proses pendistribusian bantuan sosial PKH di Kalurahan Pagerharjo, berikut adalah beberapa Sub pertanyaan yang dapat digunakan dalam wawancara mendalam:

1. Mekanisme Pendistribusian:

- Bagaimana proses pendistribusian bantuan sosial PKH di Kalurahan Pagerharjo dilakukan?
- Siapa saja yang terlibat dalam proses pendistribusian bantuan ini?

2. Proses Identifikasi dan Verifikasi Penerima:

- Bagaimana proses identifikasi calon penerima bantuan sosial PKH dilakukan?
- Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan?
- Bagaimana proses verifikasi data penerima untuk memastikan kelayakan mereka?

3. Jadwal dan Frekuensi Pendistribusian:

- Seberapa sering bantuan sosial PKH didistribusikan di Kalurahan Pagerharjo?
- Apakah ada jadwal khusus yang diikuti dalam pendistribusian bantuan ini?

4. Metode Pendistribusian:

- Apakah bantuan sosial PKH didistribusikan secara langsung atau melalui rekening bank?
- Bagaimana proses pengambilan bantuan oleh penerima?

5. Transparansi dan Akuntabilitas:

- Bagaimana transparansi dalam proses pendistribusian bantuan sosial PKH dijaga?
- Apakah ada mekanisme untuk mengawasi dan mengaudit pendistribusian bantuan ini?

6. Tantangan dan Hambatan:

- Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pendistribusian bantuan sosial PKH?
- Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?

7. Pengalaman Penerima:

- Bagaimana pengalaman penerima bantuan sosial PKH dalam proses penerimaan bantuan ini?
- Apakah ada masalah atau keluhan yang sering disampaikan oleh penerima bantuan?

8. Koordinasi dengan Pihak Terkait:

- Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa, dinas sosial, dan pihak lainnya dalam pendistribusian bantuan sosial PKH?
- Apakah ada peran aktif dari masyarakat dalam proses pendistribusian ini?

9. Evaluasi dan Umpan Balik:

- Apakah ada proses evaluasi rutin terhadap pendistribusian bantuan sosial PKH?
- Bagaimana umpan balik dari penerima dan masyarakat di Kalurahan Pagerharjo digunakan untuk memperbaiki proses pendistribusian?

10. Sosialisasi dan Informasi:

- Bagaimana informasi mengenai pendistribusian bantuan sosial PKH disampaikan kepada masyarakat?
- Apakah masyarakat merasa cukup mendapatkan informasi mengenai prosedur dan jadwal pendistribusian?

d. Tujuan Penelitian 3 dan rumusan masalah 3 (penggunaan bantuan sosial)

Untuk mengeksplorasi apakah penggunaan bantuan sosial PKH di Kalurahan Pagerharjo sudah tepat sasaran dan sesuai dengan manfaatnya, berikut adalah beberapa Sub pertanyaan yang dapat digunakan dalam wawancara mendalam:

1. Proses Penerimaan Bantuan:

- Bagaimana proses seleksi penerima bantuan sosial PKH di Kalurahan Pagerharjo?
- Apakah Anda mengetahui kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan?

2. Pengetahuan dan Pemahaman Penerima:

- Apakah penerima bantuan sosial PKH memahami tujuan dan manfaat dari bantuan yang mereka terima?
- Bagaimana penerima bantuan mengetahui informasi tentang bantuan sosial PKH?

3. Penggunaan Bantuan:

- Bagaimana bantuan sosial PKH biasanya digunakan oleh penerima di Kalurahan Pagerharjo?
- Apakah bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan?

4. Manfaat yang Dirasakan:

- Apa manfaat utama yang dirasakan oleh penerima dari bantuan sosial PKH?
- Apakah bantuan ini membantu meningkatkan kualitas hidup mereka? Jika iya, bagaimana caranya?

5. Tepat Sasaran:

- Menurut Anda, apakah bantuan sosial PKH telah diberikan kepada orang-orang yang paling membutuhkan?
- Apakah ada kelompok masyarakat yang menurut Anda lebih membutuhkan namun belum menerima bantuan?

6. Efektivitas Program:

- Apakah ada perubahan signifikan dalam kehidupan penerima setelah mendapatkan bantuan sosial PKH?

- Bagaimana bantuan sosial PKH mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial penerima?

7. Tantangan dan Kendala:

- Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian atau penggunaan bantuan sosial PKH?
- Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut menurut Anda?

8. Saran dan Perbaikan:

- Apa saran Anda untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dari bantuan sosial PKH?
- Apakah ada aspek tertentu dari program PKH yang menurut Anda perlu diperbaiki?

LAMPIRAN PROSES ANALISI DATA

Tema	Informan	Data Mentah	Reduksi data	Temuan
Aspek Ekonomi	Andar Kusnanto (Dukuh)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kondisi ekonomi masyarakat Pagerharjo setara walaupun ada yang kaya tetapi Sebagian kecil, yang miskin sekali juga sedikit sekali.</i> - <i>Sumber pendapatan sebagian besar dari pertanian, buruh tani jasa sebagian kecil</i> - <i>Perbedaan pendapatatan hampir sama tidak begitu jauh kecuali yang ASN/pegawai atay dengan yang karena sakit kronis dan tidak bisa beraktifitas</i> 	<p>- Kondisi Ekonomi Umum: Secara keseluruhan, kondisi ekonomi masyarakat Pagerharjo dapat dikatakan cukup setara. Meskipun terdapat beberapa individu yang tergolong kaya, jumlah mereka relatif kecil, dan demikian pula dengan mereka yang sangat miskin. Kebutuhan primer masyarakat umumnya dapat terpenuhi, terutama bagi mereka yang bersedia bekerja di sektor pertanian atau terlibat dalam kegiatan budidaya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan usaha dan kerja keras, masyarakat dapat mencapai</p>	<p>Kondisi ekonomi masyarakat Pagerharjo umumnya seimbang, dengan distribusi pendapatan yang tidak terlalu timpang meskipun ada sedikit yang kaya dan sangat miskin. Mayoritas pendapatan berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko ketidakstabilan. Perbedaan pendapatan terutama disebabkan oleh pekerjaan sebagai</p>
	Priyo Saptono (Dukuh)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kondisi ekonomi nasyarakat pagerharjo sebenarnya untuk kebutuhan primer sudah tercukupi jika mau kerja misalnya</i> 		

		<p>dengan bercocok tanam atau budidaya apapun kaitanya dengan ketahanan pangan, tetapi untuk warga yang jompo, sakit jiwa, disabilitas saya kira memang perlu bantuan, disabilitas saja ada yang bisa kerja.</p> <p>- Sumber pendapatan dari dulu bersumber dari pertanian, peternakan dan perkebunan</p> <p>- Perbedaan pendapatan setara tetapi mengingat memang harus diimbangi dengan pengetahuan walaupun ada yang kecukupan dan yang kekurangan tapi sebagian kecil saja.</p>	<p>tingkat kesejahteraan yang memadai.</p> <p>- Sumber Pendapatan: Mayoritas pendapatan masyarakat Pagerharjo berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai buruh tani dan pedagang. Sektor-sektor ini telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sejak lama. Di samping itu, pekerjaan sebagai ASN atau pegawai juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan sering kali menjadi pembeda dalam tingkat pendapatan di antara masyarakat.</p>	<p>ASN/pegawai dan kepemilikan lahan pertanian. Kelompok rentan seperti jompo, penyandang disabilitas, dan mereka yang mengalami gangguan jiwa memerlukan perhatian khusus. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Meskipun stabil, tantangan dan peluang</p>
--	--	---	--	---

	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pagerharjo masuk dalam kategori miskin di kapanewon samigaluh dan banyak warga yang berpenghasilan rendah.</i> - <i>Sumber pendapatan dari hasil tani dan buruh</i> - <i>Menurut saya tidak ada perbedaan yang mencolok ya rata rata, kalo ada itu karena pegawai atau ASN</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan Pendapatan: Perbedaan pendapatan di antara masyarakat Pagerharjo tidak terlalu mencolok, kecuali antara petani dan pegawai/ASN. Faktor lain yang mempengaruhi perbedaan pendapatan adalah kepemilikan lahan pertanian. Mereka yang memiliki lahan pertanian yang luas cenderung memiliki ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki lahan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kepemilikan sumber daya alam memainkan peran penting 	perlu diatasi untuk kesejahteraan berkelanjutan.
	JOKO WULAN TORO (Ketua Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kondisi lebih baik banyak peningkatan ekonomi, yg membedakan ekonomi agak jauh antara petani dan pegawai/ASN</i> - <i>Mayoritas petani tetapi ada juga buruh tani dan pedagang</i> - <i>Setara, Bagi warga petani yang terbatas kepemilikan lahan untuk pertanian</i> 		

		<p><i>memang hanya buruh tani/srabutan yang bisa dilakukan, bagi warga yang kepemilikan tanahnya luas ekonominya cukup karena dari hasil pertanian/perkebunan</i></p>	<p>dalam menentukan kesejahteraan ekonomi.</p> <p>- Tantangan dan Kebutuhan: Masyarakat yang tergolong jompo, mengalami gangguan jiwa, dan disabilitas memerlukan perhatian dan bantuan khusus untuk memastikan mereka dapat hidup dengan layak. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk pemberdayaan masyarakat agar dapat mengelola keuangan dengan lebih efisien. Meskipun pendapatan mungkin merata, perbedaan dalam cara pengelolaan keuangan dapat mempengaruhi kesejahteraan individu, di</p>	
	ANANIA S YUNIARTO (Anggota Bpkal)	<p>- <i>Kondisi ekonomi cukup baik walaupun demikian masih perlu bantuan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat.</i></p> <p>- <i>Sebagian besar mata pencahariannya sebagai buruh termasuk buruh pertanian.</i></p> <p>- <i>Pendapatan sebenarnya merataimbang hanya saja cara mengatur keuangan yang beda-beda ada efisien yang boros sehingga walaupun punya pendapatan ya</i></p>		

		<i>tetap kekurangan/miskin.</i>	mana beberapa orang mungkin lebih efisien sementara yang lain cenderung boros. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.	
Aspek Layanan Dasar	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Layanan dasar kesehatan cukup baik karena dekat dengan puskesmas samigaluh 2, dan juga ada ambulan desa</i> - <i>Fasilitas pendidikan juga sangat cukup tidak kesulitan karena satu kalurahan ada 6 paud 5 SD/ sederajat, 1 SMP dan 1 SMK</i> - <i>Infrastruktur cukup baik jalan utama sampai jalan lingkungan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Kesehatan: Layanan kesehatan di Pagerharjo dinilai cukup baik dengan adanya Puskesmas Samigaluh 2 dan ambulans desa. Fasilitas ini memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu, adanya BPJS membantu masyarakat untuk mendapatkan 	Layanan kesehatan diakses dengan baik melalui keberadaan Puskesmas Samigaluh 2 dan ambulans desa, serta dukungan dari BPJS yang memastikan masyarakat dapat memperoleh perawatan tanpa kendala. Fasilitas pendidikan juga lengkap,

		<p><i>cukup terkonsumsi, air bersih cukup ada pamsimas dan sumber-sumber mata air yang lain, listrik hampir semua terjangkau listrik kecuali yang kelurahan baru ada beberapa yang belum terpasang.</i></p>	<p>perawatan kesehatan tanpa alasan untuk tidak memeriksakan kesehatan mereka.</p> <p>- Fasilitas Pendidikan: Fasilitas pendidikan di Pagerharjo memadai, dengan adanya berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMK. Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka cukup tinggi, meskipun ada kecenderungan untuk memilih sekolah swasta yang mungkin memerlukan jarak tempuh lebih jauh.</p> <p>- Infrastruktur: Infrastruktur di Pagerharjo umumnya baik, dengan jalan utama dan jalan lingkungan</p>	<p>mencakup berbagai jenjang dari PAUD hingga SMK, dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan anak-anak mereka, meskipun ada kecenderungan untuk memilih sekolah swasta. Infrastruktur, termasuk jalan, air bersih, dan listrik, umumnya dalam kondisi baik, meskipun masih ada tantangan dalam pengelolaan air bersih dan penyediaan listrik untuk beberapa keluarga baru. Secara</p>
	Priyo Saptono	<p>- Untuk layanan kesehatan cukup bagus karena dengan layanan terdekat yaitu puskesmas sماغالuh 2, dan juga dengan BPJS semua dapat terakfer dan tak ada alasan untuk tidak periksa kesehatan.</p> <p>- Fasilitas pendidikan cukup memadai tidak kesulitan karena tersedianya fasilitas mulai dari dasar</p>		

		<p>sampai SMA ada di pagerharjo, bahkan kesadaran untuk sekolah cukup tinggi dan berupaya bagaimana caranya untuk bisa bersekolah.</p> <p>- <i>Insfrastuktur cukup baik jalan utama sampai jalan lingkungan cukup terkon disi, air bersih cukup ada pamdes, pamsimas dan sumber-sumber mata airu yang lain, listrik hampir semua terjangkau listrik kecuali yang keluarga baru ada beberapa yang belum terpasang.</i></p>	<p>yang terpelihara. Air bersih tersedia melalui PAMDes, PAMSIMAS, dan sumber mata air lainnya, meskipun ada kekurangan saat musim kemarau. Hampir semua rumah tangga teraliri listrik, kecuali beberapa keluarga baru yang belum terpasang.</p>	<p>keseluruhan, meskipun layanan dasar di Pagerharjo sudah cukup baik, perhatian perlu diberikan pada pengelolaan dan aksesibilitas untuk memastikan semua masyarakat dapat menikmati layanan tersebut secara optimal.</p>
	Supanto (Kamituwa)	<p>- <i>Untuk layanan kesehatan tidak masalah karena ada puskesmas dan puskesmas pembantu dan ambulan desa.</i></p>		

		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pensisikan tidak masalah cukup baik - Infrastruktur cukup baik ada beberapa ruas jalan kabupaten rusak air juga tidak masalah kecuali jika kemarau ada yang kekurangan, listrik ada beberapa yang masih belum punya. 		
	JOKO WULAN TORO (Ketua Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah bagus dengan tersedianya fasilitas layanan puskesmas serta penyuluhan² pada masyarakat. - Bagus lengkap mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK, namun masyarakat cenderung menyekolahkan di swasta beda dengan tempo dulu, dan harus pergi jauh juga. 		

		<ul style="list-style-type: none"> - Bagus dengan adanya dana desa jalan, air bersih , listrik sudah banyak terbangun serta bisa dinikmati masyarakat. 		
	ANANIA S YUNIARTO (Anggota Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah cukup dengan tersedianya fasilitas layanan puskesmas walaupun ada beberapa pekerja beresiko tetapi belum punya jaminan keselamatan. - Tingkat Pendidikan masy cukup bagus termasuk fasilitas Pendidikan tersedia mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK, - Pembangunan Infrastruktur jalan sudah bagus, air bersih sudah tersedia tinggal pengelolaannya yang perlu ditertibkan, 		

		<i>listrik semua teraliri listrik.</i>		
Kondisi perumahan	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kondisi perumahan mayoritas cukup bagus dan layak karena swadaya sendiri maupun subsidi dari pemerintah/pihak swasta.tetapi ada sebagian kecil yang perlu perbaikan.</i> - <i>Ada sebagian kecil rumah dalam kondisi tidak layak huni karena memang belum ada niat maupun kemampuan swadaya yang kurang.</i> - <i>Sanitasi terhadap lingkungan cukup terkondisi sudah jarang hampir tidak ada yang BAB sembarangan rata-rata sudah punya</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Umum Perumahan: Mayoritas perumahan di Pagerharjo dalam kondisi baik dan layak huni, berkat swadaya masyarakat serta subsidi dari pemerintah dan pihak swasta. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil rumah yang masih memerlukan perbaikan. - Rumah Tidak Layak Huni: Hanya ada satu atau dua rumah yang dinyatakan tidak layak huni, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemilik dalam 	Mayoritas perumahan berada dalam kondisi baik dan layak huni, berkat dukungan swadaya masyarakat serta subsidi dari pemerintah dan pihak swasta. Meskipun terdapat sebagian kecil rumah yang masih memerlukan perbaikan, jumlahnya relatif sedikit dan sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemilik dalam memperbaiki kondisi rumah. Selain itu, sanitasi lingkungan di daerah ini cukup baik,

		<i>jamban/toilet sendiri.</i>	memperbaiki kondisi rumah mereka. Beberapa rumah yang tidak layak huni juga terkait dengan status kepemilikan tanah, di mana pemilik tidak dapat membangun rumah yang lebih baik karena hanya menumpang.	dengan hampir semua rumah dilengkapi dengan jamban atau toilet, sehingga kasus buang air besar sembarangan hampir tidak ada. Secara keseluruhan, meskipun kondisi perumahan di Pagerharjo cukup memuaskan, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perawatan rumah dan status kepemilikan tanah.
	Priyo Saptono	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hampir semua kondisinya bagus-bagus, tetapi ada sebagian kecil perlu perbaikan</i> - <i>ada satu atau dua rumah saja yang belum layak huni karena kesadarannya kurang dalam pengkondisian rumahnya</i> - <i>Sanitasi terhadap lingkungan cukup terkondisi sudah jarang hampir tidak ada yang BAB sembarangan rata-rata sudah punya jamban/toilet sendiri</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanitasi Lingkungan: Sanitasi lingkungan di Pagerharjo cukup baik, dengan hampir tidak ada kasus buang air besar sembarangan. Sebagian besar rumah sudah dilengkapi dengan jamban atau toilet sendiri, menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 	
	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kondisi perumahan rata-rata sudah bagus banyak subsidi RTLH</i> - <i>Asa beberapa rumah tidak layak huni tetapi hanya sebagian kecil saja.</i> 		

	JOKO WULAN TORO (Ketua Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak bantuan bedah rumah yang diberikan dan kecil sekali perumahan yang masih tidak layak, hal itu terjadi karena hanya numpang dan bukan tanah miliknya sehingga tidak bisa terbangun lebih layak. - Sangat sedikit itu juga memang belum niat, dan karena sebab tertentu, missal jompo sebatangkara, dll. - Sanitasi lingkungan mayoritas cukup sehat. 	sanitasi yang sehat.	
	ANANIAS YUNIARTO (Anggota Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi perumahan masy cukup bagus, - Ada tetapi Sebagian kecil saja, dan karena pemahamannya yang selalu menunggu bantuan sehingga rumah 		

		<i>dibiarkan rusak biar diberikan bantuan.</i>		
Pekerjaan dan Lapangan Kerja	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Banyak lapangan kerja dari buruh tani, tukang bangunan, angkut kayu, buruh perkebunan saat panen cengkih, karena masih banyak mendatangkan tenaga dari luar kalurahan</i> - <i>Sebenarnya tingkat pengangguran boleh dibilang tidak ada/kecil, yang nganggur itu biasanya karena maslas kerja, gengsi dengan pekerjaan kasar, dan karena masih mengandalkan orang tuanya.</i> - <i>Banyak inovasi yang diciptakan diantaranya sector pariwisata, perkebunan kopi dari hulu</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaa n Lapangan Kerja: Terdapat banyak lapangan kerja di Pagerharjo, terutama di sektor buruh tani, tukang bangunan, angkut kayu, dan buruh perkebunan, terutama saat panen cengkih. Selain itu, sektor pariwisata, UMKM, dan jasa juga mulai berkembang, meskipun tidak semua masyarakat memanfaatk n peluang tersebut. - Tingkat Pengangguran: Tingkat penganggura n di Pagerharjo tergolong 	Ketersediaa n lapangan kerja di daerah ini cukup baik, terutama di sektor buruh tani, tukang bangunan, dan perkebunan, serta dalam bidang pariwisata dan UMKM. Tingkat penganggura n tergolong rendah, meskipun ada individu yang tidak bekerja karena gengsi terhadap pekerjaan kasar atau ketergantun gan pada orang tua. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam memastikan semua

		<i>sampai hilir, UMKM, jasa dan lain lain.</i>	rendah, dengan banyak individu yang tidak bekerja disebabkan oleh faktor gengsi terhadap pekerjaan kasar atau ketergantungan pada orang tua.	masyarakat dapat memanfaatkan peluang kerja yang ada secara optimal. Inovasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, namun perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor. Secara keseluruhan, meskipun kondisi pekerjaan di Pagerharjo cukup menjanjikan, perhatian perlu diberikan untuk
	Priyo Saptono	<ul style="list-style-type: none"> - <i>sebenarnya pengaruh gengsi saja, banyak lapangan kerja dari buruh tani, tukang bangunan, angkat kayu, buruh perkebunan.</i> - <i>Sebenarnya pengangguran tidak ada/ kecil, karena malas kerja, gengsi dengan pekerjaan didesa saja.</i> - <i>Banyak inovasi yang diciptakan diantaranya kalau dari pemerintah yaitu padat karya, yang lain sekteor pariwisata, pertanian dan perkebunan.</i> 	<p>Meskipun ada beberapa yang menganggur, mereka biasanya memiliki lahan kerja di sektor pertanian dan perkebunan.</p> <p>- Inovasi dan Pelatihan: Banyak inovasi yang muncul, termasuk program padat karya dari pemerintah dan pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.</p>	
	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tingkat pengangguran ada tetapi kecil, tidak 100% nganggur karena punya lahan kerja seperti</i> 		

		<p><i>pertanian dan perkebunan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ada walaupun tidak bisa mengkafer semua pengangguran</i> 		
	JOKO WULAN TORO (Ketua Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Lapangan kerja juga cukup tersedia, seperti kepariwisataan, umkm, tetapi memang tidak semuanya menangkap peluang tersebut, butuh motivasi terus serta pendampingan, pelatihan.</i> - <i>Bisa dibilang tidak ada pengangguran walaupun kerjanya ya serabutan dan situasional kadang kerja kadang libur</i> - <i>Sering diselenggarakan pelatihan2, serta penciptaan lapangan kerja baik wisata, pertanian secara luas dan jasa.</i> 	<p>Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata, pertanian, dan jasa, meskipun ada tantangan dalam memastikan semua masyarakat dapat terlibat secara rutin.</p>	<p>mengatasi hambatan yang menghalangi partisipasi aktif masyarakat.</p>

	ANANIA S YUNIAR TO (Anggota Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan kerja juga cukup tersedia, diberbagai sector mulai dari buruh tani, wisata, jasa dll - Pengangguran sebenarnya tidak ada, walaupun tidak bisa rutin, - Pelatihan² pendampingan ukm 		
Kesejahteraan Sosial	JOKO WULAN TORO (Ketua Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesejahteraan bagi masyarakat sudah lebih baik hanya karena kebutuhan dan keinginan yang selalu bertambah dan macam-macam, tetapi tidak diiringi dengan pendapatan yang cukup sehingga kadang kala menjadi problem. Bantuan itu penting tetapi jika didominasi oleh bantuan, tidak mendidik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Kesejahteraan: Kesejahteraan masyarakat di Pagerharjo telah meningkat, namun masih terdapat tantangan karena kebutuhan dan keinginan yang terus bertambah tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Hal ini sering menimbulkan masalah dalam 	Kesejahteraan masyarakat telah mengalami peningkatan, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kebutuhan dan keinginan yang terus bertambah tanpa diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Banyak bantuan dari pemerintah dan swasta

		<p><i>masy untuk mengembangk an usaha.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cukup banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta.</i> - <i>Partisipasi masy, cukup bagus dengan adanya padat karya, justru ada sedikit dampak kurang baik dengan adanya bantuan yang diberikan pada masyarakat, karena kadang dijumpai warga yang malas dan jarang berkecimpung dalam kegiatan sosial masyarakat malah dapat bantuan, ada bagian masy yang semangatnya timbul jika dimotivasi dengan bantuan.</i> 	<p>kehidupan sehari-hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan dan Ketergantungan: Banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan swasta, tetapi ada kekhawatiran bahwa ketergantungan pada bantuan tersebut dapat menghambat inisiatif masyarakat untuk mengembangkan usaha. Beberapa warga cenderung malas dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, meskipun mereka menerima bantuan. - Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam program 	<p>yang diterima masyarakat, namun ketergantungan pada bantuan tersebut dapat menghambat inisiatif untuk mengembankan usaha dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Meskipun partisipasi masyarakat dalam program padat karya cukup baik, masih terdapat segelintir individu yang kurang bersemangat . Secara keseluruhan, pencapaian kesejahteraan sosial di Pagerharjo menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada sebagian kecil</p>
	ANANIA S YUNIAR	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sebenarnya sudah baik tinggal</i> 		

	TO (Anggota Bpkal)	<p><i>Sebagian kecil yang belum sejahtera, walaupun Namanya kesejahteraan tidak ada batas maksimalnya. Kesejahteraan sulit dicapai karena dengan berkembangnya beban2 hidup yang semakin banyak dan semakin banyak keinginan yang ingin dicapai.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cukup banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta justru masy menjadi ketergantungan.</i> - <i>Partisipasi masy cukup tinggi, walaupun ada beberapa gelintir orang yang pemalas</i> 	<p>padat karya dan kegiatan sosial cukup baik, meskipun masih ada segelintir individu yang kurang bersemangat. Kesejahteraan sosial di Pagerharjo menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum sejahtera, dan pencapaian kesejahteraan yang optimal tetap menjadi tantangan.</p>	<p>masyarakat yang belum sejahtera, dan upaya perlu dilakukan untuk mengatasi ketergantungan pada bantuan serta meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial.</p>
Masalah dan tantangan	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Disektor pertanian disaat panen bermasalah dengan harga jual sehingga</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah di Sektor Pertanian: Di sektor pertanian, masalah 	<p>Daerah ini menghadapi beberapa isu penting yang mempengaruhi</p>

		<p><i>tidak menutup dengan ongkos tenaganya, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.</i></p> <p>- <i>Yang paling rentan terhadap kemiskinan dan masalah sosial adalah masyarakat yang tidak bisa aktivitas kerja karena penyakit kronis, dan masalah yang tidak punya lahan kerja daya pikirnya kurang dan yang malas.</i></p>	<p>muncul saat panen terkait harga jual yang tidak sebanding dengan ongkos tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.</p> <p>- Kelompok Rentan: Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan dan masalah sosial meliputi:</p> <p>- Penyandang disabilitas</p> <p>- Perempuan yang rawan secara sosial ekonomi</p> <p>- Jompo dan janda yang tidak memiliki tulang punggung keluarga</p> <p>- Individu dengan penyakit kronis</p> <p>- Masyarakat yang tidak</p>	<p>kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian mengalami kesulitan dengan harga jual yang tidak sebanding dengan ongkos tenaga kerja, mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan individu dengan penyakit kronis, juga menghadapi tantangan besar. Ketergantungan pada bantuan dari pemerintah dapat menghambat inisiatif mandiri, sementara beban hidup yang meningkat</p>
	Priyo Saptono	<p>- <i>Sebenarnya masalah mental saja yang tidak pernah merasa cukup, yang lain sudah banyak bantuan</i></p> <p>- <i>Yang paling rentan adalah masyarakatan yang tidak bisa aktivitas kerja karena penyakit kronis,</i></p>	<p>- Perempuan yang rawan secara sosial ekonomi</p> <p>- Jompo dan janda yang tidak memiliki tulang punggung keluarga</p> <p>- Individu dengan penyakit kronis</p> <p>- Masyarakat yang tidak</p>	<p>Ketergantungan pada bantuan dari pemerintah dapat menghambat inisiatif mandiri, sementara beban hidup yang meningkat</p>

		<i>disabilitas dan masyarakat yang tidak punya lahan kerja dan yang malas.</i>	memiliki lahan kerja dan kurang motivasi.	tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan.
	Supanto (Kamituwa)	- <i>Yang paling rentan adalah masyarakat penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, jompo, janda yang tidak punya tulang punggung dalam keluarga, dan masyarakat yang tidak punya lahan kerja daya pikirnya kurang dan yang malas.</i>	- Ketergantungan pada Bantuan: Meskipun banyak bantuan yang diberikan, ketergantungan pada bantuan tersebut dapat menjadi masalah jika bantuan berhenti. Masyarakat terbiasa dengan cara instan dalam mendapatkan pendapatan, yang dapat menghambat inisiatif untuk bekerja.	Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih terarah dan berkelanjutan dari berbagai pihak.
	JOKO WULAN TORO (Ketua Bpkal)	- <i>Kesejahteraan agak terkendala dengan minimnya sumber pendapatan masyarakat, saat ini masih banyak bantuan yang diberikan tetapi jika bantuan berhenti tentu akan menjadi</i>	- Beban Hidup dan Pendapatan: Beban hidup yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan, sehingga individu yang tidak mampu	

		<p><i>masalah kesejahteraan juga, karena terbiasa dengan yang instan2 hari ini kerja hari itu dapat uang,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Individu yang paling rentan yaitu jompo sakit-sakitan dan tidak bisa beraktifitas, dan warga dengan keterbatasan mental.</i> 	bekerja, terutama yang sakit permanen dan tidak memiliki dukungan keluarga, menghadapi tantangan besar.	
	ANANIAS YUNIARTO (Anggota Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Beban hidup makin banyak tetapi pendapatan berjalan lambat.</i> - <i>Orang2 yang sudah tidak mampu kerja, sakit permanen dan tidak ada anggota keluarga yang menopang beban hidupnya</i> 		
Program Bantuan dan Dukungan	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Program bantuan yang saat ini berjalan adalah PKH, Rasda, RTLH, UKM Berupa Peralatan/Mo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Bantuan yang Berjalan Program bantuan seperti PKH, Rasda, 	Program bantuan dan dukungan di Pagerharjo, seperti PKH, Rasda, dan RTLH, telah meningkatka

		<p><i>dal, Perikanan, Peternakan, perkebunan dll. dampaknya meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi beban kebutuhan hidup, menciptakan lapangan kerja, tetapi dampak negatifnya yang berupa barang habis pakai menjadi ketergantungan.</i></p> <p>- <i>Bagi penerima merasa tepat dan efektif tetapi secara umum, ada bantuan yang kurang tepat dan kurang efektif karena habis pakai kalau tidak dibantu terus ya tidak ada, lain kalau berupa bantuan peralatan kerja/modal kerja akan</i></p>	<p>RTLH, dan dukungan untuk UKM, perikanan, dan peternakan telah meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Namun, ada dampak negatif berupa ketergantungan pada barang habis pakai. Bantuan berupa peralatan/modal lebih efektif sebagai sumber pendapatan.</p> <p>- Kebutuhan akan Bantuan Berkelanjutan</p> <p>Bantuan yang lebih tepat adalah yang bersifat berkelanjutan, bukan habis pakai. Diperlukan edukasi mental agar</p>	<p>n daya beli dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menyebabkan ketergantungan pada barang habis pakai. Diperlukan bantuan yang berkelanjutan dan edukasi mental agar masyarakat tidak terus bergantung. Evaluasi efektivitas bantuan, seperti BLT dan BPNT, penting untuk memastikan dampak positif dan menghindari kecemburuan sosial. Bantuan harus bersifat memberdayakan, bukan memanjakan, dengan pemilahan</p>
--	--	---	--	--

		<i>menjadi sumber pendapatan.</i>		
	Priyo Saptono	- <i>Sebenarnya lebih tepatnya bantuan kerja berkelanjutan bukan bantuan yang habis pakai, dan perlunya edukasi mental agar tidak menjagakan bantuan terus.</i>	- Dampak Sosial dari Bantuan Program bantuan dapat menyebabkan ketergantungan dan kecemburuan sosial. Meskipun banyak bantuan yang tepat, perlu evaluasi untuk yang kurang efektif.	sasaran yang tepat. Fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan ketergantungan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.
	Supanto (Kamituwa)	- <i>Seperti PKH, rasda, RTLH, bantaun ketahanan pangan, ukm berupa peralatan/mod al, perikanan, peternakan, perkebunan dll. Dampaknya ketergantungan, kecemburuan sosial, bantuan habis pakai kalau habis ya miskin lagi.</i> - <i>Banyak yang tepat tetapi juga ada yang kurang tepat dan perlu dievaluasi.</i>	- Efektivitas Bantuan Bantuan seperti BLT DD, RTLH, dan BPNT kurang efektif karena tidak mendidik masyarakat dan dapat membuat mereka malas. Diperlukan identifikasi permasalahan untuk memberikan bantuan yang	
	JOKO WULAN TORO	- <i>Ada seperti BLT DD, RTLH, BPNT, PKH, bantuan</i>		

	(Ketua Bpkal)	<p><i>kelompok usaha dll..</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bantuan itu kurang efektif tidak mendidik masyarakat, tetapi membuat masyarakat malas sehingga menjagakan bantuan tidak ada upaya untuk kerja keras. Butuh identifikasi permasalahan tidak semua harus sama bantuannya, tetapi menurut yang dibutuhkan.</i> 	<p>sesuai dengan kebutuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat Bantuan yang baik harus bersifat memberdayakan masyarakat, bukan memanjakan, dengan pemilahan sasaran yang tepat. 	
	ANANIAS YUNIARTO (Anggota Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>BLT, BPNT, PKH, BANSOS USAHA, BANTU UKM dll</i> - <i>Sebenarnya bantuan itu bagus tetapi bantuan yang sifatnya memberdayakan masyarakat bukan memanjakan masyarakat, perlu pemilahan sasaran.</i> 		
		-	-	
Mekanisme	Supanto (Kamituwara)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bantuan PKH ada yang berujud uang</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Pendistribusian 	bantuan disalurkan dalam

pendistribusian		<p><i>tunai dan pangan, kalau uang lewat bank/kantor pos, kalo pangan ya lewat e warung.</i></p> <p>- <i>Yang terlibat dalam proses pendistribusian bantuan Ya pendamping PKH</i></p>	<p>Bantuan PKH disalurkan dalam bentuk uang tunai dan pangan. Uang tunai diberikan melalui bank atau kantor pos, sedangkan bantuan pangan disalurkan melalui e-warung. Pendamping PKH berperan penting dalam proses pendistribusian ini.</p> <p>- Proses Pendistribusian</p> <p>Bansos PKH diberikan secara non-tunai oleh Kementerian Sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Penerima dapat</p>	<p>bentuk uang tunai dan pangan, dengan uang tunai melalui bank atau kantor pos dan pangan melalui e-warung, di mana pendamping PKH berperan penting. Bansos PKH diberikan secara non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan ditransfer ke rekening penerima, yang dapat memeriksa saldo di agen atau ATM, khususnya melalui BNI Agen 46 di Kabupaten Kulon Progo. Namun, terdapat tantangan dalam pendataan dan penggunaan</p>
	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	<p>- <i>Bansos pkh diberikan oleh kemensos secara non tunai, atau ditranfer melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) / atm masing2 pengurus PKH</i></p> <p>- <i>Karena sifatnya mandiri, sehingga KPM tersebut jika sudah ada informasi bansos turun ke rekening masing2 sehingga KPM tersebut akan mengecek secara langsung di agen ataupun</i></p>	<p>Bansos PKH diberikan secara non-tunai oleh Kementerian Sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Penerima dapat</p>	

		<p>di atam, memastikan uang sudah turun dan akan diambil.</p> <p>- Pendistribusiannya secara langsung melalui rekening bank BNI Agen 46 khususnya di Kab Kulon Progo</p> <p>- Dana bantuan diambil melalui agen ataupun ATM</p>	<p>memeriksa saldo di agen atau ATM untuk memastikan dana telah tersedia. Pendistribusiannya dilakukan melalui rekening bank, khususnya BNI Agen 46 di Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>- Tantangan dalam Pendistribusiannya</p> <p>Meskipun sistem transfer telah diterapkan, terdapat tantangan dalam pendataan dan penggunaan bantuan. Ada kemungkinan penerima yang tidak sesuai dan penarikan dana oleh anggota keluarga lain. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan</p>	<p>bantuan, seperti kemungkinan penerima yang tidak sesuai dan penarikan dana oleh anggota keluarga lain. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam sistem pendataan dan mekanisme pendistribusiannya untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas bantuan PKH.</p>
	Andar Kusnanto	<p>- Bantuan PKH lewat rekening Bank langsung ke penerima.</p> <p>- Informasi dari pendamping, pihak bank dan penerima.</p>		
	Agustinus Sulisty (Tokoh Masyarakat)	<p>- Ke PKH dari awal memang diberikan barang atau dalam bentuk uang dan sekarang sudah melalui transfer; kalo pendistribusiannya sudah sesuai, yang lebih tepat itu dalam hal pendataan harus diperbaharui,</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa hal yang harus disampaikan, uang yang melalui tf, bisa jadi yang menrima tf tidak bisa menarik, yang menarik anaknya, apakah anaknya menyampikan atau tidak, tidak semua itu tidak tercapai dengan sistem dnegan tf, tapi di lapangan masih dijumpai seperti itu - Bisa di dimungkinkan bahwa bantuan pkh ini salah digunakan, karena yang ngambil keluarga yang lain, 	dalam pendataan untuk memastikan bantuan digunakan dengan tepat.	
Proses Identifikasi dan Verifikasi Penerima	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - Tehnisnya kami tidak tahu, hanya dilapori hasilnya dari pendamping PKH - Tidak Tahu - Pendamping PKH kalo kami 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Validasi Data penerima sudah tersedia dari Kementerian Sosial. Validasi dilakukan di 	Validasi dilakukan dengan memeriksa KTP dan KK untuk memastikan kelayakan penerima berdasarkan

		<i>tidak tahu persis</i>	desa dengan memeriksa KTP dan KK untuk memastikan kelayakan penerima, termasuk kategori seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan disabilitas.	kriteria seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan disabilitas, dengan keputusan akhir ditentukan oleh pusat.
	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bnba sudah ada dari kemensos</i> - <i>Diundang ke desa untuk dilakukan validasi kpm sesuai dengan ktp dan kk memastikan dia sendiri sesuai bnba atau bukan, dilihat apakah ada kategori di dalam keluarga tersebut (anak sekolah, balita,ibu hamil,lansia,disabilitas)</i> - <i>Jika layak tidak layak akan ditentukan oleh pusat</i> - <i>Kriteria masyarakat miskin tidak mampu</i> - <i>Masuk kedalam kategori (anak sekolah, balita,ibu hamil,lansia,disabilitas)</i> - <i>Proses verifikasi biasanya</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Konsultasi Proses verifikasi melibatkan koordinasi antara pendamping, kamituwa, dan dukuh setempat untuk memastikan data yang akurat. - Wawancara Calon Penerima Pendamping melakukan wawancara dengan calon 	Proses ini memerlukan koordinasi antara pendamping, kamituwa, dan dukuh setempat. Pendamping juga melakukan wawancara dengan calon penerima terdaftar, tetapi usulan dari dukuh tidak diterima jika calon penerima tidak ada dalam daftar. Temuan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemahaman dan

		<i>pendamping akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kamituo dan juga bapak ibu dukuh di wilayah tersebut</i>	penerima yang sudah terdaftar. Usulan dari dukuh tidak dapat diterima jika calon penerima tidak ada dalam daftar yang telah ditentukan.	pelaksanaan proses verifikasi.
	Andar Kusnanto	- Dilakukan oleh pendamping ke penerima. - Tidak tahu. - Pendamping wawancara ke calon penerima yang sudah masuk dalam daftar. Walaupun ada usulan masukan dari dukuh tetap tidak bisa kalau tidak ada dalam daftar.		
Jadwal dan Frekuensi Pendistribusian	Supanto (Kamituwa)	- <i>Tiap Bulan</i> - <i>Yang tahu pendamping ke penerima</i>	- Frekuensi Pendistribusian Pendamping PKH menjelaskan bahwa mulai tahun 2024, mekanisme pendistribusian untuk	Frekuensi pendistribusian bantuan PKH yang ditetapkan setiap dua bulan untuk pemegang KKS dan setiap tiga bulan untuk
	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	- <i>Mulai di tahun 2024 ini mekanisme untuk yang pemegang kks per 2 bulan sekali</i>		

		<ul style="list-style-type: none"> - Yang melalui kantor pos 3 bulan sekali - Tidak ada jadwal khusus hanya saja setiap per 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali bantuan turun, tetapi tidak menentu untuk tanggalnya 	<p>pemegang KKS dilakukan setiap 2 bulan sekali, sedangkan yang melalui kantor pos dilakukan setiap 3 bulan sekali. Tidak ada jadwal khusus, dan tanggalnya tidak menentu.</p>	<p>penerima melalui kantor pos menunjukkan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bantuan. Namun, ketidakpastian dalam jadwal pendistribusian dapat menimbulkan tantangan bagi penerima dalam merencanakan penggunaan bantuan mereka.</p>
	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang tahu karena informasi langsung ke penerima. - Tidak tahu. 		
Tantangan dan hambatan	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi penerima yang lansia terkendala dengan transportasi. Untuk tempat pengambilan bantuan - Cara mengatasi Pendistribusian didekatkan sampai ke tingkat kalurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala Transportasi Penerima bantuan yang lansia mengalami kesulitan dalam transportasi untuk mengambil bantuan. Solusi yang diusulkan adalah mendekatkan 	<p>Terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program bantuan, terutama terkait akses transportasi, kehadiran dalam pertemuan, dan penggunaan</p>

	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - Kpm yang tidak mau hadir dalam pertemuan kelompok akan ketinggalan informasi terkait dengan proses pkh - Kecemburuan sosial di kalangan masyarakat - Cara mengatasi pendamping biasanya akan melakukan pendekatan secara personal kepada kpm. Jika kepada masyarakat pdp melakukan pendekatan dengan mendengarkan keluhan kesah, jika memang ada yg perlu dibantu biasanya pdp akan berkoordinasi dengan pihak lain jika ada bantuan sosial yg lain, tanpa harus pkh 	<p>pendistribusian hingga ke tingkat kalurahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran dalam Pertemuan KPM yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok berisiko kehilangan informasi terkait proses PKH. Pendamping melakukan pendekatan personal kepada KPM dan mendengarkan keluhan kesah masyarakat untuk mengatasi masalah ini. - Kecemburuan Sosial Terdapat kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih inklusif. 	<p>bantuan. Untuk meningkatkan efektivitas program, penting untuk mengatasi masalah ini melalui pendekatan yang lebih inklusif, dukungan yang memadai bagi kelompok rentan, serta pengawasan dan penyuluhan yang berkelanjutan.</p>
	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima yang lansia harus didampingi 		

		<p><i>keluarga karena harus ke bank, yang jaraknya jauh.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pendistribusian didekatkan sampai ke tingkat kalurahan.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan untuk Lansia Penerima lansia perlu didampingi oleh keluarga saat pergi ke bank, terutama jika jaraknya jauh. - Penggunaan Bantuan Meskipun proses pendistribusian sudah lebih baik, tantangan utama terletak pada penggunaan bantuan oleh penerima agar tepat sasaran. Penyuluhan dan pengawasan yang maksimal diperlukan untuk memastikan penggunaan yang benar. - Pengawasan dan Pembinaan Pengawasan oleh pejabat dan pendamping, serta 	
	JOKO WULAN TORO (Ketua Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Proses pendistribusian sudah lebih bagus, tetapi yang jadi masalah pendistribusian penggunaan bantuan tersebut oleh penerima agar tepat penggunaanya .</i> - <i>Tentu dengan penyuluhan yang terus menerus serta pengawasan yang maksimal.</i> 		
	ANANIAS YUNIARTO (Anggota Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sudah baik, Tantangannya pendistribusian lebih ke penggunaan/belanja</i> - <i>Pengawasan oleh pejabat/pendamping, dan pembinaan.</i> 		

			pembinaan yang berkelanjutan, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian dan penggunaan bantuan.	
Koordinasi dengan pihak terkait	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Koordinasi ke pemdes kurang, pendamping ke penerima.</i> - <i>Yang peran aktif ya yang menerima karena ada pertemuan kelompok penerima.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Pemdes Koordinasi antara pihak kamituwa dan pemdes dinilai kurang, dengan pendamping lebih fokus pada komunikasi langsung dengan penerima. Peran aktif dalam pertemuan kelompok penerima lebih banyak dilakukan oleh mereka yang menerima bantuan. - Koordinasi Pendamping 	Koordinasi antara pendamping, pemdes, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan program bantuan. Kurangnya koordinasi dapat menghambat efektivitas program dan menciptakan kesenjangan dalam komunikasi. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memastikan bahwa
	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pendamping selalu akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan ataupun padukuhan, jika dengan dinsos itu pasti karena kami dibawah naungan dinsos</i> - <i>Tidak ada peran aktif masyarakat, hanya khusus kpm penerima bansos saja</i> 		

	<p>Andar Kusnanto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Koordinasi pendamping ke penerima.</i> - <i>Kalau tidak turun-turun yang ditanya dari masyarakat ke dukuh padahal dukuh tidak tahu. Terus kalau ada penerima yang tidak layak lagi atau masyarakat yang layak tapi tidak dapat komplainnya ke dukuh</i> 	<p>Pendamping PKH selalu berkoordinasi dengan pihak kelurahan atau padukuhan, dan beroperasi di bawah naungan Dinas Sosial. Namun, tidak ada peran aktif dari masyarakat secara umum, hanya KPM penerima bansos yang terlibat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi dan Komplain Koordinasi pendamping dengan penerima penting, tetapi jika ada masalah, masyarakat sering mengeluhkan kepada dukuh, meskipun dukuh tidak memiliki informasi yang cukup. Hal ini terjadi ketika 	<p>semua pihak memiliki informasi yang diperlukan, penting untuk memperkuat saluran komunikasi dan meningkatkan kolaborasi antara pendamping dan pemdes.</p>
--	-----------------------	---	--	--

			penerima yang tidak layak masih menerima bantuan atau ketika masyarakat yang layak tidak mendapatkan bantuan.	
Evaluasi dan Umpan Balik Sosialisasi dan Informasi	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Belum pernah, kadangkala lewat pendamping jika pas ketemu.</i> - <i>Minta didekatkan.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi yang Efektif Secara keseluruhan, informasi dari pendamping disampaikan kepada penerima dengan baik, dan sejauh ini tidak ada masalah yang dilaporkan terkait komunikasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi yang ada cukup efektif dalam menyampaikan informasi kepada penerima bantuan. 	Komunikasi yang efektif antara pendamping dan penerima bantuan merupakan aspek penting dalam keberhasilan program. Dengan informasi yang disampaikan dengan baik dan tanpa masalah, saluran komunikasi yang ada dapat dianggap efektif.
	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Iya melalui rekon setelah pengambilan bansos pkj</i> 		
	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kurang tahu, tetapi ada group dari penerima.</i> - <i>Minta didekatkan.</i> 		
	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dari pendamping ke penerima.</i> - <i>Setahu tidak ada masalah.</i> 		
	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Melalui pertemuan kelompok antara pendamping dan kpm penerima bansos pkh</i> 		

		- Ya sangat cukup karena 1 bulan sekali ada pertemuan kelompok antara pendamping dan kpm penerima bansos pkh		
	Andar Kusnanto	- Dari pendamping ke group penerima. - Kurang tahu.		
		-	- Penambahan Kuota Terdapat penambahan kuota bantuan yang dilakukan di kalurahan, namun teknis pelaksanaannya sepenuhnya ditangani oleh pendamping. Keluarga yang berhak menerima bantuan biasanya adalah yang memiliki anggota lansia dan anak sekolah.	Program bantuan di Pagerharjo memiliki struktur yang baik dalam hal penambahan kuota, validasi penerima, dan penyelenggaraan pertemuan rutin. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proses-proses ini,
Proses penerimaan bantuan	Supanto (Kamituwa)	- Saya pernah saat ada penambahan kuota itu dikalurahan tapi teknisnya pendamping sendiri. - Setahuku keluarga yang punya lansia dan anak sekolah.		
	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	- Bnba sudah ada dari kemensos - Diundang ke desa untuk dilakukan validasi kpm sesuai dengan ktp dan kk memastikan dia sendiri sesuai bnba atau bukan, dilihat apakah	- Validasi KPM Proses penerimaan bantuan	

		<p><i>ada kategori di dalam keluarga tersebut (anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, disabilitas)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jika layak tidak layak akan ditentukan oleh pusat</i> - <i>Kriteria masyarakat miskin tidak mampu</i> - <i>Masuk kedalam kategori (anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, disabilitas)</i> 	<p>dimulai dengan undangan dari Kemensos untuk melakukan validasi KPM di desa. Validasi ini dilakukan dengan memeriksa KTP dan KK untuk memastikan bahwa penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, termasuk kategori seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan Kelayakan Kelayakan penerima bantuan ditentukan oleh pusat. Kriteria yang digunakan adalah masyarakat miskin yang tidak mampu, dan mereka 	<p>terutama dalam hal pemahaman penerima terhadap hak dan kewajiban mereka.</p>
	<p>Andar Kusnanto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kalurahan dikasih daftar calon yang belum diverifikasi, seterusnya dilaksanakan oleh pendamping.</i> - <i>Tidak tahu.</i> 	<p>- Penentuan Kelayakan Kelayakan penerima bantuan ditentukan oleh pusat. Kriteria yang digunakan adalah masyarakat miskin yang tidak mampu, dan mereka</p>	

			harus masuk dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya.	
Pengetahuan dan Pemahaman Penerima	Supanto (Kamituw a)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>setahuku ada sosialisasi pendamping tetapi masalah paham tidaknya ya kurang tahu.</i> - <i>Dari data lewat pendamping.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Kelompok Rutin Penda mping mengadakan pertemuan kelompok secara rutin sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman penerima tentang program bantuan. Pertemuan ini berfungsi sebagai platform untuk mendiskusika n hak dan kewajiban penerima, serta untuk menjawab pertanyaan yang mungkin timbul. Namun, efektivitas pertemuan ini dalam meningkatka 	Pertemuan kelompok rutin merupakan elemen penting dalam program bantuan, berfungsi untuk memperkuat pemahaman penerima dan memberikan platform untuk diskusi. Namun, untuk meningkatka n efektivitas program, perlu dilakukan evaluasi berkelanjuta n terhadap pertemuan ini, guna memastikan bahwa penerima mendapatka n manfaat
	Dwi Astuti (Pendamp ing PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pertemuan kelompok rutin,</i> 		
	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Harusnya tahu karena sebelumnya ada sosialisasi pendamping</i> - <i>Dari data lewat pendamping.</i> 		

			n pemahaman penerima perlu dievaluasi lebih lanjut.	maksimal dari informasi yang disampaikan .
Penggunaan Bantuan	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - Kalau yang punya anak sekolah ya untuk kebutuhan sekolah, yang berupa pangan ya digunakan untuk makan - Untuk yang digunakan kebutuhan diluar ketentuan ya pasti ada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan Sekolah dan Pangan Bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah bagi anak-anak, serta untuk kebutuhan pangan sehari-hari. - Kelangsungan Hidup Bantuan diharapkan dapat mendukung kelangsungan hidup sehari-hari dan kebutuhan pendidikan. - Penggunaan di Luar Kebutuhan Utama Meski pun bantuan seharusnya digunakan untuk kebutuhan utama, terdapat indikasi 	Bantuan PKH digunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak dan kebutuhan pangan sehari-hari, yang menunjukkan bahwa bantuan ini berperan penting dalam mendukung kelangsungan hidup dan pendidikan. Penerima merasakan pengurangan beban kebutuhan hidup mereka, karena bantuan membantu memenuhi kebutuhan
	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kelangsungan hidup sehari – hari, sekolah - Iya diharapkan seperti itu 		
	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang tahu yang pasti untuk kebutuhan. - Untuk kebutuhan mereka tetapi juga ada yang untuk kepentingan lain diluar kebutuhan utama. 		

			<p>bahwa sebagian penerima juga menggunakan bantuan untuk kepentingan lain di luar ketentuan yang ditetapkan.</p>	<p>dasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, terdapat indikasi bahwa sebagian penerima menggunakan bantuan untuk kepentingan di luar ketentuan yang ditetapkan, yang menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Meskipun manfaat bantuan dirasakan, pendamping mengalami kesulitan dalam mengawasi penggunaan bantuan di lapangan, yang dapat mempengaruhi efektivitas program secara keseluruhan.</p>
--	--	--	---	---

Manfaat yang Dirasakan	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Beban kebutuhan hidupnya berkurang.</i> - <i>Kamai kurang tahu praktek dilapangan karena pendamping pun juga kwalahan untuk mengawasinya.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan Beban Kebutuhan Hidup Penerima merasakan bahwa beban kebutuhan hidup mereka berkurang sebagai akibat dari bantuan yang diterima. Bantuan ini membantu memenuhi kebutuhan dasar yang sebelumnya sulit dijangkau. - Keterbatasan Pengawasan Meskipun ada manfaat yang dirasakan, terdapat kekhawatiran mengenai praktik di lapangan. Pendamping mengalami kesulitan dalam mengawasi penggunaan bantuan, yang dapat mempengaruhi 	Program bantuan memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengurangi beban kebutuhan hidup penerima dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, tantangan dalam pengawasan penggunaan bantuan perlu diatasi untuk memastikan bahwa bantuan digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan program.
	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Beban kebutuhan hidupnya berkurang.</i> - <i>Iya karena kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat terpenuhi.</i> 		

			<p>hi efektivitas program.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Kebutuhan Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tidak terpenuhi, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan penerima. 	
Tepat Sasaran	Supanto (Kamituwa)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sebagian besar sudah tetapi menurut laporan pak dukuh ada juga yang kurang pas.</i> - <i>Menurut laporan dukuh memang ada yang layak dapat bantuan tapi belum mendapat</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan Penerima Sebagian besar penerima bantuan dianggap sudah tepat sasaran. Namun, terdapat laporan dari pak dukuh yang menyebutkan bahwa ada beberapa individu yang kurang tepat menerima bantuan, termasuk mereka yang 	Sebagian besar penerima bantuan PKH dianggap sudah tepat sasaran, namun terdapat laporan dari kepala dukuh mengenai individu yang kurang tepat menerima bantuan, termasuk mereka yang seharusnya
	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sebagian besar sudah tetapi ada juga yang kurang pas.</i> - <i>Ada masyarakat yang miskin</i> 		

		<p><i>mendadak karena sebab musibah, masyarakat yang kelihatan mampu tetapi ada masalah dalam keluarga, lansia jadi satu dengan anaknya dipandang dalam keluarga mampu tetapi anaknya tidak memperhatikan.</i></p>	<p>seharusnya layak tetapi belum mendapatkan bantuan.</p> <p>- Kondisi Masyarakat yang Berubah Beres-beres masyarakat mengalami perubahan status ekonomi yang mendadak, seperti akibat musibah. Ada juga kasus di mana keluarga yang terlihat mampu sebenarnya menghadapi masalah internal, seperti lansia yang tinggal bersama anak yang tidak memperhatikan kebutuhan mereka.</p> <p>- Kualitas Data dan Pendataan, data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan</p>	<p>layak tetapi belum mendapatkan bantuan. Selain itu, kondisi masyarakat yang berubah, seperti perubahan status ekonomi mendadak akibat musibah, menunjukkan bahwa beberapa keluarga yang terlihat mampu sebenarnya menghadapi masalah internal, seperti lansia yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kualitas data dan pendataan juga menjadi perhatian, di mana data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan</p>
	Agustinus Sulistyio (Tokoh Masyarakat)	<p>- Menurut saya data yang di dapat kadang belum ada pemilihan dan pemetaan</p> <p>- Dari pendataan yang mendapatkan bantuannya harus dipetakan benar benar membutuhkan atau masih produktif, maka pendataannya harus di tingkatkan lagi</p>	<p>- Kondisi Masyarakat yang Berubah Beres-beres masyarakat mengalami perubahan status ekonomi yang mendadak, seperti akibat musibah. Ada juga kasus di mana keluarga yang terlihat mampu sebenarnya menghadapi masalah internal, seperti lansia yang tinggal bersama anak yang tidak memperhatikan kebutuhan mereka.</p> <p>- Kualitas Data dan Pendataan, data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan</p>	<p>layak tetapi belum mendapatkan bantuan. Selain itu, kondisi masyarakat yang berubah, seperti perubahan status ekonomi mendadak akibat musibah, menunjukkan bahwa beberapa keluarga yang terlihat mampu sebenarnya menghadapi masalah internal, seperti lansia yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kualitas data dan pendataan juga menjadi perhatian, di mana data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan</p>

			<p>kadang-kadang belum melalui proses pemilihan dan pemetaan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas pendataan agar penerima bantuan benar-benar mencerminkan mereka yang membutuhkan, serta mempertimbangkan kondisi produktivitas mereka.</p>	<p>kadang-kadang belum melalui proses pemilihan dan pemetaan yang tepat.</p>
Efektifitas program	Supanto (Kamituwa)	<p>- <i>Ada perubahan kehidupan penerima setelah mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak mempengaruhi penurunan angka kemiskinan karena bantuan habis pakai bukan bantuan yang berkelanjutan</i></p>	<p>- Perubahan Kehidupan Penerima Terdapat perubahan positif dalam kehidupan penerima setelah mendapatkan bantuan PKH. Namun, bantuan ini tidak berkontribusi signifikan terhadap</p>	<p>Bantuan PKH telah membawa perubahan positif dalam kehidupan penerima, meskipun kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan masih terbatas, terutama</p>

		<p><i>untuk modal usaha.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dapat meningkatkan daya beli masyarakat.</i> 	<p>penurunan angka kemiskinan, karena sifatnya yang habis pakai dan bukan bantuan berkelanjutan untuk modal usaha.</p>	<p>karena bantuan yang bersifat habis pakai dan tidak berkelanjutan untuk modal usaha. Meskipun demikian, program ini berhasil meningkatkan daya beli masyarakat, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik. Namun, terdapat tantangan terkait ketergantungan masyarakat pada bantuan, di mana beberapa individu masih mengandalkan bantuan meskipun sudah tidak layak menerimanya.</p>
	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pola pikir masyarakat yang masih mengandalkan bantuan padahal sudah tidak layak</i> - <i>Update yang tidak tepat</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya Beli Masyarakat Meskipun bantuan tidak mengurangi angka kemiskinan secara signifikan, program ini berhasil meningkatkan daya beli masyarakat, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik. 	
	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>ada tetapi tidak mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.</i> - <i>Meningkatkan daya beli masyarakat.</i> 		
	Agustinus Sulisty (Tokoh Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Konteks kemiskinan, untuk mengurangi angka kemiskinan, bantuan dalam bentuk barang habis pakai, dan bantuan yang bisa fleksibel, menurutnya, bantuan tersebut kurang efektif sehingga barang barang yang diberikan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan pada Bantuan Terjadi masalah dalam pola pikir masyarakat yang masih bergantung pada bantuan, meskipun 	

		<p>untuk efektif yaitu sesuai popternsi seperti pertanian, yang sifatnya punya nilai ekonomi berkelanjutan tidak hanya saat itu.</p> <p>- Setiap tahun harus ada update data, sepenerima ada peningkatan atau tidak, data ini valid atau tidak, masih mampu bekerja tapi mendapat bantuan</p> <p>- Selain pendataan untuk penekanan kemiskina, bantuan yang bersifat produktif tidak habis pakai</p>	<p>mereka sudah tidak layak menerima. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan data yang lebih tepat dan evaluasi terhadap kelayakan penerima bantuan agar program dapat lebih efektif.</p>	
Saran Dan Perbaikan	Supanto (Kamituwa)	<p>- perlu update data secara berkala</p> <p>- Verifikasi perlu melibatkan banyak pihak, bantuan bagi masyarakat</p>	<p>- Pembaruan Data dan Verifikasi</p> <p>Penting untuk melakukan pembaruan data secara berkala agar informasi</p>	<p>Pembaruan data dan verifikasi secara berkala sangat penting untuk memastikan</p>

		<i>yang masih produktif perlu inovasi yang lain berupa modal peralatan usaha /permodalan, harus ada pengawasan agar tidak salah penggunaan</i>	mengenai penerima bantuan tetap akurat. Proses verifikasi harus melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.	akurasi informasi mengenai penerima bantuan, dengan melibatkan banyak pihak dalam proses ini untuk menjamin bahwa bantuan tepat sasaran. Selain itu, inovasi dalam bentuk bantuan diperlukan, seperti menyediakan modal peralatan usaha atau permodalan, agar bantuan tidak hanya bersifat habis pakai. Kerjasama dengan kepala dukuh juga krusial untuk menonaktifkan KPM yang tidak layak, sehingga
	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala dukuh yang mau diajak kerjasama jika ada kpm yang sudah tidak layak untuk di non aktifkan - Tidak ada semua baik adanya 	- Inovasi dalam Bentuk Bantuan Bantuan bagi masyarakat yang masih produktif perlu diubah menjadi bentuk yang lebih inovatif, seperti modal peralatan usaha atau permodalan, bukan hanya bantuan habis pakai. Diperlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah	
	Andar Kusnanto	<ul style="list-style-type: none"> - perlu update data secara berkala - Verifikasi perlu melibatkan banyak pihak, bantuan bagi masyarakat yang masih produktif perlu inovasi yang lain berupa modal peralatan usaha /permodalan, harus ada pengawasan 		

		<i>agar tidak salah penggunaan</i>	penyalahgunaan bantuan.	program dapat lebih efektif.
	Agustinus Sulistyio (Tokoh Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Menilaat dari kota pelajar yk, yk menjadi kosta istimewa tetapi bukan istimewa mikinya tetapi kalo saran, dana yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya tidak perlu di rubah untuk namanya yang penting adalah lebih tepat sasarnya,</i> - <i>Katagori miskin tidak diukur dari tua dan mudanya, jika memang yang masih memiliki potensi yang harus dikembangkan , diberikan bantuan yang sifatnya berkelanjutan, jangan dalam bentuk uang atau habis di pakai.</i> - <i>Bukan bantuan habis pakai tetapi menjadi modal atau</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan Pihak Terkait Kepala dukuh perlu dilibatkan dalam kerjasama untuk menonaktifkan KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan, sehingga program dapat lebih tepat sasaran. - Bantuan Berkelanjutan Bantuan yang diberikan sebaiknya bersifat berkelanjutan dan tidak hanya dalam bentuk uang. Misalnya, bantuan dapat berupa alat, bibit pertanian, atau tunai untuk usaha, yang dapat membantu penerima 	Bantuan sebaiknya bersifat berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk alat atau bibit pertanian, yang dapat membantu penerima dalam jangka panjang. Terakhir, pendekatan holistik dalam penilaian angka kemiskinan harus mempertimbangkan aspek hilir, yaitu bagaimana produk yang dihasilkan dapat terjual dengan baik, sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan

		<p><i>pawitan, dikala tidak ada bantuan pun akan menjai modal untuk mendapatkan uang dan bertahan hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lebih ke bantuan yang seperti modal usaha, bisa berupa alat, bibit pertanian, tanaman ataupun tunai untuk usaha. Tidak habis pakai.</i> - <i>Bahnya setelah diberikan bantuan ada beberapa hal, jika mereka bisa bisa berusaha, harus dilihat hilirnya harus terjual dengan baik, sehingga pemanfaatan teknologi itu bisa dimaksimalkan oleh semua kalangan sampai level bawah, misalnya</i> 	<p>dalam jangka panjang. Penting untuk memastikan bahwa setelah menerima bantuan, penerima dapat mengembangkan usaha mereka dan memanfaatkan teknologi, seperti e-commerce, untuk meningkatkan penjualan produk mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Holistik Penilaian terhadap angka kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek hulu, tetapi juga harus mempertimbangkan hilirnya, yaitu bagaimana produk yang dihasilkan dapat terjual dengan baik dan memberikan dampak 	<p>penerima bantuan.</p>
--	--	--	---	--------------------------

		<p>dengan penggunaan handphone ecomerce, anak muda dapat dimanfaatkan menjadi distributornya.</p> <p>- Anka kemiskinan tidak hanya dilihat dari hulu saja tetapi harus dilihat dari hilirnya.</p>	positif bagi kehidupan penerima bantuan.	
Transparansi dan akuntabilitas	Dwi Astuti (Pendamping PKH)	<p>- Transparansi dan akuntabilitas, dalam pengawasan selalu ada setiap kpm mengambil bantuan akan ada rekonsiliasi bagi kpm yang telah mengambil bantuan, pendamping juga memonitoring</p>	<p>- Rekonsiliasi dan Monitoring Setiap KPM yang mengambil bantuan akan melalui proses rekonsiliasi, di mana pendamping melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan yang ada.</p> <p>- Transfer Langsung ke Rekening</p> <p>- Bantuan disalurkan</p>	Program PKH menunjukkan upaya yang baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas melalui proses rekonsiliasi dan monitoring yang dilakukan oleh pendamping untuk memastikan penggunaan bantuan sesuai ketentuan. Bantuan disalurkan
	JOKO WULAN TORO (Ketua Bpkal)	<p>- Sudah transparansi karena bantuan langsung ditransfer lewat rekening penerima,</p>		

		<p><i>tetapi perlu diarahkan penggunaanya .</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pengawasan harus melekat ke masyarakat, tidak hanya mendapatkan laporan saja setidaknya meminimalisir penyimpangan penggunaan PKH pada penerima.</i> 	<p>secara langsung melalui transfer ke rekening penerima, yang menunjukkan adanya transparansi dalam proses distribusi bantuan. Namun, perlu ada arahan yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Masyarakat Pengawasan terhadap penggunaan bantuan harus melibatkan masyarakat secara aktif, bukan hanya mengandalkan laporan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dalam penggunaan bantuan PKH. - Etika dan Kecemburuan Sosial 	<p>langsung ke rekening penerima, yang mencerminkan transparansi dalam distribusi, meskipun perlu ada arahan yang jelas mengenai penggunaannya. Pengawasan masyarakat juga sangat penting untuk meminimalisir penyimpangan, sehingga partisipasi aktif dari masyarakat diperlukan. Selain itu, menjaga etika di antara penerima bantuan sangat krusial untuk menghindari kecemburuan sosial, dengan penerima</p>
	ANANIA S YUNIARTO (Anggota Bpkal)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sudah transparansi karena bantuan langsung ditransfer lewat rekening penerima, tetapi perlu menjaga etika bagi penerima agar tidak timbul kecemburuan sosial.</i> - <i>Penerima juga dimintai laporan penggunaan yang mendasar saja setidaknya meminimalisir penyimpangan penggunaan PKH pada penerima.</i> 		

			<p>Meskipun sudah ada transparansi, penting untuk menjaga etika di antara penerima bantuan agar tidak timbul kecemburuan sosial. Penerima diminta untuk memberikan laporan penggunaan bantuan yang mendasar, guna memastikan bahwa bantuan digunakan dengan tepat dan sesuai kebutuhan.</p>	<p>diminta untuk melaporkan penggunaan bantuan secara mendasar.</p>
Penerima Manfaat	Tumingin (Penerima)	<p>- <i>Pendapat saya tentang bantuan PKH yang telah saya terima tentunya sangat bermanfaat dan sangat membantu karena bisa untuk membeli kebutuhan rumah tangga, sekolah anak dan lain sebagainya.</i></p>	<p>- Manfaat Bantuan Bantuan PKH sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak. Bantuan ini membantu dalam pembelian perlengkapan</p>	<p>Bantuan PKH memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga, namun frekuensi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Sejak menerima bantuan PKH belum membuat sejahtera karena masih banyak untuk membatu kebutuhan pendidikan anak juga, masih jauh dari harapan sejahtera. - Bantuan yang diberikan dalam waktu 3 bulan sekali belum cukup memenuhi kebutuhan karena kebutuhan baik keluarga atau sekolah semakin mahal. - Informasi tentang persyaratan dan proses pencairan saya menerima informasi tersebut dari pendamping dan syaratnya cukup mudah. - Kualitas petugas PKH di wilayah ini memberikan 	<p>sekolah dan biaya pendidikan, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh tani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Bantuan Meskipun bantuan dirasakan bermanfaat, penerima merasa bahwa bantuan yang diberikan setiap tiga bulan sekali belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dengan meningkatnya biaya hidup. Mereka menyatakan bahwa kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai. - Informasi dan Proses Pencairan Informasi mengenai persyaratan dan proses 	<p>pencairan setiap tiga bulan dianggap tidak memadai untuk menghadapi biaya hidup yang meningkat. Proses pencairan masih menghadapi kendala ketidakpastian waktu, yang mengganggu perencanaan keuangan penerima. Meskipun pelayanan pendamping dinilai baik, ada harapan untuk peningkatan jumlah dan bentuk bantuan, terutama dalam bentuk modal usaha yang berkelanjutan. Penerima lebih memprioritaskan</p>
--	--	--	---	---

		<p><i>informasi dan pendampingan sudah baik, ramah dalam memberikan informasi dan mendampingi penerima</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kendala yang saya alami selama proses pengajuan atau pencairan bantuan PKH adalah jika sudah dikasih informasi pencairan kadang dicek belum masuk.</i> - <i>Bantuan PKH sangat membantu dan mendukung sekali dalam pendidikan anak-anak, seperti pembelian perlengkapan sekolah atau biaya pendidikan lainnya, karena buruh tani seperti saya jarang untuk memperoleh uang tunai.</i> - <i>Untuk jangka panjang ya buat anak sekolah, tetapi</i> 	<p>pencairan bantuan diterima dengan baik dari pendamping. Namun, ada kendala dalam pencairan, seperti ketidakpastian kapan dana akan tersedia, yang menyebabkan penerima harus menunggu dan memeriksa secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pendamping Kualitas pelayanan dari petugas PKH di wilayah tersebut dinilai baik. Pendamping dianggap ramah dan informatif dalam memberikan bantuan dan mendampingi penerima. 	<p>pendidikan sebagai investasi masa depan, menunjukkan perlunya program untuk mendukung pengembangan usaha yang dapat memberikan hasil jangka panjang. Dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat, PKH dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.</p>
--	--	--	--	---

		<p>untuk keluarga karena bantuan ini habis pakai ya kurang berdampak.</p> <p>- Yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas bantuan PKH di masa depan adalah syukur bantuannya ditambah dan bisa untuk modal usaha, karena takutnya kalau sudah tidak dapat bantuan tidak punya sumber pendapatan keluarga.</p>	<p>- Harapan untuk Perbaikan</p> <p>Penerima berharap agar bantuan PKH dapat ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun bentuknya. Mereka menginginkan bantuan yang lebih berkelanjutan, seperti modal usaha untuk peternakan atau pertanian, agar dapat membantu mereka mandiri dan tidak bergantung pada bantuan di masa depan.</p> <p>- Fokus pada Pendidikan</p> <p>Penerima lebih memfokuskan penggunaan bantuan untuk pendidikan anak, mengingat pentingnya</p>	
	Maryanto (Penerima)	<p>- Menurut maryanto bantuan pkh ini sangat membantu sekali, contohnya yang dirasakan adalah dalam hal pendidikan, anak sekolah sudah smk, termasuk kebutuhan</p>		

		<p><i>sehari2 fokus pendidikan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Peningkatakn kesejahteraan, secara keseluruhan belum, karena dalam bantuan pkh ini hanya pas digunakan untuk biaya sekolah anak, kadang malah kurang, ukuran sejahtera belum begitu terasa,</i> - <i>Berapa kali sudah diterima, 3 bulan sekali, untuk informasi sudah turun atau belum dari pendamping PKH, dishare ke grup PKH,</i> - <i>Ada syarat pencarian, membawa kartu atm, setelah diterima terus foto bersama karu dan uangnya</i> - <i>Dalam pencairan dana tidak bersmamaa,</i> 	<p>pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Mereka berharap agar bantuan dapat mendukung pengembangan usaha yang dapat memberikan hasil jangka panjang, bukan hanya bantuan habis pakai.</p>	
--	--	---	---	--

		<p><i>kadang ada yang sudah turun dan ada yang belum, kemudian di cek di hari berikutnya, jadi tidak bersamaan turunnya,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Harapanya dalam informasi pencairannya bisa kompak dan bersama mengambil di tempat pencairan</i> - <i>Pelayanan petugas itu pada saat kami mengambil, pelayanan bagus rama, kalo belum turun, bilang belum ada uangnya dan belum bisa di ambil</i> - <i>Untuk pendidikan, bagi penerima, sangat mendukung karena dalam hal pembayaran sekolah meringankan sekali, anak 2, yang satu</i> 		
--	--	---	--	--

		<p><i>sudah keluar, hasil akhir dalam bidang keuangan, ternyata sangat meringankan sekali, setelah di urus di bagian keuangan, kekurangan pembayaran tidak banyak tinggal berapa ratus ribu saja.</i></p> <p><i>- Antara kebutuhan rumah tangga dan pendidikan penerima lebih fokus ke pendidikan, karena yang namanya pendidikan itu mau tidak mau harus ada, kalo makan bisa dicari dengan hasil perkebunan dan seadanya.</i></p> <p><i>- PKH ini perlu ada tambahan atau cukup atau bagaimana? Kalo bisa ada penambahan dalam hal dana sukur</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p>sukur bisa buat modal untuk usaha, seperti peternakan, untuk jaga jaga suatu saat sudah tidak dapat, bisa untuk tabungan, kalo di dusun kebanyakan petani, peternakan, dengan adanya bisa dikembangkan seperti kambing, sapi, ayam, yang bisa mendapatkan hasil, batuan yang sifatnya berkelanjutan,. Tambah nominalnya, bantuanya bisa untuk modal usaha, terutama dalam hal pertanian, perternakan, yang dapat menghasilkan, tidak Cuma monoton. Kalo kambing, betina bisa utnuh bibit,</p> <p>- Bantuan ini mengarah</p>		
--	--	--	--	--

		<p> <i>untuk mensejahterak an agak sulit tanpa ada usaha, tidak habis pakai, harapnya bantuanya bisa untuk perkembangan usaha, sampai mandiri tidak mendapatkan PKH sudah tidak masalah.</i> </p>		
--	--	---	--	--

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Gambar Proses Wawancara





